

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Selatan



AGUSTUS 2026



LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Selatan

“Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”

AGUSTUS 2026



Publikasi ini dapat diakses secara online pada :

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Selatan-Agustus-2026.aspx>

Salinan Publikasi ini dapat diperoleh dengan menghubungi :

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang

Telp : 0711 - 354188 ext 8246

Faks : 0711 – 312013

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun “Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Edisi Agustus 2026” ini tepat pada waktunya. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Sumatera Selatan.

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,20% (yoy), tetap tumbuh kuat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,34% (yoy). Kinerja perekonomian Sumatera Selatan tercatat lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tercatat sebesar 5,06% (yoy) namun lebih rendah dari Nasional yang tercatat sebesar 5,29% (yoy). Tetap tumbuhnya ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 disumbang utamanya oleh kuatnya aktivitas konsumsi pemerintah didorong oleh pembangunan berbagai infrastruktur logistik batu bara, pembangunan pabrik industri pengolahan, serta realisasi ekspor komoditas utama Sumatera Selatan yang lebih baik. Dari sisi inflasi, realisasi inflasi pada triwulan II 2026 tercatat 2,89% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang sebesar 3,04% (yoy). Tekanan inflasi didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak jenis RON 92 yang turut mendorong biaya transportasi dan biaya distribusi. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan pokok dan hortikultura, seperti bawang merah dan cabai merah.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini melalui kontribusi data dan informasi, baik melalui forum diskusi maupun media lainnya, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik, perbankan, akademisi, asosiasi, serta pemangku kebijakan lainnya. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat di masa mendatang. Kami juga menyadari bahwa Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga masukan berupa saran, kritik, dan dukungan informasi maupun data dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas laporan ini ke depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya, serta memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya. Akhir kata, kami berharap Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Edisi Agustus 2026 ini bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Palembang, Agustus 2026
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bambang Pramono
Direktur

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Indikator Utama	xii
Ringkasan Umum	xvi

01 Perkembangan Ekonomi Daerah

1.1. Perkembangan Ekonomi Secara Umum	2
1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	2
1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah	3
1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)/Investasi	5
1.2.3. Ekspor Luar Negeri	6
1.2.4. Impor Luar Negeri	8
1.3. Perkembangan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	10
1.3.1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	11
1.3.2. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	12
1.3.3. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12
1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13
1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi	14
Boks 1: <i>Launching</i> Inovasi Sinergi Program Pengendalian Inflasi Daerah dan Asta Cita.	15

02 Perkembangan Inflasi Daerah

2.1. Inflasi Secara Umum	20
2.2. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	21
2.2.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	21
2.2.2. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	21
2.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	22
2.2.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	22
2.2.5. Kelompok Kesehatan	22
2.2.6. Kelompok Transportasi	22
2.2.7. Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	23
2.2.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	23
2.2.9. Kelompok Pendidikan	23
2.2.10. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	23
2.2.11. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	24
2.3. Perkembangan Inflasi Bulanan dan Tracking Inflasi Triwulan III 2026	24
2.4. Analisis Inflasi Spasial	26
2.4.1. Kota Palembang	26
2.4.2. Kota Lubuklinggau	27
2.4.3. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	28
2.4.4. Kabupaten Muara Enim	29
2.5. Upaya Pengendalian Inflasi	29
Boks 2: Menghubungkan Daerah, Menjaga Pasokan: Penguatan KAD Sumatera Selatan.	34

03 Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

3.1. Kondisi Umum Sumatera Selatan	38
3.2. Pembiayaan Daerah	39
3.2.1. Perkembangan Pembiayaan Korporasi	39
3.2.2. Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga	41
3.3. Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan UMKM	42
Boks 3: FESyar Sumatera 2026 Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional melalui Sinergi dan Transformasi Digital	45

04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1.	Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah	50
4.2.	Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai	50
4.2.1.	Transaksi SKNBI dan BI-RTGS	50
4.2.2.	Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	51
4.3.	Perkembangan Transaksi Elektronifikasi dan E-Commerce	53
4.4.	Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)	57
Boks 4:	Digital Kito Galo (DKG) 7th x Gemilang Palembang Raya Tahun 2026: Sinergi Digitalisasi untuk Penguatan Ekonomi Sumatera Selatan	60

Lampiran	90
Daftar Istilah	102

05

Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

5.1.	Kondisi Ketenagakerjaan	64
5.1.1.	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	64
5.1.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64
5.1.3.	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	64
5.1.4.	Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	65
5.1.5.	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan	65
5.1.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	65
5.1.7.	Survei Konsumen	66
5.2.	Kondisi Kesejahteraan	66
5.3.	Kemiskinan	67
5.3.1.	Perubahan Garis Kemiskinan	68
5.3.2.	Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	69
5.3.3.	Ketimpangan Pengeluaran Penduduk	70

06

Prospek Perekonomian Daerah

6.1.	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2026	74
6.2.	Prospek Makroekonomi Keseluruhan Tahun 2026	76
6.3.	Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2026	78
6.4.	Rekomendasi	79

Daftar Grafik

01

Perkembangan Ekonomi Daerah

Grafik 1.1.	PDRB dan Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010	2
Grafik 1.2.	PDRB dan Laju Pertumbuhan Triwulanan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010	2
Grafik 1.3.	Indeks Konsumsi Saat Ini (IKE Survei Konsumen Bank Indonesia)	4
Grafik 1.4.	Pertumbuhan Kredit Multiguna dan Ruko/Rukan Sumatera Selatan	4
Grafik 1.5.	Realisasi Belanja APBD Sumatera Selatan	5
Grafik 1.6.	Realisasi Belanja APBN di Sumatera Selatan	5
Grafik 1.7.	PMA - PMDN di Sumatera Selatan	6
Grafik 1.8.	Nilai Impor Barang Modal Sumatera Selatan	6
Grafik 1.9.	Nilai Impor Bahan Baku Sumatera Selatan	6
Grafik 1.10.	Nilai Impor Barang Konsumsi Sumatera Selatan	6
Grafik 1.11.	Perkembangan PDRB Komponen Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan	7
Grafik 1.12.	Perkembangan Harga Komoditas Internasional	7
Grafik 1.13.	Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Sumatera Selatan	7
Grafik 1.14.	Perkembangan Volume Ekspor Impor Sumatera Selatan	7
Grafik 1.15.	Perkembangan Nilai Ekspor Batu bara Sumatera Selatan	8
Grafik 1.16.	Perkembangan Nilai Ekspor Karet Sumatera Selatan	8
Grafik 1.17.	Perkembangan Nilai Ekspor Pulp & Paper Sumatera Selatan	8
Grafik 1.18.	Perkembangan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Sumatera Selatan	8
Grafik 1.19.	Pangsa Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan berdasarkan Nilai Ekspor	8
Grafik 1.20.	Pangsa Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Nilai Ekspor	8
Grafik 1.21.	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Sumatera Selatan	9
Grafik 1.22.	Perkembangan Volume Impor Provinsi Sumatera Selatan	9
Grafik 1.23.	Perkembangan Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal	9

Grafik 1.24.	Pangsa Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal	9
Grafik 1.25.	Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalan Sumatera Selatan	12
Grafik 1.26.	Penyaluran Kredit Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13
Grafik 1.27.	Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan	13
Grafik 1.28.	Kegiatan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran di Sumatera Selatan	14
Grafik 1.29.	Penyaluran Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14
Grafik 1.30.	Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi Sumatera Selatan	14
Grafik 1.31.	Realisasi Penjualan Semen di Sumatera Selatan	14

02

Perkembangan Inflasi Daerah

Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional	21
Grafik 2.2.	Inflasi Provinsi di Regional Sumatera periode Triwulan II 2026	21
Grafik 2.3.	Perkembangan Inflasi Kota Sampel Perhitungan Inflasi	26

03

Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Grafik 3.1.	Perkembangan Pertumbuhan DPK dan Aset Perbankan di Sumatera Selatan	38
Grafik 3.2.	Pangsa Kredit Perbankan di Sumatera Selatan	38
Grafik 3.3.	Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	38
Grafik 3.4.	Pangsa DPK Perbankan Sumatera Selatan	38

Grafik 3.5.	Perkembangan Risiko perbankan Sumatera Selatan Berdasarkan Lokasi Bank	39	Grafik 4.4.	Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Sumatera Selatan	51
Grafik 3.6.	Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan	40	Grafik 4.5.	Perkembangan Volume Transaksi RTGS Sumatera Selatan	51
Grafik 3.7.	Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan	40	Grafik 4.6.	Nilai Nominal Transaksi Kartu ATM/D	52
Grafik 3.8.	Likert Scale Penjualan Domestik, Margin, dan Perkiraan Penjualan	40	Grafik 4.7.	Volume Transaksi Kartu ATM/D	52
Grafik 3.9.	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi	40	Grafik 4.8.	Pangsa Transaksi ATM/D	52
Grafik 3.10.	NPL Kredit Korporasi Sumatera Selatan	40	Grafik 4.9.	Jumlah Kartu ATM/D	52
Grafik 3.11.	Indeks Keyakinan Konsumen dan Komponennya Sumatera Selatan	41	Grafik 4.10.	Nominal Transaksi Kartu Kredit	53
Grafik 3.12.	Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan	41	Grafik 4.11.	Volume Transaksi Kartu Kredit	53
Grafik 3.13.	Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan menurut kelompok penggunaan	41	Grafik 4.12.	Pangsa Transaksi Kartu Kredit	53
Grafik 3.14.	Pertumbuhan Komposisi Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan	42	Grafik 4.13.	Jumlah Kartu Kredit	53
Grafik 3.15.	NPL Kredit Rumah Tangga Sumatera Selatan	42	Grafik 4.14.	Jumlah UE	54
Grafik 3.16.	Perkembangan Kredit UMKM di Sumatera Selatan (Rp Triliun)	42	Grafik 4.15.	Jumlah UE reader	54
Grafik 3.17.	Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Skala Usaha: (a) Pangsa Kredit UMKM; dan (b) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy)	42	Grafik 4.16.	Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Nominal	55
Grafik 3.18.	Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Penggunaan : (a) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy); dan (b) Pangsa Kredit UMKM	43	Grafik 4.17.	Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Volume	55
Grafik 3.19.	Pangsa Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan	43	Grafik 4.18.	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS	55
Grafik 3.20.	Pertumbuhan Sektoral Kredit UMKM dan Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Triwulan II 2026	44	Grafik 4.19.	Persebaran <i>Merchant</i> QRIS	55
Grafik 3.21.	Perkembangan NPL Kredit UMKM Sumatera Selatan	44	Grafik 4.20.	Proporsi Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	56
Grafik 3.22.	Perkembangan NPL Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan	44	Grafik 4.21.	Proporsi Penyaluran Jumlah KPM Bantuan Sembako	56
			Grafik 4.22.	Proporsi Penyaluran Nominal Bantuan Sembako	56
			Grafik 4.23.	Nominal transaksi <i>E-commerce</i>	57
			Grafik 4.24.	Frekuensi transaksi <i>E-commerce</i>	57
			Grafik 4.25.	Perkembangan Transaksi KUPVA BB Sumatera Selatan	57
			Grafik 4.26.	Transfer Dana Domestik- <i>Incoming</i>	58
			Grafik 4.27.	Transfer Dana Luar Negeri- <i>incoming</i>	58
			Grafik 4.28.	Transfer Dana Domestik- <i>Outgoing</i>	58
			Grafik 4.29.	Transfer Dana Luar Negeri- <i>Outgoing</i>	58

04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Grafik 4.1.	Aliran Uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan	50
Grafik 4.2.	Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Sumatera Selatan	51
Grafik 4.3.	Perkembangan Jumlah Warkat Transaksi Kliring Sumatera Selatan	51

05

Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

Grafik 5.1.	Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Sumatera Selatan (Juta orang), 2024-2026	64
Grafik 5.2.	Perkembangan TPAK di Sumatera Selatan, 2024-2026 (dalam %)	64
Grafik 5.3.	Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Sumatera Selatan (%)	64
Grafik 5.4.	Penduduk Bekerja di Sumatera Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)	65
Grafik 5.5.	Presentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama	65

Grafik 5.6.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan, 2024-2026 (dalam %)	65
Grafik 5.7.	Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)	66
Grafik 5.8.	Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat ini Dibandingkan 6 Bulan yang Lalu	66
Grafik 5.9.	Indeks Harga yang Diterima, Indeks Harga yang dibayar dan Nilai Tukar Petani	66
Grafik 5.10.	Nilai Tukar Petani per Subsektor	67
Grafik 5.11.	Perkembangan NTP dan Inflasi Perdesaan Sumatera Selatan	67
Grafik 5.12.	Perkembangan Penduduk Miskin	68
Grafik 5.13.	Perkembangan Gini Ratio Sumatera Selatan dan Nasional	70
Grafik 5.14.	Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk	70
Grafik 5.15.	Distribusi Pendapatan Perkapita Penduduk Perkotaan	70
Grafik 5.16.	Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perdesaan	70

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Andil Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2024-2026 (%yoy)	3
Tabel 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%yoy)	3
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%qtq)	3
Tabel 1.4.	Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta US\$)	9
Tabel 1.5.	Laju Pertumbuhan Tahunan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%yoy)	10
Tabel 1.6.	Laju Pertumbuhan Triwulanan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%qtq)	11
Tabel 2.1.	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan	20
Tabel 2.2.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2026	20
Tabel 2.3.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	21
Tabel 2.4.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Khaki	21
Tabel 2.5.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	22
Tabel 2.6.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga	22
Tabel 2.7.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan	22
Tabel 2.8.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi	22
Tabel 2.9.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	23
Tabel 2.10.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	23
Tabel 2.11.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan	23
Tabel 2.12.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	23
Tabel 2.13.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	24
Tabel 2.14.	Inflasi Kota Palembang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	26
Tabel 2.15.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2026 Kota Palembang	27
Tabel 2.16.	Inflasi Kota Lubuklinggau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	27
Tabel 2.17.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2026 Kota Lubuklinggau	28
Tabel 2.18.	Inflasi Kab. OKI Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	28
Tabel 2.19.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2026 Kab. OKI	28
Tabel 2.20.	Inflasi Kab. Muara Enim Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	29
Tabel 2.21.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2026 Kab. Muara Enim	29
Tabel 2.22.	Upaya Pengendalian Inflasi	30
Tabel 2.23.	Perubahan Harga Rata-Rata Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi di Sumatera Selatan	31
Tabel 2.24.	Perkembangan Margin Distribusi Harga di Provinsi Sumatera Selatan	32
Tabel 4.1.	Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Selatan	51
Tabel 4.2.	Perkembangan Transaksi Penggunaan Uang Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan	54
Tabel 5.1.	Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu Triwulan II 2026	67
Tabel 5.2.	Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan 6 Bulan Yang Akan Datang Triwulan II 2026	67
Tabel 5.3.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	68
Tabel 5.4.	Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan	69
Tabel 5.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan	69
Tabel 6.1.	<i>Global Economic Outlook</i>	75
Tabel 6.2.	Volume Perdagangan Internasional	76

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan	24
Gambar 2.2.	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada April 2026	25
Gambar 2.3.	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Mei 2026	25
Gambar 2.4.	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Juni 2026	25
Gambar 2.5.	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Juli 2026	26



Indikator Utama

A. PDRB & INFLASI

Indikator	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
MAKRO												
Indeks Harga Konsumen												
Sumatera Selatan	105,93	106,42	105,78	107,01	107,01	107,81	109,02	109,42	110,12	110,12	111,14	112,17
Palembang	105,71	106,15	105,39	106,33	106,33	107,11	108,42	108,85	109,43	109,43	110,43	111,39
Lubuk Linggau	104,81	105,23	104,59	105,49	105,49	106,15	107,41	108,00	108,52	108,52	109,28	110,83
Ogan Komering Ilir	107,00	107,77	106,98	108,80	108,80	110,11	111,14	111,11	111,96	111,96	113,13	114,12
Muara Enim	106,24	106,77	106,93	109,08	109,08	109,46	110,30	111,00	112,22	112,22	113,28	114,51
Laju Inflasi Tahunan (yoy)												
Sumatera Selatan	3,24	2,48	1,40	1,20	1,20	1,77	2,44	3,44	2,91	2,91	3,09	2,89
Palembang	2,90	2,64	1,41	1,24	1,24	1,32	2,14	3,28	2,92	2,92	3,10	2,74
Lubuk Linggau	2,36	2,16	1,11	1,02	1,02	1,28	2,07	3,26	2,87	2,87	2,95	3,18
Ogan Komering Ilir	4,56	2,27	1,72	1,48	1,48	2,91	3,13	3,86	2,90	2,90	2,74	2,68
Muara Enim	3,76	2,17	1,08	0,74	0,74	3,03	3,31	3,81	2,88	2,88	3,49	3,82

Indikator	2024				2025					2026	
	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Pertumbuhan Tahunan PDRB Sektoral (yoy)											
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35	5,34	5,20
Pertambangan dan Penggalian	3,29	2,58	2,39	2,59	5,15	2,17	7,79	7,24	5,60	3,58	4,24
Pertambangan dan Penggalian	0,97	3,52	4,71	3,33	3,98	5,93	0,61	3,97	3,47	-0,16	1,37
Industri Pengolahan	4,89	4,09	3,91	4,39	3,58	5,58	5,13	3,94	4,67	7,04	5,66
Pengadaan Listrik dan Gas	8,89	9,01	7,94	8,48	11,39	4,68	6,06	5,76	6,88	4,71	5,65
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,67	2,16	3,27	2,66	-0,06	1,27	1,98	1,39	1,15	4,25	2,84
Konstruksi	7,28	5,49	4,04	5,89	2,92	8,11	8,09	4,96	6,03	5,95	7,83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,71	7,33	7,88	7,42	8,36	8,78	8,58	8,48	8,47	9,85	8,71
Transportasi dan Pergudangan	3,80	3,90	3,27	3,44	6,65	4,85	6,03	2,70	5,03	4,01	1,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,57	9,34	9,05	9,39	8,71	10,29	11,58	8,07	9,66	12,32	8,07
Informasi dan Komunikasi	9,88	10,20	9,17	8,84	8,85	4,97	5,39	5,30	6,10	8,92	7,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,09	10,23	0,12	7,09	2,26	2,74	1,94	11,19	4,45	6,23	3,44
Real Estate	8,41	8,81	8,91	8,17	7,31	7,74	7,98	8,09	7,79	8,54	6,72
Jasa Perusahaan	5,07	5,41	6,23	5,18	4,96	6,50	6,36	6,57	6,11	7,65	6,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,95	8,62	8,83	9,35	10,84	-0,75	-0,02	4,47	3,40	6,59	5,42
Jasa Pendidikan	5,98	6,41	9,43	6,76	7,90	-0,02	4,86	4,58	4,28	9,87	9,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	4,29	13,62	7,34	5,66	5,96	5,74	5,81	5,79	6,86	7,12
Jasa lainnya	6,49	5,49	-0,05	4,12	3,90	4,11	4,72	3,69	4,11	3,67	5,77
Pertumbuhan Tahunan PDRB Penggunaan (yoy)											
Konsumsi Rumah Tangga	4,79	4,77	4,95	4,68	4,91	4,93	4,89	4,90	4,91	4,97	4,82
Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	17,99	16,32	7,42	15,53	1,21	4,99	5,13	3,79	3,77	3,12	4,76
Konsumsi Pemerintah	8,29	10,64	3,37	8,38	3,90	-3,98	3,65	3,15	1,01	13,38	13,20
Investasi	3,97	4,63	4,20	4,41	2,21	5,65	3,05	0,08	2,77	4,33	5,97
Ekspor Luar Negeri	-9,59	16,10	2,54	0,15	25,02	1,25	-2,49	-15,28	-0,56	-21,60	-3,80
Impor Luar Negeri	91,28	42,30	1,42	46,90	-49,97	-2,15	-7,65	-21,25	-5,62	-25,45	-3,49

B. Ekspor-Import

Ekspor Import	2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II
Nilai ekspor nonmigas (USD Juta)	1.665,19	1.343,19	1.529,60	1.413,44	5.951,43	1.117,32	1.376,36
Nilai impor nonmigas (USD Juta)	258,42	253,04	259,82	304,31	1.075,58	304,14	330,79
Volume ekspor nonmigas (juta kg)	14.646,53	11.362,63	14.356,43	14.032,43	54.398,02	7.553,03	9.000,07
Volume impor nonmigas (juta kg)	553,14	452,89	459,84	374,32	1.840,19	458,60	614,21

C. Perbankan

Indikator	2024			2025				2026	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Perbankan									
Total Aset (Rp Triliun)	147,13	156,39	156,50	156,50	155,83	157,09	165,26	166,22	167,35
DPK (Rp Triliun)	106,55	109,65	108,65	108,65	109,49	110,85	116,50	119,46	119,79
- Giro	19,4	21,6	17,3	17,3	19,2	19,3	20,5	25,7	23,5
- Tabungan	55,1	56,5	60,3	60,3	58,9	58,9	64,8	63,8	65,4
- Deposito	32,1	31,5	31,1	31,1	31,4	32,6	31,2	29,9	30,9
Jumlah Rekening DPK (Ribu)	13.256	13.289	13.508	13.508	13.556	13.546	14.319	13.808	14.200
- Giro	121	124	121	121	121	121	126	126	127
- Tabungan	13.049	13.080	13.301	13.301	13.350	13.340	14.113	13.603	13.995
- Deposito	86	86	85	85	85	85	81	79	78
Kredit Berdasarkan Penggunaan (Rp Triliun)	167,37	170,57	174,25	174,25	175,50	177,79	191,36	197,13	201,95
- Modal Kerja	67,11	69,05	72,27	68,85	69,84	71,36	69,70	74,19	74,53
- Investasi	48,31	47,87	48,70	50,09	50,16	50,42	60,77	61,08	64,75
- Konsumsi	51,95	53,65	54,95	55,31	55,49	56,00	60,89	61,85	62,67
Total Kredit (Rp Triliun)	167,37	170,57	175,92	174,25	175,50	177,79	191,36	197,13	201,95
Kredit Lapangan Usaha/Korporasi (RpTriliun)	115,42	116,93	118,94	118,94	120,01	121,78	130,48	135,27	139,28
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	29,22	28,34	28,36	28,36	28,33	28,34	29,51	29,23	29,00
Pertambangan dan Penggalian	11,04	13,18	12,76	12,76	12,73	12,93	12,46	13,09	14,57
Industri Pengolahan	34,04	34,41	35,78	35,78	36,95	38,44	47,80	52,21	54,63
Listrik, Gas dan Air Bersih	33,50	3,03	3,33	3,33	3,34	3,39	3,00	3,01	3,63
Konstruksi	58,24	5,57	5,50	5,50	5,39	5,37	5,20	4,96	4,94
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	21,98	21,94	21,99	21,99	22,07	21,98	21,32	21,56	21,30
Transportasi dan Pergudangan dan Komunikasi	2,21	2,21	2,33	2,33	2,38	2,12	2,93	2,83	2,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,09	2,13	2,14	2,14	2,12	2,47	2,14	2,17	2,17
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2,92	2,80	2,98	2,98	2,95	0,56	3,07	3,08	3,23
Jasa-jasa	2,74	2,86	2,90	2,90	2,89	3,00	2,63	2,73	2,99
Kredit Bukan Lapangan Usaha/Kredit Konsumsi (RpTriliun)	51,95	53,65	55,31	55,31	55,49	56,00	60,89	61,85	62,67
Rumah Tinggal	16,06	16,36	16,61	16,61	16,79	16,98	18,51	18,87	19,34
Flat dan Apartemen	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,16	0,16	0,16
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	0,42	0,41	0,40
Kendaraan Bermotor	3,81	4,04	4,13	4,13	4,14	4,20	3,96	4,00	3,98
Multiguna	18,58	18,94	19,38	19,38	19,35	19,47	20,88	20,36	20,48
Lainnya	31,50	13,74	14,61	14,61	14,64	14,77	16,95	18,06	18,31
LDR	157,8%	156,7%	153,5%	151,3%	154,1%	148,5%	164,3%	165,0%	168,6%
NPL Gross	2,59%	1,86%	1,86%	1,87%	1,89%	1,89%	1,87%	1,94%	1,85%

(sumber: Bank Indonesia)

D. Sistem Pembayaran

Keterangan	2024			2025				2026	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Jumlah hari	52	65	63	58	60	64	64	56	57
1. Perputaran Kliring									
a.Nominal (Rp Miliar)	7.825	8.442	9.265	6.979	6.890	7.828	8.576	6.685	6.685
b.Warkat (lembar)	145.396	162.078	164.598	131.082	126.327	148.910	170.884	109.469	111.501
2. Rata-rata Harian Kliring									
a.Nominal (Rp Miliar)	150,5	129,8	147,1	120,3	114,8	122,3	134,0	119,4	117,3
b.Jumlah Warkat (lembar)	2.796	2.494	2.613	2.260	2.105	2.327	2.670	1.955	1.956
3. Rata-rata Harian RTGS									
a.Nominal/Hari (Rp Miliar)	901,0	759,2	1.019,6	877	780	652	634	408	861
b.Jumlah Warkat (lembar)	299	264	307	264	13.982	16.726	19.005	14.358	15.338
4. Penolakan Cek/BG									
a.Nominal (Rp Miliar)	49,0	50,5	55,1	46,9	51,6	50,6	51,0	50,5	52
b.Warkat (lembar)	943	926	876	802	977	908	912	901	805
5. Penolakan Cek/BG									
a.Nominal (%)	0,63%	0,60%	0,59%	0,67%	0,75%	0,65%	0,59%	0,76%	0,78%
b.Warkat (%)	0,65%	0,57%	0,53%	0,61%	0,77%	0,61%	0,53%	0,82%	0,72%
6. Mutasi kas (Rp Miliar)									
Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)	445,2	99,6	57,8	61,8	198,5	1.667,3	570,5	552,3	649,1
a.Aliran uang masuk/inflow	4.374,2	2.368,1	1.729,2	2.901,3	4.200,8	2.157,8	1.224,5	4.430,1	2.905,7
b.Aliran uang keluar (outflow)	6.189,2	4.284,1	6.398,2	5.756,4	3.057,8	4.843,2	4.582,8	5.234,2	3.960,1
c.Net Inflow (outflow)	(1.815,0)	(1.916,0)	(4.669,0)	(2.855,1)	1.143,0	(2.685,4)	(3.358,3)	(804,1)	(1.054,4)

(sumber: Bank Indonesia)

Ringkasan Eksekutif

Agustus 2026



Perkembangan Ekonomi Daerah



Ekonomi Sumatera Selatan tetap tumbuh kuat pada triwulan II 2026 sebesar 5,20% (yoy) yang ditopang oleh akselerasi investasi dan perbaikan kinerja ekspor. Kinerja positif tersebut didorong oleh pembangunan berbagai infrastruktur logistik batu bara, pembangunan pabrik industri pengolahan, serta realisasi ekspor komoditas utama Sumatera Selatan yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan regional Sumatera dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tercatat sebesar 5,06% (yoy) namun lebih rendah dari Nasional yang tercatat sebesar 5,29% (yoy). Sementara itu, pangsa ekonomi Sumatera Selatan di ekonomi Sumatera pada triwulan laporan tercatat 13,64%.

Dari sisi pengeluaran, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan II 2026 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB atau investasi yang memberikan andil tertinggi. Sementara secara pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan berasal dari PMTB atau investasi dan ekspor luar negeri. Kinerja positif tersebut didorong oleh akselerasi pembangunan proyek pemerintah dan swasta di Sumatera Selatan dan perbaikan kinerja ekspor komoditas unggulan milik Sumatera Selatan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 bersumber dari komponen LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Konstruksi. Sementara LU Perdagangan, Industri Pengolahan, serta LU Konstruksi merupakan LU dengan andil pertumbuhan tertinggi sehingga menjadi faktor pendorong lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Perkembangan Inflasi Daerah



Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,89% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang sebesar 3,04% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan II 2026 didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak jenis RON 92 yang turut mendorong biaya transportasi dan biaya distribusi. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan pokok dan hortikultura, seperti bawang merah dan cabai merah. Tekanan inflasi pada triwulan III 2026 diperkirakan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan membaiknya pasokan komoditas hortikultura seiring berlangsungnya masa panen di sejumlah sentra produksi. Namun demikian, tekanan inflasi perlu diwaspadai seiring memasuki puncak musim kemarau pada Agustus–September dan menguatnya fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produktivitas serta pasokan pangan di Sumatera Selatan. Prospek inflasi IHK di tahun 2026 diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ dengan sinergi BI-TPID, digitalisasi, ketahanan pangan, dan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi konsumen di tengah dorongan konsumsi yang tetap kuat.

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Secara umum, kinerja stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tetap positif meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan I 2026. Terjaganya pertumbuhan penyaluran kredit serta aset perbankan mengindikasikan fungsi intermediasi yang tetap lancar, dengan turut disertai kualitas penyaluran yang relatif terjaga. Kinerja pertumbuhan aset perbankan Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,20% (yoy), disumbang oleh pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang meningkat sebesar 3,32% (yoy). Kinerja penyaluran kredit perbankan disumbang oleh kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 12,54 (yoy) diikuti oleh kredit investasi sebesar 21,09% (yoy) dan ditahan oleh kredit modal kerja yang kontraksi sebesar -3,64% (yoy). Di lain sisi, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 4,93% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar 7,15% (yoy). Pada periode laporan, kinerja DPK disumbang oleh pertumbuhan pada instrumen Giro (15,49% (yoy)) dan Tabungan (6,24%(yoy)) serta ditahan oleh instrumen deposito yang mengalami kontraksi (-4,22% (yoy)). Kredit UMKM triwulan II 2026 mencatatkan kinerja positif dicatatkan melalui penyaluran kredit yang tumbuh 0,91% (yoy), namun lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM skala kecil pada periode ini merupakan penyumbang pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan sebesar 3,22% (yoy). Di lain sisi, kredit UMKM mikro sebagai pangsa penyaluran terbesar terkontraksi sebesar -1,45% (yoy) menunjukkan tekanan daya beli masyarakat berdampak pada UMKM perintis. Namun demikian, secara umum kinerja kredit UMKM yang positif mencerminkan kondisi keuangan dan optimisme UMKM tetap terjaga.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal melalui instrumen tunai maupun nontunai terus mendukung aktivitas ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026. Dari sisi tunai, peredaran uang kartal di Sumatera Selatan mencatatkan *net outflow* sebesar Rp1,05 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp804 miliar. Peningkatan kebutuhan uang tunai tersebut sejalan dengan karakteristik ekonomi Sumatera Selatan yang masih ditopang oleh aktivitas perdagangan, komoditas, UMKM, serta transaksi pada wilayah dengan penggunaan uang tunai yang relatif dominan. Selain itu, peningkatan *net outflow* pada triwulan laporan turut dipengaruhi oleh penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Selatan.

Sementara itu, dari sisi nontunai, perkembangan transaksi pembayaran menunjukkan pola yang **semakin terdigitalisasi**. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) masih mengalami kontraksi secara tahunan, namun menunjukkan perbaikan signifikan dari sisi nominal. Nilai transaksi kliring tercatat sebesar Rp6,89 triliun atau terkontraksi 0,02% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 10,33% (yoy). Di tengah perbaikan tersebut, volume transaksi masih terkontraksi 11,74% (yoy) menjadi 111,50 ribu warkat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transaksi ritel melalui SKNBI masih menghadapi tekanan seiring semakin kuatnya pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha menuju instrumen pembayaran digital yang lebih cepat dan praktis, khususnya BI-FAST dan QRIS.

Akselerasi digitalisasi semakin terlihat pada penggunaan Uang Elektronik (UE) dan QRIS. Pada triwulan II 2026, nilai transaksi UE mencapai Rp3,98 triliun atau tumbuh 30,34% (yoy), sementara volumenya mencapai 39,34 juta transaksi atau tumbuh 26,02% (yoy). Sejalan dengan itu, nilai transaksi QRIS di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp8,45 triliun atau tumbuh 53,56% (yoy), dengan jumlah merchant QRIS mencapai 1,18 juta merchant atau meningkat sebesar 17,76% (yoy).

Secara keseluruhan, perkembangan sistem pembayaran pada triwulan II 2026 menunjukkan pergeseran pola transaksi menuju instrumen pembayaran digital yang semakin kuat, di tengah masih tingginya kebutuhan uang tunai pada segmen dan wilayah tertentu. Kondisi tersebut mencerminkan semakin beragamnya preferensi masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran sesuai kebutuhan, sekaligus membuka ruang bagi penguatan ekosistem pembayaran digital yang semakin inklusif di Sumatera Selatan.

Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah



Pada triwulan II 2026, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. TPAK di Sumatera Selatan pada Mei 2026 menunjukkan peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan pasar kerja. Di sisi lain, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan II 2026 menunjukkan pendapatan masyarakat saat ini lebih baik dibandingkan 6 bulan lalu dan tetap optimis akan meningkat ke depan. Peningkatan optimisme dan aktivitas ekonomi tersebut turut berdampak pada membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP).

Prospek Perekonomian Daerah



Di tengah dinamika kondisi geopolitik dan perekonomian global, ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat pada tahun 2026, didukung oleh inflasi yang terjaga pada rentang sasaran. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5-5,8% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan. Ke depan, inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan kembali berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$, mempertahankan capaian di tahun 2025. Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.





01

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh tetap kuat pada triwulan II 2026 dengan realisasi sebesar 5,20% (yoy), didukung oleh pembangunan berbagai infrastruktur logistik batu bara, pembangunan pabrik industri pengolahan, serta realisasi ekspor komoditas utama Sumatera Selatan yang lebih baik.

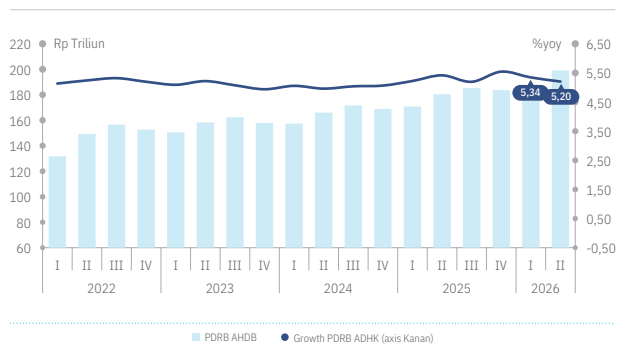
- Dari sisi pengeluaran, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan II 2026 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB atau investasi yang memberikan andil tertinggi. Sementara secara pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan berasal dari PMTB atau investasi dan ekspor luar negeri. Kinerja positif tersebut didorong oleh akselerasi pembangunan proyek pemerintah dan swasta di Sumatera Selatan dan perbaikan kinerja ekspor komoditas unggulan milik Sumatera Selatan.
- Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 bersumber dari komponen LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Konstruksi. Sementara LU Perdagangan, Industri Pengolahan, serta LU Konstruksi merupakan LU dengan andil pertumbuhan tertinggi sehingga menjadi faktor pendorong lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

1.1. Perkembangan Ekonomi Secara Umum

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,20% (yoy), tetap tumbuh kuat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,34% (yoy) (Grafik 1-1). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan antar triwulan pada triwulan II 2026 juga tercatat mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,51% (qtq), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,02% (qtq) (Grafik 1-2). Jika dibandingkan dengan regional Sumatera dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tercatat sebesar 5,06% (yoy) namun lebih rendah dari Nasional yang tercatat sebesar 5,29% (yoy). Sementara itu, pangsa ekonomi Sumatera Selatan di ekonomi Sumatera pada triwulan laporan tercatat 13,64%.

Tetap tingginya kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 utamanya didorong oleh kuatnya aktivitas investasi dan ekspor luar negeri. Kinerja investasi pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,97% (yoy), atau tumbuh akseleratif dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,33% (yoy). Peningkatan kinerja investasi pada triwulan II 2026 sejalan dengan realisasi investasi yang dilaksanakan pada triwulan II 2026, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Perbaikan kinerja PMA dan PMDN pada triwulan II 2026 seiring dengan dibangunnya berbagai pabrik industri pengolahan di Sumatera Selatan. Selain itu, pembangunan jalur logistik batu bara (*hauling road*, *fly over*, dan *under pass*) juga terus dilakukan percepatan. Selanjutnya, kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat berkontraksi sebesar 4,45% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 29,50% (yoy). Perbaikan kinerja ekspor pada triwulan II 2026 didorong oleh perbaikan kinerja ekspor komoditas batu bara seiring dengan adanya kebijakan pemberian relaksasi penggunaan jalan umum bagi perusahaan yang berkomitmen membangun jalan khusus batu bara.

Grafik 1.1. PDRB dan Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan LU Konstruksi. Perbaikan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian terjadi pada seluruh subsektor, diantaranya subsektor pertambangan batu bara dan lignit, subsektor pertambangan dan penggalian lainnya, dan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi.

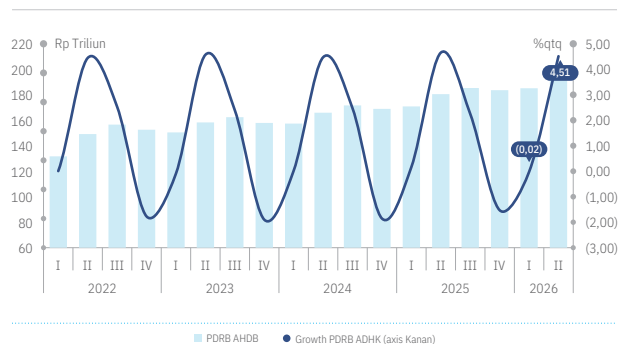
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan laporan juga tercatat tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 utamanya didorong oleh akselerasi pertumbuhan luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan.

Selanjutnya, kinerja LU Konstruksi juga mengalami penguatan. Akselerasi kinerja LU Konstruksi di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 utamanya didorong oleh pembangunan SPPG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilaksanakan secara masif, serta akselerasi pembangunan berbagai proyek swasta di Sumatera Selatan (*pabrik*, *hauling road*, *fly over*, dan *under pass*).

1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, struktur perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pangsa sebesar 60,14% terhadap total PDRB. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan konsumsi rumah tangga memberikan andil sebesar 2,83% (yoy) (Tabel 1-1). Perkembangan ini tercatat sedikit mengalami penurunan dibandingkan andil pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,95% (yoy). Selanjutnya, PMTB atau investasi pada triwulan II 2026 memberikan andil terbesar kedua yaitu sebesar 30,59% terhadap PDRB Sumatera Selatan dan memiliki andil

Grafik 1.2. PDRB dan Laju Pertumbuhan Triwulanan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 1.1. Andil Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2024-2026 (%yoy)

Komponen Pengeluaran	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,52	2,83	2,73	2,93	2,75	2,92	2,91	2,79	2,90	2,88	2,95	2,83
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,50	1,20	1,38	1,34	1,35	0,69	1,69	0,98	0,03	0,85	1,27	1,78
Ekspor Luar Negeri	(5,48)	(2,75)	4,11	3,92	0,04	5,86	(0,82)	(2,34)	(6,11)	(1,09)	(7,90)	(1,00)
Lainnya	6,52	3,68	(3,18)	(3,12)	0,89	(4,25)	1,68	3,77	8,72	2,71	1,12	1,59
P D R B	5,06	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35	5,34	5,20

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

pertumbuhan sebesar 1,78% (yoy). Sementara, kinerja ekspor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 18,93% dan memberikan andil pertumbuhan yang berkontraksi sebesar 1.00% (yoy).

1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah

Pada triwulan II 2026, konsumsi rumah tangga tercatat tetap tumbuh kuat. Hal ini tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,82% (yoy), atau tumbuh sedikit lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,97% (yoy) (Tabel 1-2). Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga secara triwulanan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,30% (qtq) pada triwulan laporan. Kondisi tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,66% (qtq). (Tabel 1-3). Adanya sedikit perlambatan pertumbuhan tahunan pada konsumsi rumah tangga

disebabkan oleh adanya normalisasi aktivitas masyarakat pasca periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri yang sepenuhnya terjadi pada triwulan I 2026. Namun demikian, konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Selatan yang cukup signifikan sebesar 7,1% dari tahun 2025. Kemudian, daya beli masyarakat juga ditopang oleh capaian NTP Sumatera Selatan yang mencapai 141,23 pada triwulan II 2025 atau tumbuh 8,24% (yoy).

Kinerja konsumsi rumah tangga yang tetap kuat terkonfirmasi dari hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut tercermin pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang terjaga berada di atas level optimis (>100) sebesar 121,64. Kondisi tersebut juga tercermin pada 2 (dua) indikator penyusun IKE, yakni indeks penghasilan saat ini dan indeks ketersediaan lapangan kerja yang masing-masing tercatat sebesar 123,78 dan 124,68 (Grafik 1-3).

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%yoy)

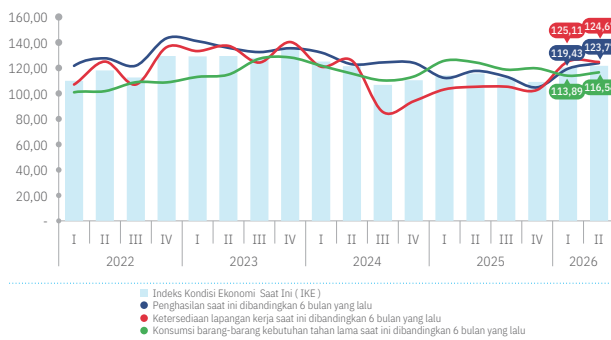
Komponen Pengeluaran	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,19	4,79	4,77	4,95	4,68	4,91	4,93	4,89	4,90	4,91	4,97	4,824
Pengeluaran Konsumsi LNPR	20,41	17,99	16,32	7,42	15,53	1,21	4,99	5,13	3,79	3,77	3,12	4,764
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,32	8,29	10,64	3,37	8,38	3,30	(5,91)	3,44	3,15	1,01	14,15	13,2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,82	3,97	4,63	4,20	4,41	2,21	5,66	3,29	0,08	2,77	4,20	5,966
Ekspor Luar Negeri	(18,72)	(9,59)	0,84	14,18	0,15	17,65	1,11	(2,23)	(15,28)	(0,56)	(21,63)	-3,8
Impor Luar Negeri	183,00	91,28	42,83	(18,54)	46,90	14,15	(2,74)	(7,10)	(21,25)	(5,62)	(25,49)	-3,49
PDRB	5,06	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35	5,34	5,20

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%qtq)

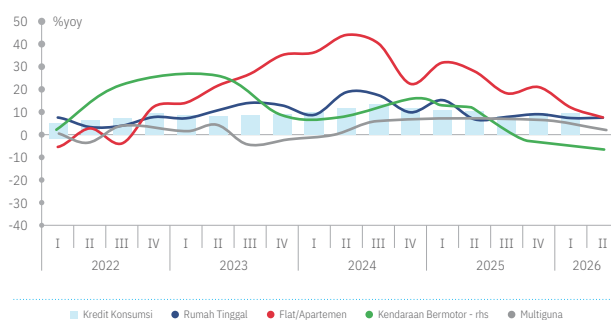
Komponen Pengeluaran	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,63	3,42	(0,92)	1,77	0,59	3,44	(0,96)	1,79	0,66	3,30
Pengeluaran Konsumsi LNPR	11,50	2,78	(7,46)	2,03	4,92	5,97	(7,34)	0,73	4,25	7,66
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(39,35)	32,73	(8,56)	42,62	(39,28)	18,82	0,36	42,22	(32,83)	18,87
Pembentukan Modal Tetap Bruto	(2,67)	0,12	2,17	4,66	(4,54)	3,50	(0,12)	1,41	(0,61)	5,13
Ekspor Luar Negeri	(15,72)	9,95	7,25	9,58	(5,54)	(8,92)	3,59	(5,04)	(12,56)	11,81
Impor Luar Negeri	14,85	(18,70)	(2,76)	36,90	(17,25)	(11,71)	(7,29)	16,05	(21,64)	14,41
PDRB	0,02	4,47	2,47	(1,85)	0,16	4,65	2,25	(1,53)	(0,02)	4,51

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 1.3. Indeks Konsumsi Saat Ini (IKE Survei Konsumen Bank Indonesia)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dari sisi kredit, terjadi sedikit perlambatan penyaluran tingkat kredit konsumsi pada triwulan II 2026. Kredit konsumsi pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 8,49% (yoy) atau sedikit lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,73% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi pada hampir seluruh komponen kredit konsumsi, diantaranya adalah kredit flat/apartemen; kredit kendaraan bermotor; dan kredit multiguna. Di sisi lain, kredit rumah tinggal menjadi satu-satunya komponen pada kredit konsumsi yang mampu tumbuh lebih baik pada triwulan II 2026. Kredit rumah tinggal tercatat tumbuh sebesar 10,06% (yoy) pada triwulan II 2026, setelah pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 9,92% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan akselerasi program 3 juta rumah yang terus dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik berupa pembangunan rumah baru maupun bedah rumah.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Kredit Multiguna dan Ruko/Rukan Sumatera Selatan

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan yang juga tetap kuat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026, kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 13,20% (yoy), tetap tumbuh kuat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 13,38% (yoy). Selanjutnya, kinerja konsumsi pemerintah secara triwulanan pada triwulan laporan juga tercatat tumbuh sebesar 18,87% (qtd), mengalami

perbaikan dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar 33,28% (qtd). Perkembangan ini sejalan dengan pola historisnya, dimana pertumbuhan pada triwulan II secara triwulanan tumbuh lebih baik dibanding triwulan sebelumnya.

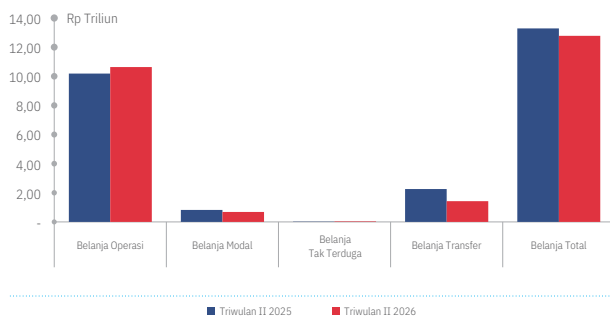
Secara umum, tetap kuatnya pertumbuhan secara tahunan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan utamanya didorong oleh percepatan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun komponen yang pada umumnya dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga di Sumatera Selatan tersebut tercatat sebesar Rp7,13 triliun atau meningkat sebesar 32,58% (yoy) dibandingkan triwulan II 2025 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp5,38 triliun. Jika ditinjau pada tiap komponen, peningkatan tertinggi terjadi pada belanja modal yang tumbuh hingga 402,85% (yoy) atau mencatatkan realisasi sebesar Rp948,68 miliar (41,68% dari pagu) sampai dengan Juni 2026. Capaian tersebut dipengaruhi oleh faktor adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Januari – Mei 2025 yang memberikan *low based effect* pada tahun 2026. Kemudian, akselerasi pertumbuhan juga terjadi pada belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai sampai dengan Juni 2026 tercatat sebesar Rp4,09 triliun (55,32% dari pagu) atau tumbuh 20,04% (yoy). Akselerasi kinerja belanja pegawai didorong oleh adanya penyesuaian gaji pokok ASN/TNI/POLRI, penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru, serta peningkatan realisasi nominal Gaji ke-13. Terakhir, pertumbuhan yang lebih baik juga terjadi komponen belanja barang yang mencatatkan realisasi sebesar Rp2,08 triliun (36,29% dari pagu). Kondisi tersebut tercatat tumbuh sebesar 18,01% (yoy) yang dipengaruhi oleh faktor percepatan realisasi program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, khususnya cetak sawah (Grafik 1-6). Selanjutnya, Bank Indonesia juga terus turut serta dalam mendukung percepatan realisasi belanja pemerintah melalui digitalisasi ekonomi keuangan di daerah pada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta perluasan *merchant* QRIS terutama UMKM. Percepatan realisasi belanja pemerintah di Sumatera Selatan juga didukung oleh belanja berbagai program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Selatan. Program tersebut di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, sekolah rakyat, dan program strategis lainnya.

Di sisi lain, komponen belanja APBN lainnya, yaitu belanja transfer ke daerah mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan II 2026. Realisasi belanja transfer ke daerah tercatat sebesar Rp11,87 triliun (51,55% dari pagu) atau mengalami kontraksi sebesar 18,33% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Penurunan terbesar terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang terkontraksi sebesar 64,71% (yoy) seiring dengan adanya pergeseran waktu

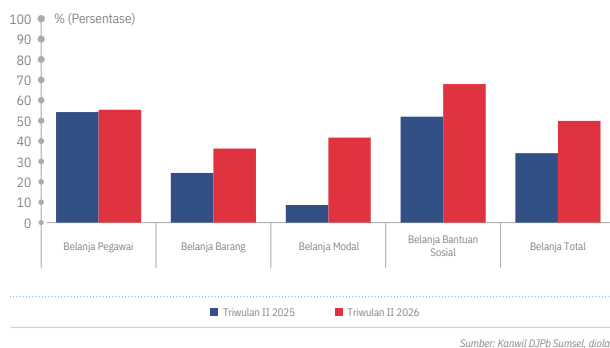
penyaluran DBH pada tahun 2026. Kemudian, penurunan belanja transfer ke daerah juga disebabkan oleh adanya penurunan realisasi belanja Dana Desa (DD). Penurunan realisasi belanja DD pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 65,30% (yoy) seiring dengan adanya penyesuaian arah kebijakan pemerintah pusat dan dukungan percepatan realisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Sumatera Selatan.

Dampak dari adanya pengurangan belanja transfer ke daerah juga berimbas pada tertahannya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan pada triwulan II 2026. Belanja APBD di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp12,74 triliun (32,46% dari pagu) atau terkontraksi sebesar 4,10% (yoy). Penurunan realisasi belanja utamanya terjadi belanja modal dan belanja transfer. Komponen belanja modal mencatatkan realisasi sebesar Rp4,62 triliun (14,82% dari pagu) atau terkontraksi sebesar 16,76% (yoy). Kemudian, komponen belanja transfer mencatatkan realisasi sebesar Rp6,47 triliun (21,97% dari pagu) atau terkontraksi sebesar 37,13% (yoy) (Grafik 1-5).

Grafik 1.5. Realisasi Belanja APBD Sumatera Selatan



Grafik 1.6. Realisasi Belanja APBN di Sumatera Selatan



1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)/Investasi

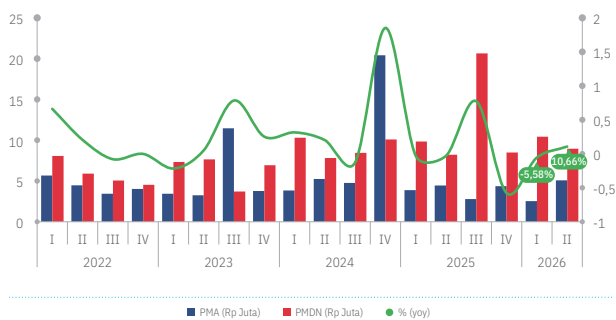
Kinerja investasi pada triwulan II 2026 tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja investasi pada

triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,97% (yoy), atau tumbuh akseleratif dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,33% (yoy). Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan pertumbuhan triwulanan, kinerja investasi tercatat tumbuh sebesar 5,13% (qto) sepanjang triwulan II 2026 atau berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,48% (qto). Jika ditinjau berdasarkan tren triwulanan, terdapat persamaan tren pertumbuhan PMTB pada tahun 2026 dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 dan 2025, terjadi perlambatan aktivitas investasi pada triwulan I. Selanjutnya, akselerasi pertumbuhan secara triwulanan akan terjadi pada triwulan II.

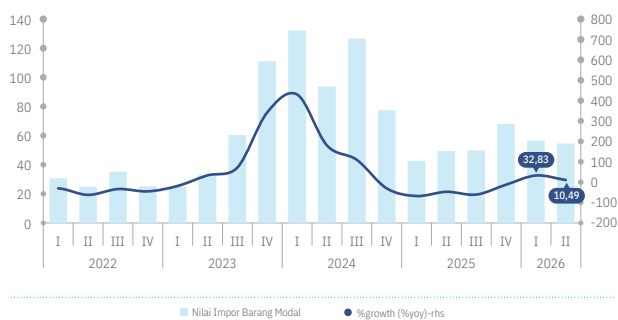
Peningkatan kinerja investasi pada triwulan II 2026 sejalan dengan realisasi investasi yang dilaksanakan pada triwulan II 2026, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Realisasi PMA di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp5,07 triliun atau tumbuh sebesar 13,93% (yoy). Sejalan dengan PMA, realisasi PMDN pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp8,95 triliun atau tumbuh sebesar 8,88% (yoy). Secara total, realisasi investasi di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp14,02 triliun atau tumbuh sebesar 10,66% (yoy). Kondisi tersebut tercatat meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan I 2026, dimana realisasi investasi tercatat terkontraksi sebesar 5,58% (yoy). Perbaikan kinerja PMA dan PMDN pada triwulan II 2026 sejalan dengan sedang dibangunnya berbagai pabrik industri pengolahan di Sumatera Selatan. Selain itu, pembangunan jalur logistik batu bara (*hauling road*, *fly over*, dan *under pass*) juga terus dilakukan percepatan. Terakhir, dukungan terhadap investasi di Sumatera Selatan juga berasal dari adanya pembangunan SPPG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilaksanakan secara masif pada triwulan II 2026.

Jika ditinjau berdasarkan sub komponennya, faktor pendorong kinerja investasi pada triwulan I 2026 utamanya berasal dari subkomponen investasi bangunan. Sub komponen investasi tersebut tercatat tumbuh sebesar 6,65% (yoy), atau tumbuh lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,79% (yoy).

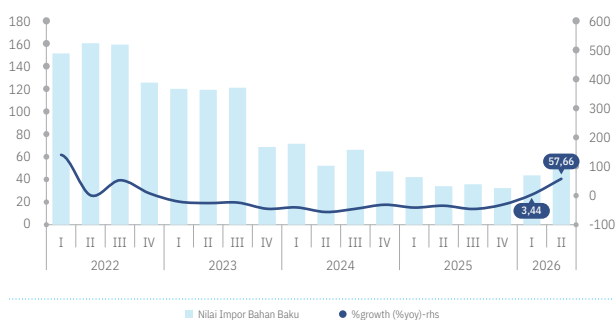
Selanjutnya, subsektor investasi non bangunan juga tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Subsektor investasi tersebut tercatat tumbuh sebesar 1,58% (yoy) pada triwulan II 2026 atau mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,51% (yoy). Hal tersebut tercermin dari realisasi impor bahan baku dan impor barang konsumsi yang seluruhnya berada pada tren peningkatan pada triwulan II 2026 (Grafik 1-9 dan Grafik 1-10).

Grafik 1.7. PMA - PMDN di Sumatera Selatan

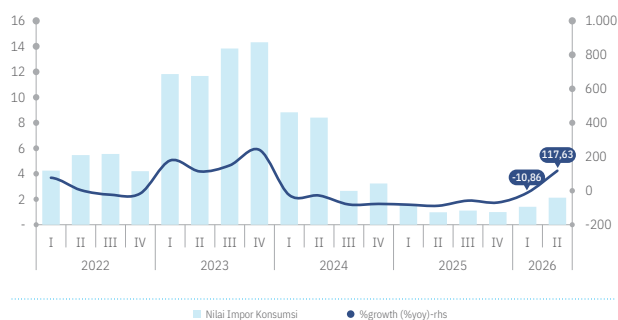
Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, diolah

Grafik 1.8. Nilai Impor Barang Modal Sumatera Selatan

Sumber: DJBC Kemenkeu, diolah

Grafik 1.9. Nilai Impor Bahan Baku Sumatera Selatan

Sumber: DJBC Kemenkeu, diolah

Grafik 1.10. Nilai Impor Barang Konsumsi Sumatera Selatan

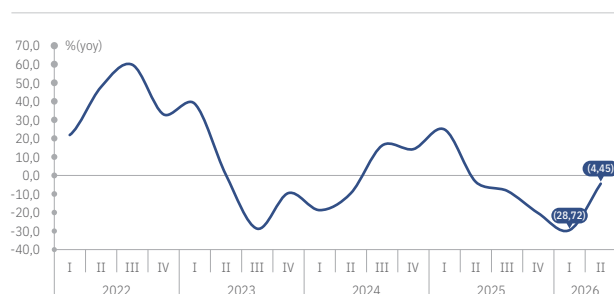
Sumber: DJBC Kemenkeu, diolah

1.2.3. Ekspor Luar Negeri

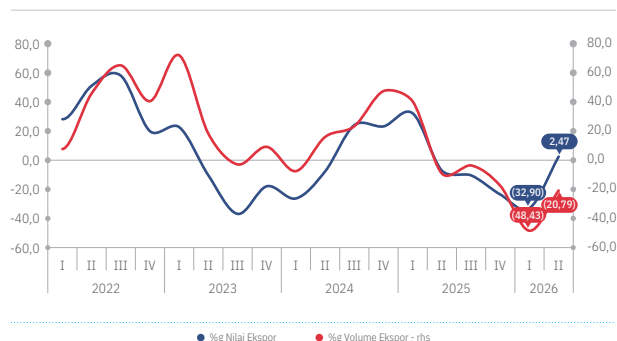
Kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat terkontraksi sebesar 4,45% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 29,50% (yoy) (Grafik 1-11). Perbaikan kinerja ekspor pada triwulan II 2026 didorong oleh perbaikan kinerja ekspor komoditas batu bara seiring dengan adanya kebijakan pemberian relaksasi penggunaan jalan umum bagi perusahaan yang berkomitmen membangun jalan khusus batu bara. Pemberian relaksasi penggunaan jalan umum diberikan setelah Gubernur Sumatera Selatan juga menerbitkan Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/2025 tentang Penggunaan Jalan Khusus Pertambangan Bagi Kendaraan Angkutan Batu Bara di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa mulai 1 Januari 2026 seluruh perusahaan batu bara dilarang menggunakan jalan umum.

Pada triwulan II 2026, setidaknya terdapat 12 perusahaan yang telah mempunyai komitmen untuk membangun jalan khusus batu bara dan diberikan relaksasi penggunaan jalan umum sementara. Kondisi yang terjadi pada ekspor Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 juga tercermin pada kinerja nilai dan volume ekspor yang juga turut mengalami perbaikan pertumbuhan yang dapat dilihat pada Grafik 1-13.

Perbaikan kinerja ekspor Sumatera Selatan juga didukung oleh harga yang mengalami perbaikan pada triwulan II 2026. Perbaikan harga terjadi pada komoditas batu bara, karet, CPO, dan minyak. Pada komoditas batu bara, harga mengalami kenaikan sebesar 30,20% (yoy) pada triwulan II 2026 atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,66% (yoy). Adapun harga batu bara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar USD135,43/MT. Selanjutnya, perbaikan harga juga terjadi pada komoditas karet yang mengalami perbaikan harga dari USD2,26/Kg pada triwulan I 2026 menjadi USD2,69/Kg pada triwulan II 2026, atau mengalami kenaikan sebesar 19,02%. Kemudian, harga CPO pada triwulan I 2026 juga mengalami perbaikan dengan catatan harga sebesar USD1.130,38/MT atau tumbuh sebesar 19,52% (yoy). Kondisi tersebut tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,64% (yoy) atau tercatat sebesar USD1.050,91/MT. Terakhir, perbaikan harga juga terjadi pada komoditas minyak yang tercatat meningkat sebesar 45,94% (yoy) pada triwulan II 2026 dengan realisasi harga sebesar USD93,21/bbl. Kondisi tersebut berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 0,29% (yoy) (Grafik 1-12).

Grafik 1.11. Perkembangan PDRB Komponen Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan

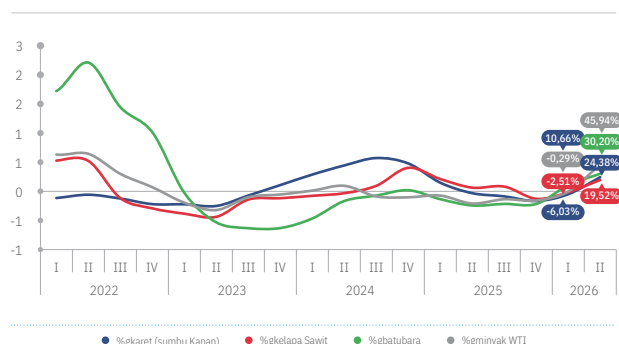
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan diolah

Grafik 1.13. Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Sumatera Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar USD1,37 miliar atau tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,47% (yoy). Kondisi tersebut mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 32,90% (yoy). Kontribusi ekspor terbesar pada triwulan II 2026 adalah komoditas batu bara yang mencapai USD511,00 juta (pangsa 37,13%), diikuti oleh komoditas karet yang mencapai USD355,56 juta (pangsa 25,83%), kemudian komoditas *pulp and paper* yang mencapai USD329,09 juta (pangsa 23,91%), dan komoditas kelapa sawit dengan nilai sebesar USD52,97 juta (pangsa 3,85%) (Grafik 1-19).

Berbeda dengan triwulan sebelumnya, pangsa ekspor komoditas terbesar di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 kembali bergeser dari karet menjadi batu bara. Pada triwulan laporan, dominasi karet pada ekspor Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 kembali digeser oleh batu bara pada triwulan II 2026. Nilai ekspor batu bara pada triwulan II 2026 tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan sebesar 0,73% (yoy), setelah pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 51,00% (yoy) (Grafik 1-15). Perbaikan kinerja ekspor didorong oleh perbaikan kendala jalur logistik batu bara di Sumatera Selatan. Selain itu, kondisi cuaca yang terjaga dengan baik sepanjang triwulan II 2026 turut mendorong percepatan realisasi produksi batu bara.

Grafik 1.12. Perkembangan Harga Komoditas Internasional

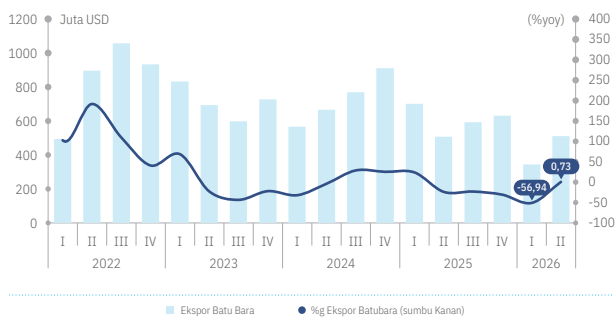
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.14. Perkembangan Volume Ekspor Impor Sumatera Selatan

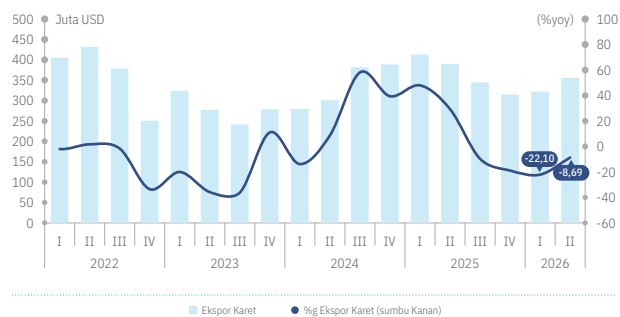
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Perbaikan kinerja komoditas juga terjadi pada komoditas karet pada triwulan II 2026. Kinerja komoditas karet pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi sebesar 8,69% (yoy). Kondisi tersebut tercatat mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 22,10% (yoy) (Grafik 1-16). Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh faktor perbaikan produksi setelah penyakit gugur daun pada karet dengan jenis crumb rubber, sir 10, dan sir 20 pada triwulan II 2026 dibandingkan dengan triwulan I 2026. Perbaikan produksi pada triwulan II 2026 juga didorong oleh adanya fenomena curah hujan rendah – menengah pada triwulan II 2026 yang dapat mendukung kemudahan proses panen dan pengangkutan.

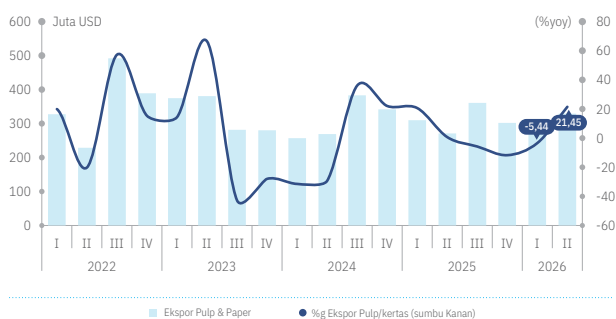
Selanjutnya, kinerja ekspor *pulp & paper* tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan pada triwulan II 2026. Kinerja ekspor *pulp & paper* pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 21,45% (yoy). Kondisi tersebut tercatat lebih baik dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar 3,40% (yoy). Kondisi tersebut utamanya didorong oleh perkembangan harga yang lebih baik dan permintaan eksternal yang lebih tinggi terhadap produksi *pulp & paper* Sumatera Selatan seiring dengan adanya pengurangan produksi *pulp & paper* dari Sumatera Utara akibat adanya keputusan penutupan perusahaan oleh pemerintah.

Grafik 1.15. Perkembangan Nilai Ekspor Batu Bara Sumatera Selatan

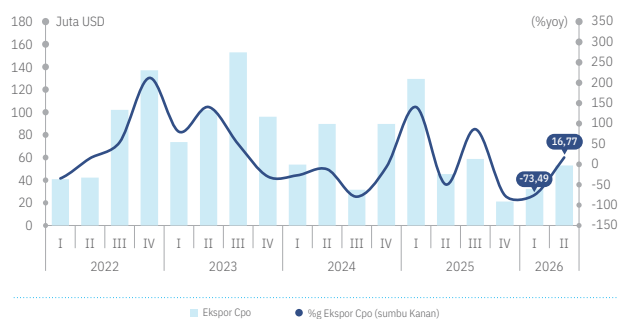
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.16. Perkembangan Nilai Ekspor Karet Sumatera Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

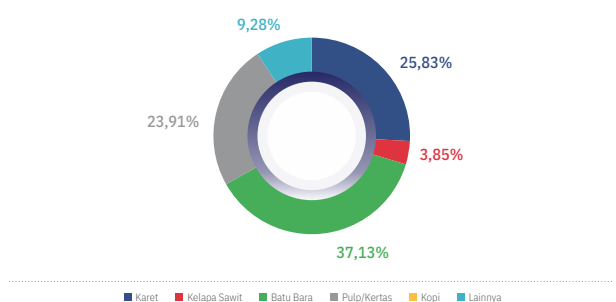
Grafik 1.17. Perkembangan Nilai Ekspor Pulp & Paper Sumatera Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.18. Perkembangan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Sumatera Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

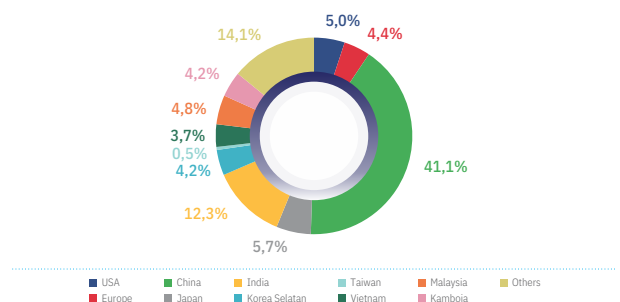
Kinerja ekspor kelapa sawit Sumatera Selatan juga tercatat kembali mengalami perbaikan pada triwulan II 2026. Kinerja ekspor kelapa sawit pada triwulan laporan tercatat tumbuh akseleratif sebesar 16,77% (yoy) atau mencatatkan realisasi sebesar USD52,97 juta. Kondisi tersebut berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 75,04% (yoy) (Grafik 1-18). Perbaikan kinerja ekspor kelapa sawit tersebut dipengaruhi oleh harga yang berada tren peningkatan, permintaan global yang tetap tinggi, dan penurunan produksi Malaysia mendorong peralihan permintaan ke Indonesia serta adanya faktor *based effect*.

Grafik 1.19. Pangsa Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan berdasarkan Nilai Ekspor

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

1.2.4. Impor Luar Negeri

Impor luar negeri Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Komponen impor luar negeri pada periode laporan tercatat mengalami ekspansi peningkatan sebesar 30,73% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 17,68% (yoy). Kenaikan permintaan akan komponen impor utamanya berasal dari peralatan industri (pangsa 25,55%).

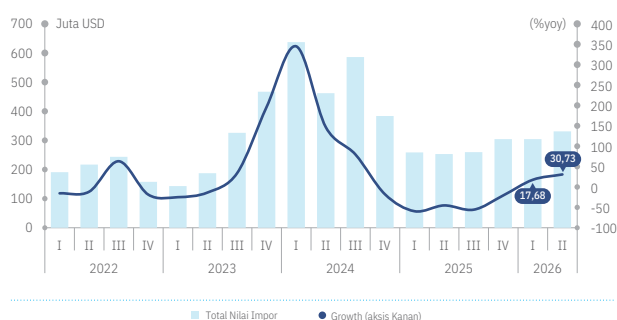
Grafik 1.20. Pangsa Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Nilai Ekspor

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Tabel 1.4. Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta US\$)

Nilai	2024				2025				2026		Pangsa (%)
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
Total Nilai Impor	637,2	461,8	586,1	383,6	258,4	253,0	259,8	304,3	304,1	330,8	100,00
Peralatan Elektrik	16,5	23,6	34,5	11,5	14,3	4,8	1,6	7,4	9,1	2,8	0,84
Besi dan Baja	24,5	7,6	14,2	8,8	2,3	7,4	3,1	5,1	2,2	8,8	2,65
Peralatan industri	157,6	110,1	118,7	74,9	48,9	27,6	39,0	86,9	87,2	84,5	25,55
Pupuk	14,8	14,0	33,8	25,2	27,3	25,3	41,3	28,1	41,8	50,2	15,17
Gandum	24,9	23,1	5,7	7,8	2,7	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	-
Peralatan Khusus Industri	122,7	108,8	210,0	122,6	74,0	80,3	77,7	92,6	64,3	69,2	20,92

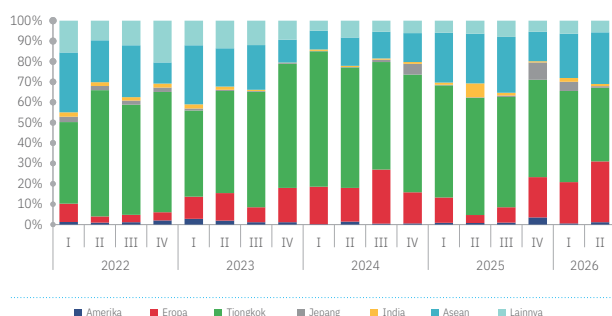
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.21. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Sumatera Selatan

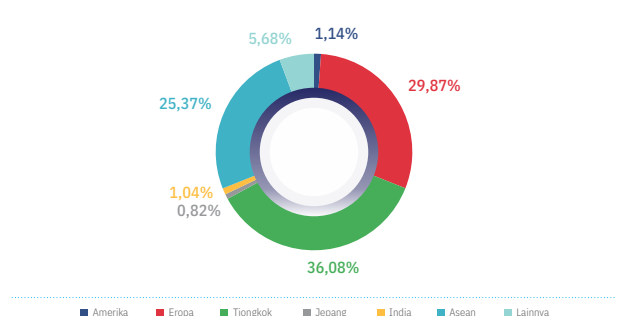
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.22. Perkembangan Volume Impor Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.23. Perkembangan Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.24. Pangsa Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Secara khusus, naiknya permintaan peralatan industri didorong oleh peningkatan dari berbagai proyek pembangunan pabrik dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang terus berlanjut hingga triwulan II 2026. Jika ditinjau berdasarkan negara asalnya, impor di triwulan II 2026 didominasi berasal dari Tiongkok dengan pangsa sebesar 36,08%, selanjutnya disusul oleh Uni Eropa (29,87), ASEAN (25,37%), Amerika Serikat (1,14%), India (1,04%), Jepang (0,82%), dan negara lainnya (5,68%) (Grafik 1-24).

Pertumbuhan impor berdasarkan kategorinya di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 ditopang oleh impor barang konsumsi dan impor barang baku. Impor barang

konsumsi pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 117,63% (yoy) atau mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 10,86% (yoy). Selanjutnya, perbaikan kinerja juga terjadi pada impor barang baku yang tercatat tumbuh sebesar 57,66% (yoy) pada triwulan laporan. Kondisi tersebut tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh terbatas sebesar 3,44% (yoy). Kemudian, catatan kinerja positif juga terjadi pada kelompok impor barang modal. Kelompok tersebut tercatat tumbuh sebesar 10,49% (yoy) pada triwulan II 2026, atau melambat dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 32,83% (yoy).

1.3. Perkembangan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 bersumber dari 5 (lima) lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Pertambangan dan Penggalian (pangsa 23,86%), LU Industri Pengolahan (pangsa 18,56%), LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 14,45%), LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (pangsa 13,79%), serta LU Konstruksi (pangsa 10,91%) (BPS Sumatera Selatan, 2026). Kinerja LU utama tersebut tercatat tetap tumbuh positif, sehingga menjadi penopang perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan laporan (Tabel 1-5). Secara kumulatif kelima LU tersebut memberikan kontribusi sebesar 81,57% terhadap struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan utamanya berasal dari peningkatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan LU Konstruksi. Adapun yang menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan adalah LU Industri Pengolahan serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan tercatat tumbuh menguat dibandingkan triwulan

sebelumnya. Perbaikan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian terjadi pada seluruh subsektor. Pertama, kinerja subsektor pertambangan batu bara dan lignit didorong oleh peningkatan tingkat produksi batu bara seiring dengan adanya relaksasi regulasi di tengah adanya dukungan perbaikan harga. Kedua, perbaikan kinerja juga terjadi pada subsektor pertambangan dan penggalian lainnya yang dipengaruhi oleh faktor peningkatan kebutuhan hasil galian C, khususnya pembangunan perumahan dan proyek strategis pemerintah di Sumatera Selatan. Terakhir, perbaikan pertumbuhan juga terjadi pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang didorong optimalisasi pencarian sumur minyak baru yang terus berlanjut dan upaya Development Drilling Program (DDP) yang terus ditingkatkan pada triwulan II 2026 untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan laporan tercatat tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 utamanya didorong oleh akselerasi pertumbuhan luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) terus memperkuat dukungan kebijakan peningkatan peningkatan produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan

Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan Tahunan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%yoy)

Sektor	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,05	3,38	2,66	2,39	2,59	5,15	2,17	7,85	7,24	5,60	3,58	4,24
Pertambangan dan Penggalian	4,19	0,94	3,51	4,71	3,33	3,98	5,93	0,52	3,97	3,47	-0,16	1,37
Industri Pengolahan	4,64	4,84	4,04	3,91	4,39	3,58	5,54	5,20	3,94	4,67	7,04	5,66
Pengadaan Listrik, Gas	8,07	8,89	9,01	7,94	8,48	11,39	4,68	6,04	5,76	6,88	4,71	5,65
Pengadaan Air	2,52	2,67	2,16	3,27	2,66	-0,06	1,27	1,98	1,39	1,15	4,25	2,84
Konstruksi	6,89	7,28	5,49	4,04	5,89	2,92	8,11	8,12	4,96	6,03	5,95	7,83
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,81	7,72	7,33	7,88	7,42	8,36	8,85	8,52	8,48	8,47	9,85	8,71
Transportasi dan Pergudangan	2,72	3,74	3,85	3,27	3,44	6,65	4,85	6,03	2,70	5,03	4,01	1,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,65	9,57	9,34	9,05	9,39	8,71	10,29	11,58	8,07	9,66	12,3	8,07
Informasi dan Komunikasi	6,12	9,88	10,20	9,17	8,84	8,85	4,97	5,39	5,30	6,10	8,92	7,51
Jasa Keuangan	10,17	8,08	10,23	0,12	7,09	2,26	2,74	1,94	11,19	4,45	6,23	3,44
Real Estate	6,51	8,41	8,81	8,91	8,17	7,31	7,74	7,98	8,09	7,79	8,54	6,72
Jasa Perusahaan	3,96	5,07	5,41	6,23	5,18	4,96	6,50	6,36	6,57	6,11	7,65	6,97
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,02	9,95	8,62	8,83	9,35	10,84	-0,75	-0,02	4,47	3,40	6,59	5,42
Jasa Pendidikan	4,94	5,98	6,41	9,43	6,76	7,90	-0,02	4,86	4,58	4,28	9,87	9,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,67	7,65	4,29	13,62	7,34	5,66	5,96	5,74	5,81	5,79	6,86	7,12
Jasa lainnya	4,92	6,49	5,49	-0,05	4,12	3,90	4,11	4,72	3,69	4,11	3,67	5,77
PDRB	5,06	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35	5,34	5,20

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan Triwulanan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%qtq)

Sektor	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,43	4,58	2,20	-12,54	12,36	1,73	7,83	-13,03	8,56	2,40
Pertambangan dan Penggalian	-5,64	8,01	8,30	-5,15	-6,26	10,04	2,84	-1,89	-10,15	11,82
Industri Pengolahan	0,67	1,48	0,51	1,36	0,35	3,22	0,13	0,14	3,68	1,63
Pengadaan Listrik, Gas	-2,87	6,91	3,28	0,64	0,23	0,48	4,62	0,39	-0,77	1,38
Pengadaan Air	-0,53	-0,88	1,01	2,86	-3,73	1,24	1,72	2,26	-1,01	-0,13
Konstruksi	0,16	0,35	0,64	2,97	-1,03	5,41	0,63	-0,04	-0,10	7,31
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,04	2,97	2,54	2,18	0,40	3,47	2,29	2,14	1,40	2,61
Transportasi dan Pergudangan	-3,08	5,75	-1,07	1,85	0,09	3,97	0,03	-1,34	1,37	1,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,32	7,93	0,05	5,54	-4,61	9,49	1,22	2,22	-0,86	5,35
Informasi dan Komunikasi	2,43	3,34	0,15	2,98	2,13	-0,34	0,55	2,89	5,64	-1,63
Jasa Keuangan	3,60	-0,18	4,78	-7,61	5,84	0,27	3,96	0,78	1,12	-2,37
Real Estate	2,11	1,92	1,29	3,32	0,61	2,32	1,52	3,42	1,03	0,61
Jasa Perusahaan	-1,02	1,19	2,29	3,69	-2,20	2,67	2,16	3,89	-1,21	2,02
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,94	22,78	-9,88	2,34	-2,11	9,94	-9,31	6,94	-0,02	8,72
Jasa Pendidikan	-6,93	6,86	0,05	9,98	-8,23	-0,98	4,93	9,68	-3,58	-1,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,17	3,76	0,16	9,52	-7,17	4,06	-0,05	9,59	-6,25	4,31
Jasa lainnya	-3,82	1,26	1,26	1,35	-0,02	1,46	1,86	0,35	-0,04	3,52
PDRB	0,02	4,47	2,47	-1,85	0,16	4,65	2,25	-1,53	-0,02	4,51

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

daerah. Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada periode pelaporan juga tercermin pada peningkatan daya beli petani yang tercermin pada Indeks Nilai Tukar Petani (NTP).

Selanjutnya, kinerja LU Konstruksi juga mengalami penguatan. Akselerasi kinerja LU Konstruksi di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 utamanya didorong oleh pembangunan SPPG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilaksanakan secara masif, serta akselerasi pembangunan berbagai proyek swasta di Sumatera Selatan (pabrik, *hauling road*, *flyover*, dan *under pass*).

1.3.1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II 2026 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,37% (yoy), berbalik arah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2026 yang mengalami kontraksi sebesar 0,16% (yoy). Hal yang sama juga terjadi pada tingkat pertumbuhan triwulanan, dimana terjadi pertumbuhan sebesar 11,82% (qtq) pada triwulan II 2026 atau mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat berkontraksi sebesar 10,15% (qtq).

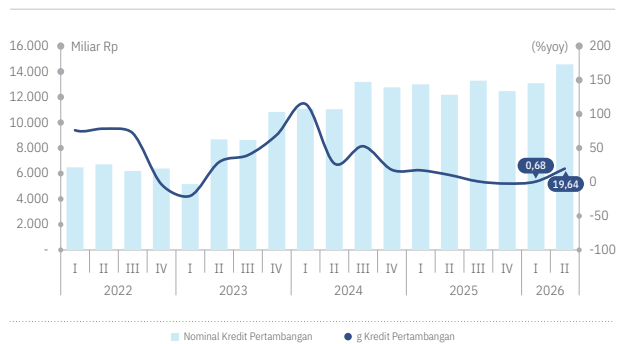
Perbaikan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II 2026 terjadi pada seluruh subsektor. Pertama, kinerja subsektor pertambangan batu bara dan lignit tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan dari berkontraksi sebesar 2,28% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi berkontraksi sebesar 1,17% (yoy) pada triwulan II 2026. Perbaikan kinerja subsektor pertambangan batu bara dan lignit didorong oleh peningkatan tingkat produksi batu bara seiring dengan adanya relaksasi regulasi di tengah adanya perbaikan harga. Kedua, perbaikan kinerja juga terjadi pada subsektor pertambangan dan penggalian lainnya yang tumbuh sebesar 5,37% (yoy) pada triwulan II 2026, atau mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 2,91% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor peningkatan kebutuhan hasil galian C, khususnya pembangunan perumahan dan proyek strategis pemerintah di Sumatera Selatan. Terakhir, perbaikan pertumbuhan juga terjadi pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi. Capaian subsektor tersebut tercatat tumbuh sebesar 2,87% (yoy) pada triwulan II 2026, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,58% (yoy). Kondisi tersebut terjadi didorong optimalisasi pencarian sumur minyak baru yang terus berlanjut dan upaya Development Drilling Program (DDP) yang terus ditingkatkan pada triwulan II 2026 untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.

Selanjutnya, ekspor batu bara juga tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan pada triwulan II 2026. Pertumbuhan nilai ekspor batu bara Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 0,73% (yoy), atau mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 51,00% (yoy). Perbaikan kinerja ekspor didorong oleh perbaikan kendala jalur logistik batu bara di Sumatera Selatan. Selain itu, kondisi cuaca yang terjaga dengan baik sepanjang triwulan II 2026 turut mendorong percepatan realisasi produksi batu bara.

Perbaikan kinerja LU Pertambangan pada triwulan II 2026, didukung adanya peningkatan harga batu bara dan minyak mentah. Harga batu bara internasional pada triwulan laporan tercatat sebesar USD135,43/MT atau mengalami kenaikan dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat sebesar USD104,02/MT. Kondisi pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 30,20% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, perbaikan harga juga terjadi pada komoditas minyak yang tercatat tumbuh akseleratif sebesar 45,94% (yoy) pada triwulan II 2026 dengan realisasi harga sebesar USD93,21/bbl. Kondisi tersebut mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 0,29% (yoy).

Selanjutnya, perbaikan kinerja LU Pertambangan juga didukung oleh tingkat penyaluran kredit yang mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Kredit pertambangan pada triwulan laporan tercatat sebesar 14,57 triliun atau tumbuh akseleratif sebesar 19,64% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 0,68% (yoy).

Grafik 1.25. Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalan Sumatera Selatan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

1.3.2. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan II 2026, pertumbuhan LU Industri Pengolahan tercatat tetap tumbuh kuat. Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 5,66% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 7,04% (yoy). Kondisi

tersebut merupakan normalisasi pertumbuhan pasca LU Industri Pengolahan tumbuh akseleratif pada triwulan I 2026, dimana pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir pada LU Industri Pengolahan setelah sebelumnya mencapai pertumbuhan 7% pada tahun 2016. Sejalan dengan pertumbuhan secara tahunan, pertumbuhan triwulan LU Industri Pengolahan tercatat sebesar 1,63% (qtq), mengalami sedikit perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,68% (qtq).

Perlambatan kinerja tahunan LU Industri Pengolahan terutama disebabkan oleh Industri Non Migas, diantaranya Industri Makanan dan Minuman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, serta Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Adapun subsektor industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan sebesar 9,67% (yoy) pada triwulan II 2026, mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 11,69% (yoy). Selanjutnya, perlambatan kinerja pada SubLU Industri Pengolahan juga terjadi di Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional. SubLU tersebut tercatat tumbuh sebesar 4,45% (yoy) pada triwulan II 2026, atau mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 7,58% (yoy). Kemudian, perlambatan kinerja juga terjadi pada subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik. Subsektor tersebut tercatat tumbuh sebesar 2,77% (yoy) pada triwulan II 2026 atau tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,07% (yoy).

1.3.3. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada triwulan II 2026, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat tumbuh sebesar 4,24% (yoy), lebih baik dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 3,58% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan triwulan tercatat melambat menjadi sebesar 2,40% (qtq), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 8,56% (qtq).

Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 utamanya didorong oleh akselerasi pertumbuhan luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Luas lahan padi Sumatera Selatan tumbuh signifikan sebesar 8,36% (yoy) pada triwulan II 2026. Hal tersebut juga sejalan dengan tingkat produksi yang tumbuh kuat sebesar 8,57% (yoy) pada triwulan II 2026. Kondisi tersebut terjadi di tengah adanya pergeseran musim panen raya akibat adanya implementasi program swasembada dan adanya

bencana banjir pada beberapa daerah sentra pertanian pada triwulan I 2026. Selain itu, dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) terus memperkuat dukungan kebijakan peningkatan produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada periode pelaporan juga tercermin pada peningkatan daya beli petani yang tercermin pada Indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Indeks NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 141,23 meningkat signifikan dibandingkan indeks pada triwulan sebelumnya sebesar 130,47. Perbaikan NTP tersebut utamanya bersumber dari adanya penguatan penerimaan pendapatan yang diterima oleh para petani tanaman perkebunan rakyat. Kondisi tersebut tercermin pada indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) yang mengalami peningkatan dari 142,78 pada triwulan I 2026 menjadi 157,89 pada triwulan II 2026.

Namun demikian, kinerja ekonomi pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh kuat masih belum diikuti dengan percepatan penyaluran kredit pada sektor tersebut. Kredit pertanian pada triwulan II 2026 tercatat terkonsentrasi sebesar 1,23% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

2,49% (yoy). Namun demikian, risiko kredit pertanian yang dilihat dari NPL tetap berada dalam batas aman atau senilai 2,18%, berada di batas bawah (*threshold*) yang ditetapkan sebesar 5,00%.

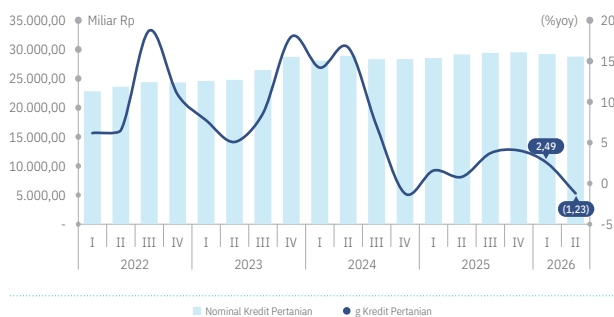
1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada triwulan II 2026, kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatatkan pertumbuhan yang tetap kuat. Secara tahunan, lapangan usaha ini tumbuh sebesar 8,71% (yoy), tumbuh tetap kuat namun sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,85% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan secara triwulanan mengalami pertumbuhan yang lebih baik yaitu sebesar 2,61% (qto), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 1,40% (qto).

Adanya sedikit perlambatan pertumbuhan tahunan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terutama disebabkan oleh pelemahan kinerja subsektor perdagangan besar dan eceran. Adapun subsektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 9,89% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,55% (yoy). Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit di sektor perdagangan yang tercatat terkonsentrasi sebesar 2,49% (yoy) pada triwulan II 2026. Kondisi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkonsentrasi sebesar 1,22% (yoy).

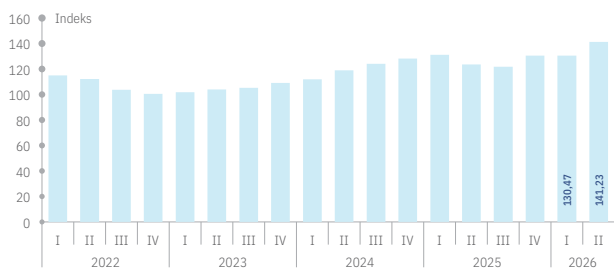
Di sisi lain, subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta perdagangan besar dan eceran tumbuh tetap kuat. Adapun subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,15% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkonsentrasi sebesar 0,10% (yoy). Subsektor ini memberikan kontribusi dominan terhadap keseluruhan kinerja lapangan usaha seiring dengan tingkat penjualan mobil yang juga turut mengalami percepatan pertumbuhan pada triwulan II 2026. Hal tersebut tercermin pada tingkat penjualan kendaraan bermotor pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 7,01% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 0,42% (yoy). Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran mengalami perbaikan dari -0,70% pada triwulan I 2026 menjadi sebesar 0,70% pada triwulan II 2026. Hal tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian kinerja pelaku usaha di subsektor perdagangan besar dan eceran.

Grafik 1.26. Penyaluran Kredit Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

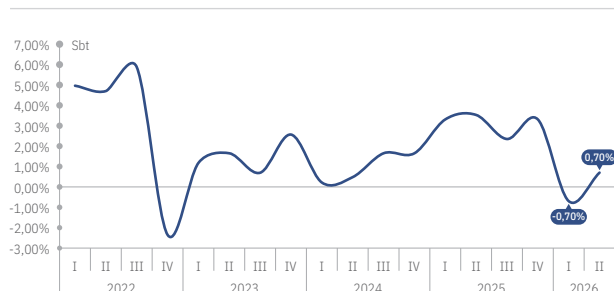


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

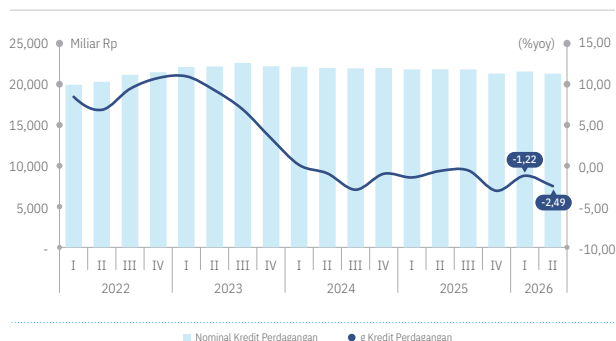
Grafik 1.27. Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.28. Kegiatan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran di Sumatera Selatan

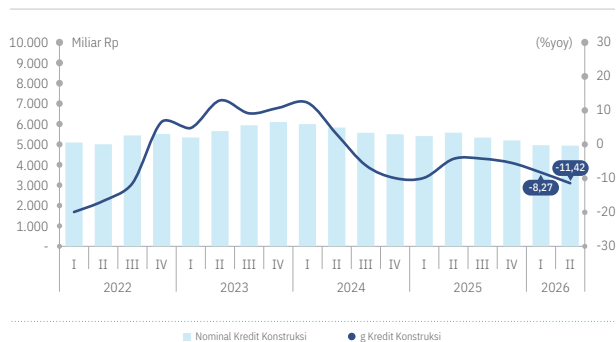
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.29. Penyaluran Kredit Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi

Pada triwulan II 2026, LU Kontruksi mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 7,83% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,95% (yoy). Dukungan pertumbuhan pada LU Konstruksi berasal dari adanya pembangunan SPPG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilaksanakan secara masif, serta akselerasi pembangunan

Grafik 1.30. Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi Sumatera Selatan

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

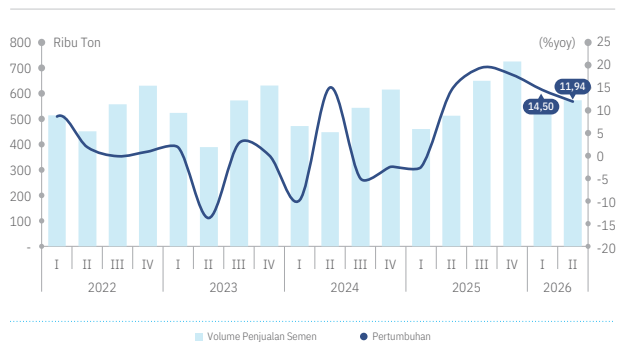
berbagai proyek swasta di Sumatera Selatan (pabrik, *hauling road*, *fly over*, dan *under pass*). Secara triwulanan, LU Konstruksi tercatat mengalami pertumbuhan yang lebih baik sebesar 7,31% (qtq), berbalik arah dibandingkan dengan yang terjadi pada triwulan sebelumnya masih mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10% (qtq).

Perbaikan kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2026 juga didukung oleh peningkatan komponen impor barang baku. Impor barang konstruksi pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 57,66% (yoy) pada triwulan laporan. Kondisi tersebut tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh terbatas sebesar 3,44% (yoy).

Namun demikian, kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2026 tertahan oleh tingkat kredit yang disalurkan pada sektor konstruksi di Sumatera Selatan. Pada triwulan II 2026, kredit yang disalurkan oleh perbankan pada LU konstruksi tercatat terkontraksi sebesar 11,42% (yoy). Kontraksi tersebut tercatat lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,27% (yoy) (Grafik 1-30).

Kinerja LU Konstruksi juga tertahan oleh realisasi penjualan semen di Sumatera Selatan yang mengalami perlambatan pada triwulan II 2026. Tingkat penjualan semen pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 11,94% (yoy), atau mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,50 (yoy) (Grafik 1-31).

Selanjutnya, kinerja sektor konstruksi juga tertahan oleh mundurnya target penyelesaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan menjadi lebih dari tahun 2026. Sejumlah pengerjaan PSN yang mendukung sektor pertanian dan penyelesaiannya mundur diantaranya yakni, Bendungan Tiga Dihaji, Jaringan Irigasi Lematang, dan Jaringan Irigasi Lempuing.

Grafik 1.31. Realisasi Penjualan Semen di Sumatera Selatan

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

BOKS 1 :

Launching Inovasi Sinergi Program Pengendalian Inflasi Daerah dan Asta Cita

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan Inovasi Sinergi Program Pengendalian Inflasi dan Asta Cita berupa Pengembangan Ekosistem Rantai Pasok Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan untuk Makan Bergizi Gratis (GSMP-MBG) yang dirangkaikan dengan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan di Lanud Sri Mulyono Herlambang. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan, serta menyukseskan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang dan dihadiri oleh Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Staf Khusus Kementerian Koperasi Ambar Pertiwinigrum, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto, unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sumatera Selatan, serta para pemangku kepentingan dari sektor pangan, koperasi, perbankan, dan dunia usaha.

Mengawali kegiatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono menyampaikan perkembangan terkini perekonomian dan

inflasi daerah. Di tengah perlambatan ekonomi global akibat meningkatnya risiko geopolitik, pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Sumatera Selatan tetap terjaga, didukung oleh konsumsi rumah tangga, kinerja industri pengolahan, pengembangan infrastruktur logistik, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah. Dari sisi stabilitas harga, inflasi Sumatera Selatan tetap terkendali dan konsisten berada di bawah tingkat inflasi nasional, meskipun terdapat dinamika komoditas penyumbang inflasi yang perlu terus diantisipasi. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan implementasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang secara konsisten didukung Bank Indonesia sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2021.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto menegaskan bahwa Ekosistem Rantai Pasok GSMP-MBG dirancang untuk membangun sistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Melalui ekosistem ini, hasil produksi petani, peternak, nelayan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMDes, dan UMKM akan terhubung secara berkelanjutan dengan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Dapur MBG. Skema tersebut didukung oleh sinergi kebijakan fiskal, percepatan belanja pemerintah, serta pembiayaan produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL), dan dukungan pembiayaan BUMN/BUMD dalam mekanisme *matching fund*. Model ini diharapkan mampu memperkuat sirkular ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Penyampaian Advisory TPID serta Penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2. Penanaman Tanaman Pangan Secara Simbolis oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan di Lahan Lanud SMB II

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang menyampaikan bahwa pembangunan sektor pangan di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang semakin positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan yang menempatkan Sumatera Selatan pada peringkat keempat nasional, membaiknya kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta menurunnya angka stunting dan kemiskinan. Namun demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, gangguan distribusi, fluktuasi harga pangan, serta masih adanya kelompok masyarakat rentan miskin dan rawan pangan memerlukan langkah-langkah kolaboratif yang berkelanjutan.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mentransformasikan GSMP menjadi Ekosistem Rantai Pasok Pangan Sumatera Selatan, yaitu model kolaborasi yang mengintegrasikan seluruh mata rantai pangan mulai dari produksi, agregasi, pengolahan, pembiayaan, hingga distribusi kepada penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan program, pada kesempatan tersebut juga dicanangkan Forum Kolaborasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta pesantren sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru.

Peluncuran Ekosistem Rantai Pasok GSMP-MBG oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan, menjadi simbol ajakan bersatu serta seruan gotong royong untuk membangun kedaulatan pangan. Selanjutnya turut dilakukan penandatanganan komitmen bersama pengembangan ekosistem dalam skema *government-to-government* (G2G) dan *business-to-business* (B2B), sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan produksi pangan.

Selain itu juga turut diserahkan bantuan sarana produksi pertanian berupa greenhouse kepada Pondok Pesantren Nurul Hidayah, revitalisasi *greenhouse* kepada Pondok

Pesantren Ittifaqiah, Pondok Pesantren Ma'had Darul Ulum, dan Pondok Pesantren Nurussalam Sidogede, serta bantuan sumur bor kepada Kelompok Tani Sri Rezeki di Kabupaten Banyuasin. Dukungan kepada pesantren ini dilakukan dalam rangka mendorong pesantren yang memiliki potensi menjadi sumber baru produksi pangan serta pertumbuhan ekonomi. Kegiatan kemudian ditutup dengan peninjauan lokasi tanam bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui peluncuran Ekosistem Rantai Pasok GSMP-MBG, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bank Indonesia, dan DJPb menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun sistem pangan daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha, mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, serta memperkuat kontribusi Sumatera Selatan dalam mewujudkan visi "Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua" dan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.





Perkembangan Inflasi Daerah



Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat menurun pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak jenis RON 92.

- Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,89% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang sebesar 3,04% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan II 2026 didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak jenis RON 92 yang turut mendorong biaya transportasi dan biaya distribusi. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan pokok dan hortikultura, seperti bawang merah dan cabai merah.
- Tekanan inflasi pada triwulan III 2026 diperkirakan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan membaiknya pasokan komoditas hortikultura seiring berlangsungnya masa panen di sejumlah sentra produksi. Namun demikian, tekanan inflasi perlu diwaspadai seiring memasuki puncak musim kemarau pada Agustus–September dan menguatnya fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produktivitas serta pasokan pangan di Sumatera Selatan.
- Prospek inflasi IHK di tahun 2026 diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ dengan sinergi BI-TPID, digitalisasi, ketahanan pangan, dan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi konsumen di tengah dorongan konsumsi yang tetap kuat.

2.1. Inflasi Secara Umum

Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,89% (yoy), menurun dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,09% (yoy). Inflasi Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,34% (yoy). Secara spasial, realisasi inflasi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 berada pada urutan kedua terendah di regional Sumatera. Terdapat 7 dari 10 provinsi di regional Sumatera mencatatkan inflasi yang berada di bawah sasaran inflasi nasional, yakni $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluarannya, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi motor utama inflasi dengan andil mencapai 1,13% (yoy), disusul oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan andil kontribusi sebesar 0,89% (yoy) (Tabel 2-1).

Tekanan inflasi Sumatera Selatan pada Triwulan II 2026 cenderung menurun sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat pasca momentum Ramadan dan Idulfitri, meskipun kembali meningkat pada akhir triwulan akibat kenaikan harga energi dan pangan. Tekanan inflasi didorong oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak jenis RON 92 yang turut meningkatkan biaya transportasi dan biaya distribusi.

Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut memberikan tekanan, melalui kenaikan harga bawang merah, cabai merah, tomat, dan beras. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tekanan permintaan telah kembali normal pasca HBKN, inflasi masih dipengaruhi oleh faktor biaya dan pasokan, khususnya pada komoditas pangan serta energi.

Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi pada triwulan II 2026, antara lain emas perhiasan, bensin, bawang merah, cabai merah, dan minyak goreng (Tabel 2-2). Peningkatan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh masih tingginya harga emas global di tengah ketidakpastian pasar keuangan internasional, yang mendorong peningkatan harga emas domestik. Sementara itu, kenaikan harga bensin turut memberikan tekanan inflasi sejalan dengan penyesuaian harga BBM non subsidi yang tercermin lebih kuat pada harga konsumen di akhir triwulan. Pada kelompok pangan, kenaikan harga bawang merah dan cabai merah terutama dipengaruhi oleh dinamika pasokan hortikultura yang bersifat musiman serta distribusi antar daerah, sehingga perubahan ketersediaan pasokan dengan cepat tercermin pada harga di tingkat konsumen. Adapun

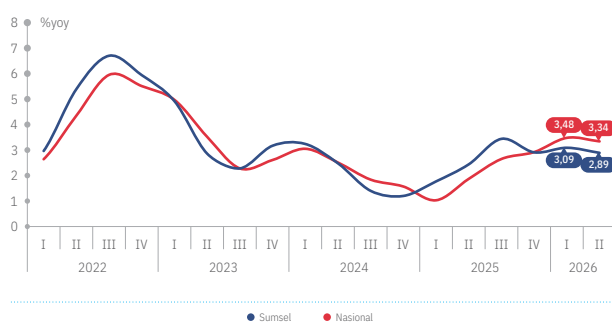
Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	I 2026	APR	MEI	JUN	I 2026	APR	MEI	JUN
UMUM	3,09	1,63	2,61	2,89	3,09	1,63	2,61	2,89
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,60	0,92	3,16	3,63	0,51	0,29	0,99	1,13
Pakaian dan Alas Kaki	-0,20	0,35	2,05	2,05	-0,01	0,02	0,10	0,1
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	6,35	0,35	0,68	0,81	0,83	0,05	0,09	0,11
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,14	0,41	0,93	1,09	0,01	0,02	0,05	0,06
Kesehatan	0,57	0,64	0,66	0,55	0,01	0,02	0,02	0,01
Transportasi	0,32	0,02	0,80	2,72	0,04	0,00	0,10	0,36
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,18	0,35	0,54	0,59	-0,01	0,02	0,03	0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,71	1,21	1,24	0,74	0,01	0,02	0,02	0,01
Pendidikan	0,98	0,98	0,98	1,02	0,05	0,05	0,05	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,17	1,47	1,33	1,58	0,10	0,12	0,12	0,13
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	19,24	12,37	12,65	10,68	1,55	1,02	1,04	0,89

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Tabel 2.2. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2026

Komoditas Inflasi	Andil (% yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (% yoy)
Emas Perhiasan	0,84	Tarif Kendaraan Roda Dua Online	0,03
Bensin	0,21		
Bawang Merah	0,15		
Cabai Merah	0,14		
Minyak Goreng	0,11		

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

peningkatan harga minyak goreng dipengaruhi oleh perkembangan harga bahan baku minyak nabati serta biaya produksi dan distribusi.

Inflasi lebih lanjut ditahan oleh deflasi komoditas Tarif Kendaraan Roda Dua *Online* (Tabel 2-2). Deflasi pada komoditas tarif kendaraan roda dua *online* terutama dipengaruhi oleh tarif yang relatif lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring normalisasi permintaan jasa transportasi daring pasca momentum Ramadan dan Idulfitri serta persaingan tarif antarpemodal layanan.

2.2. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran inflasi, tekanan pada triwulan laporan bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 10,68 % (yoy), disusul oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,63% (yoy), dan penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 1,58% (yoy) (Tabel 2-1). Adapun andil masing-masing kelompok tersebut terhadap inflasi sebesar 0,89% (yoy); 1,13% (yoy); dan 0,13% (yoy).

2.2.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

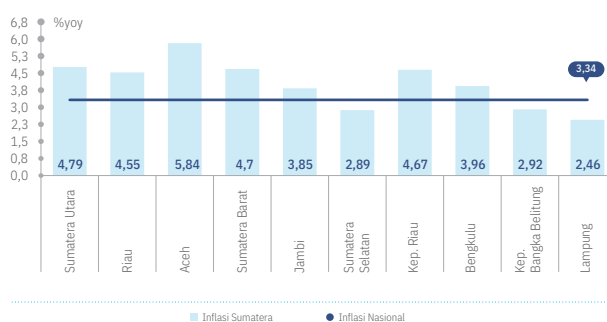
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan II 2026 mengalami inflasi sebesar 3,63% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,13% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,60% (yoy) dengan andil 0,51% (yoy).

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan (%yoy) tertinggi pada kelompok makanan, minuman,

Tabel 2.3. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	1,60	0,92	3,16	3,63	0,51	0,29	0,99	1,13

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Grafik 2.2. Inflasi Provinsi di Regional Sumatera periode Triwulan II 2026

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

dan tembakau, di antaranya bawang merah sebesar 0,15% (yoy); cabai merah sebesar 0,14% (yoy); minyak goreng sebesar 0,11% (yoy); jeruk sebesar 0,07% (yoy); dan beras sebesar 0,07% (yoy). Kenaikan harga bawang merah dan cabai merah terutama dipengaruhi oleh pasokan yang bersifat musiman, yang pemenuhannya melalui pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas hortikultura relatif sensitif terhadap perubahan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi antar daerah. Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng turut memberikan tekanan terhadap inflasi pangan, sejalan dengan kenaikan harga bahan baku minyak nabati dan biaya distribusi. Pada komoditas beras, kenaikan harga dipengaruhi oleh kenaikan harga gabah di pasar dan seiring dengan telah selesainya periode panen raya.

2.2.2. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Pada triwulan II 2026, kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami inflasi sebesar 2,05% (yoy) dengan andil sebesar 0,1% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,20% (yoy) dengan andil deflasi sebesar 0,01% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan normalisasi harga setelah berakhirnya periode promosi dan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat menjelang dan selama periode libur sekolah.

Sub kelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu sub kelompok pakaian sebesar 2,49% (yoy) dan sub kelompok alas kaki sebesar 0,43% (yoy). komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-to-y secara signifikan.

Tabel 2.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	-0,20	0,35	2,05	2,05	-0,01	0,02	0,10	0,1

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

2.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga mencatatkan inflasi pada triwulan II 2026. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 0,81% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,11% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 6,35 % (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,83% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada triwulan laporan, yaitu kontrak rumah sebesar 0,04% (yoy) dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04% (yoy). Peningkatan harga kontrak rumah terutama mencerminkan penyesuaian harga sewa hunian secara bertahap seiring perkembangan biaya pemeliharaan dan permintaan hunian. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar rumah tangga turut dipengaruhi oleh kenaikan harga LPG non subsidi. Di sisi lain, tidak terdapat komoditas yang memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap deflasi y-on-y. Perkembangan tersebut menyebabkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tetap mengalami inflasi, meskipun jauh lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026.

Tabel 2.5. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	6,35	0,35	0,68	0,81	0,83	0,05	0,09	0,11

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

2.2.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada triwulan II 2026 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,09% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,06% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,14% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh adanya penyesuaian harga pada berbagai perlengkapan dan peralatan rumah tangga seiring meningkatnya biaya produksi dan distribusi.

Tabel 2.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	0,14	0,41	0,93	1,09	0,01	0,02	0,05	0,06

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

2.2.5. Kelompok Kesehatan

Inflasi kelompok kesehatan pada triwulan II 2026 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi

pada triwulan laporan tercatat sebesar 0,55% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,01% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,57% (yoy) dengan andil 0,01% (yoy). Kelompok ini pada triwulan laporan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,01%, dan tidak ada komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi (yoy) secara signifikan. Melandainya inflasi kelompok kesehatan menunjukkan bahwa kenaikan harga pada berbagai komoditas dan jasa kesehatan berlangsung lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh terjaganya pasokan obat-obatan, vitamin, dan perlengkapan kesehatan di tengah kelancaran distribusi serta stabilnya harga bahan baku farmasi. Selain itu, tidak terdapat kebijakan penyesuaian tarif layanan kesehatan maupun kenaikan harga yang signifikan pada jasa kesehatan rawat jalan, jasa laboratorium, dan layanan kesehatan lainnya selama periode laporan.

Tabel 2.7. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	0,57	0,64	0,66	0,55	0,01	0,02	0,02	0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

2.2.6. Kelompok Transportasi

Pada periode triwulan II 2026, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 2,72% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,36% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,32% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,04% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada triwulan laporan ialah bensin sebesar 0,21% (yoy); pelumas/oli mesin sebesar 0,04% (yoy); solar dan angkutan antarkota masing-masing sebesar 0,03% (yoy); sepeda motor dan angkutan udara masing-masing sebesar 0,02% (yoy); serta pemeliharaan/service sebesar 0,01% (yoy). Peningkatan harga bensin terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM non subsidi pada Juni 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, kenaikan harga pelumas/oli mesin turut dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku dan tekanan kurs. Kenaikan harga solar juga memberikan tekanan sejalan dengan penyesuaian harga energi, sementara kenaikan tarif angkutan antarkota dan angkutan udara dipengaruhi oleh kenaikan biaya operasional sejalan dengan kenaikan biaya bahan baku. Adapun kenaikan harga sepeda motor dan biaya pemeliharaan/service kendaraan

Tabel 2.8. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	0,32	0,02	0,80	2,72	0,04	0,00	0,10	0,36

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

turut mencerminkan penyesuaian harga barang dan jasa transportasi sejalan dengan **meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan**.

2.2.7. Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 mencatatkan inflasi sebesar 0,59% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,03% (yoy), meningkat dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,18% (yoy) dengan andil deflasi sebesar 0,01% (yoy). Dari 4 sub kelompok pada kelompok ini, 2 sub kelompok mengalami inflasi y-on-y dan 2 subkelompok tidak mengalami perubahan. Sub kelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu sub kelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 2,21%. Sementara sub kelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu sub kelompok layanan informasi dan komunikasi serta sub kelompok asuransi. Kelompok ini pada Juni 2026 memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi (yoy) sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (yoy), yaitu telepon seluler sebesar 0,02%.

Inflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada Triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga peralatan informasi dan komunikasi, khususnya telepon seluler. Kondisi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian harga perangkat komunikasi di tengah perkembangan produk teknologi yang semakin beragam dan perubahan harga komponen, kenaikan biaya produksi global, dan tekanan kurs. Peluncuran perangkat dengan spesifikasi dan fitur yang semakin tinggi turut memengaruhi struktur harga produk di pasar, sementara penyesuaian harga produk lama mengikuti perkembangan teknologi dan siklus produk (*product cycle*).

Di sisi lain, sub kelompok layanan informasi dan komunikasi serta asuransi relatif tidak mengalami perubahan harga, sehingga tidak memberikan tekanan berarti terhadap inflasi kelompok ini. Sebaliknya kelompok ini dari deflasi pada triwulan I menjadi inflasi pada triwulan II 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terutama berasal dari pergerakan harga perangkat komunikasi, sementara harga jasa relatif stabil.

Tabel 2.9. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	-0,18	0,35	0,54	0,59	-0,01	0,02	0,03	0,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

2.2.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Inflasi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 0,74% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,01%, menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,71% (yoy) dengan andil sebesar 0,01% (yoy).

Tabel 2.10. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	0,71	1,21	1,24	0,74	0,01	0,02	0,02	0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

2.2.9. Kelompok Pendidikan

Pada triwulan II 2026, tekanan inflasi pada kelompok pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar 1,02% (yoy) dengan andil sebesar 0,06% (yoy). meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,98% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,05% (yoy). Permintaan terhadap jasa bimbingan belajar dan taman kanak-kanak terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan sejak usia dini dan persaingan akademik yang semakin ketat membuat permintaan terhadap layanan bimbingan belajar dan TK berkualitas terus naik. Hal ini mendorong penyedia layanan untuk menaikkan tarif demi meningkatkan fasilitas, kualitas pengajar, dan metode pembelajaran yang lebih modern dan efektif.

Tabel 2.11. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	0,98	0,98	0,98	1,02	0,05	0,05	0,05	0,06

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

2.2.10. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 mencatatkan inflasi sebesar 1,58% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,13% (yoy) terpantau meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,17% (yoy) dengan andil yang relatif stabil sebesar 0,13% (yoy).

Tabel 2.12. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	1,17	1,47	1,33	1,58	0,10	0,12	0,12	0,13

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi tahunan (% yoy) pada kelompok ini, yaitu tekwan sebesar 0,03% (yoy) dan ayam goreng sebesar 0,02% (yoy), terutama dipengaruhi oleh meningkatnya biaya bahan baku makanan serta tetap kuatnya permintaan masyarakat terhadap makanan dan minuman siap saji. Tekwan/model sebagai salah satu makanan khas Sumatera Selatan turut memberikan tekanan harga seiring meningkatnya biaya bahan baku dan produksi, termasuk ikan, tepung, serta bahan pelengkap lainnya. Sementara itu, kenaikan harga ayam goreng dan kue kering berminyak turut dipengaruhi oleh perkembangan harga bahan baku utama, khususnya daging ayam ras, minyak goreng, dan tepung terigu, yang meningkatkan biaya produksi dan mendorong penyesuaian harga jual. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas masyarakat dan mobilitas selama periode libur serta kecenderungan konsumsi makanan siap saji dan makan di luar rumah turut menjaga permintaan pada usaha penyediaan makanan dan minuman.

2.2.11. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan II 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 10,68% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,89% (yoy), menurun dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya sebesar 19,24% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,55% (yoy). Tekanan inflasi yang masih tinggi bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang menyumbang andil sebesar 0,84% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan, sejalan dengan masih tingginya harga emas global di tengah ketidakpastian pasar keuangan internasional. Kondisi tersebut mendorong peningkatan harga emas domestik dan selanjutnya tercermin pada harga emas perhiasan di tingkat konsumen. Selain sebagai instrumen investasi dan diversifikasi aset, emas perhiasan tetap memiliki nilai budaya yang kuat di Sumatera Selatan, khususnya sebagai bagian dari tradisi pernikahan, pemberian hadiah, dan simbol status sosial, sehingga permintaannya relatif tetap terjaga. Di sisi lain, tingginya harga emas turut meningkatkan nilai emas sebagai aset lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk tetap mempertahankan minat terhadap emas sebagai alternatif penyimpanan kekayaan, meskipun harga telah berada pada level yang relatif tinggi.

Tabel 2.13. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Mar	Apr	Mei	Jun
Inflasi Kelompok	19,24	12,37	12,65	10,68	1,55	1,02	1,04	0,89

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

2.3. Perkembangan Inflasi Bulanan dan *Tracking* Inflasi Triwulan III 2026

Gambar 2.1. Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Deflasi pada April 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan april mencatatkan deflasi sebesar -0,04% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,29% (mtm). Deflasi di Sumatera Selatan pada April 2026 dipengaruhi oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Adapun komoditas utama penyumbang deflasi (andil mtm) pada bulan laporan, antara lain emas perhiasan sebesar 0,14% (mtm); daging ayam ras sebesar 0,14% (mtm); telur ayam ras sebesar 0,06% (mtm); cabai rawit sebesar 0,04% (mtm); dan angkutan antar kota sebesar 0,04% (mtm).

Penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan pergerakan harga emas global, antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga energi yang meningkatkan ekspektasi inflasi global, sehingga mendorong berlanjutnya kebijakan suku bunga bank sentral AS yang tinggi. Sementara itu, penurunan harga komoditas pangan juga disebabkan oleh menurunnya permintaan masyarakat pada periode pasca Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, seiring dengan terjaganya ketersediaan pasokan dan lancarnya distribusi komoditas pangan. Secara tahunan, inflasi IHK April 2026 tercatat sebesar 1,63% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 3,09% (yoy) dan di bawah rerata 3 tahun terakhir sebesar 3,15% (yoy).

Gambar 2.2. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada April 2026

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Inflasi pada Mei 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei mencatatkan inflasi sebesar 0,61% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,04% (mtm). Tekanan inflasi pada bulan Mei didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,39% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,44% (mtm). Adapun komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) pada bulan laporan antara lain cabai merah sebesar 0,18% (mtm); bawang merah sebesar 0,10% (mtm); tomat sebesar 0,06% (mtm); cabai rawit sebesar 0,04% (mtm); dan ketimun sebesar 0,04% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Mei 2026 tercatat sebesar 2,61% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 1,63% (yoy) dan di bawah rerata 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 2,90% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) antara lain; cabai merah sebesar 0,18% (mtm); bawang merah sebesar 0,10% (mtm); dan tomat sebesar 0,06% (mtm). Kenaikan harga seluruh komoditas hortikultura tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan didorong penurunan produksi seiring dengan kondisi cuaca ekstrem, serta berakhirnya musim panen.

Gambar 2.3. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Mei 2026

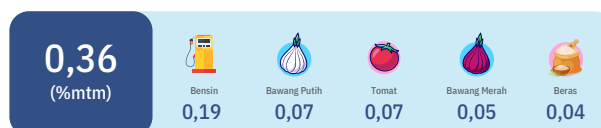
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Inflasi yang lebih dalam pada bulan Juni 2026 ditahan oleh deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat deflasi sebesar 0,61% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,06% (mtm). Komoditas yang memberikan andil deflasi bulanan yaitu emas perhiasan sebesar 0,14% (mtm), sejalan dengan pergerakan harga emas global.

Inflasi pada bulan Juni 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juni mencatatkan inflasi sebesar 0,36% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm). Tekanan Inflasi di Sumatera Selatan pada Juni

2026 dipengaruhi oleh Kelompok Transportasi sebesar 1,92% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,24% (mtm). Adapun komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) pada bulan laporan antara lain bensin sebesar 0,19% (mtm); bawang putih sebesar 0,07% (mtm); tomat sebesar 0,07% (mtm); bawang merah sebesar 0,05% (mtm); dan beras sebesar 0,04% (mtm). Kenaikan harga komoditas hortikultura didorong oleh berkurangnya pasokan akibat penurunan produksi sebagai dampak fenomena El Niño yang ditandai dengan berkurangnya intensitas curah hujan. Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2026 tercatat sebesar 2,89% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 2,61% (yoy) dan di bawah rerata 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 3,44% (yoy).

Gambar 2.4. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Juni 2026

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Inflasi yang lebih dalam pada bulan Juni 2026 ditahan oleh deflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,85% (mtm) dengan andil sebesar 0,07% (mtm). Komoditas yang memberikan andil deflasi bulanan, yaitu emas perhiasan sebesar 0,08% (mtm). Harga emas perhiasan mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan harga emas global yang dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi lebih tingginya suku bunga *Federal Funds Rate* (FFR) serta meredanya tensi geopolitik global.

Deflasi pada Juli 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juli mencatatkan deflasi sebesar 0,24% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,36% (mtm). Tekanan deflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat sebesar 0,96% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,29% (mtm). Adapun komoditas utama penyumbang deflasi (andil mtm) pada bulan Juli antara lain bawang merah sebesar 0,17% (mtm); emas perhiasan sebesar 0,16% (mtm); cabai merah sebesar 0,08% (mtm); cabai rawit sebesar 0,03% (mtm); dan tomat sebesar 0,03% (mtm). Deflasi pada komoditas pangan tersebut utamanya didorong peningkatan pasokan seiring mulai berlangsungnya panen di sejumlah sentra produksi pada pertengahan hingga akhir Juli 2026.

Tekanan deflasi lebih lanjut pada bulan laporan ditahan oleh inflasi pada Kelompok Transportasi yang tercatat inflasi sebesar 0,79% (mtm) dengan andil sebesar 0,10% (mtm). Komoditas yang memberikan andil inflasi bulanan yaitu bensin sebesar

0,08% (mtm) dan pelumas/oli mesin sebesar 0,01%. Kenaikan harga bensin sejalan dengan penyesuaian harga bensin non subsidi, sementara itu kenaikan harga pelumas sejalan dengan kenaikan biaya produksi dan tekanan kurs. Secara tahunan, inflasi IHK Juli 2026 tercatat sebesar 2,50% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 2,89% (yoy) dan di atas rerata 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 2,42% (yoy).

Gambar 2.5. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Juli 2026



Inflasi Triwulan III 2026 Diperkirakan Menurun

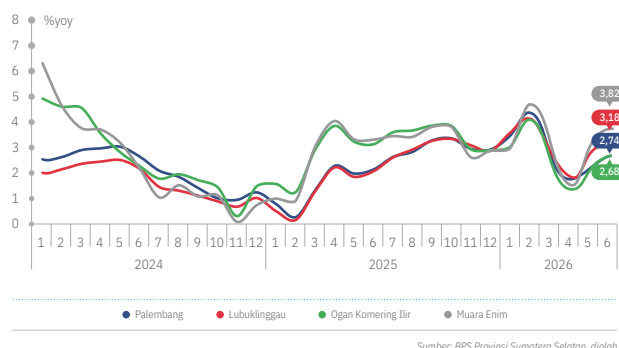
Penurunan tekanan inflasi pada Triwulan III 2026 diperkirakan didorong oleh membaiknya pasokan komoditas hortikultura seiring berlangsungnya masa panen di sejumlah sentra produksi, sebagaimana tercermin dari deflasi Juli 2026, yang terutama berasal dari bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Namun demikian, tekanan inflasi perlu diwaspadai seiring memasuki puncak musim kemarau pada Agustus–September dan menguatnya fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produktivitas serta pasokan pangan di Sumatera Selatan. Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia berpotensi meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan dan jasa transportasi.

2.4. Analisis Inflasi Spasial

Berdasarkan Grafik 2-3 di atas, tingkat inflasi tahunan seluruh kabupaten/kota menunjukkan pergerakan yang searah. Tekanan inflasi tercatat mengalami tren meningkat sejak April 2026

sampai dengan Juni 2026. Dari empat kab/kota sampel perhitungan IHK, 2 diantaranya mencatatkan inflasi tahunan yang di atas level inflasi provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 2,89% (yoy), yaitu Kota Lubuklinggau sebesar 3,18% (yoy) dan Kabupaten Muara Enim sebesar 3,82% (yoy).

Grafik 2.3. Perkembangan Inflasi Kota Sampel Perhitungan Inflasi



2.4.1. Kota Palembang

Pada triwulan II 2026, inflasi Kota Palembang tercatat sebesar 2,74% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,10% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil tertinggi sebesar 1,04% (yoy). Kelompok Perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil tertinggi kedua terhadap inflasi kota Palembang dengan andil sebesar 0,84% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,42% (yoy). Disisi lain, Transportasi juga tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi ketiga terhadap inflasi Kota Palembang, yang mencatatkan inflasi sebesar 2,05% (yoy) dengan andil 0,29% (yoy), naik signifikan dibandingkan triwulan I yang sebesar 0,43% (yoy) dengan andil 0,06% (yoy).

Tabel 2.14. Inflasi Kota Palembang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2026 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	I 2026	Apr	Mei	Jun	I 2026	Apr	Mei	Jun
UMUM	3,10	1,71	2,53	2,74	3,10	1,71	2,53	2,74
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,34	1,65	3,62	3,94	0,63	0,43	0,95	1,04
Pakaian dan Alas Kaki	0,79	1,22	2,17	2,21	0,04	0,05	0,11	0,11
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	5,04	0,16	0,62	0,76	0,77	0,03	0,10	0,12
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,06	0,29	0,86	0,93	0,00	0,02	0,05	0,06
Kesehatan	0,53	0,68	0,72	0,61	0,01	0,02	0,02	0,02
Transportasi	0,43	-0,02	0,58	2,05	0,06	0,00	0,08	0,29
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,26	0,35	0,69	0,69	-0,01	0,02	0,04	0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,54	1,02	0,91	1,08	0,01	0,02	0,02	0,02
Pendidikan	0,96	0,96	0,96	1,01	0,06	0,06	0,06	0,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,32	1,80	1,37	1,61	0,11	0,15	0,11	0,13
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	17,57	10,95	11,96	10,17	1,42	0,91	0,99	0,84

Sumber: BPS Kota Palembang (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 2.15. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi
Triwulan II 2026 Kota Palembang**

Komoditas Inflasi	Andil (%, yoy)
Bensin	0,19
Bawang Putih	0,07
Bawang Merah	0,05
Beras	0,04
Tomat	0,03

Komoditas Deflasi	Andil (%, yoy)
Cabai Merah	-0,11
Emas Perhiasan	-0,08
Daging Ayam Ras	-0,07
Telur Ayam Ras	-0,02
ikan Dencis	-0,02

Sumber: BPS Kota Palembang (SBH 2022=100), diolah

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi di Kota Palembang pada triwulan laporan adalah bensin sebesar 0,19% (mtm); bawang putih sebesar 0,07% (mtm); bawang merah sebesar 0,05% (mtm); beras sebesar 0,04% (mtm); dan tomat sebesar 0,03% (mtm). Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi ditahan oleh lima komoditas utama penyumbang deflasi bulanan, diantaranya cabai merah sebesar 0,11% (mtm); emas perhiasan sebesar 0,08% (mtm); daging ayam ras sebesar 0,07% (mtm); telur ayam ras, dan ikan dencis sebesar 0,02% (mtm).

2.4.2. Kota Lubuklinggau

Pada triwulan II 2026, inflasi Kota Lubuklinggau tercatat sebesar 3,18% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,95% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatat inflasi sebesar 2,65% (yoy) dengan andil 0,82% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I yang sebesar 0,26% (yoy) dengan andil 0,08% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan

pada kelompok ini antara lain ikan dencis (0,15%), Sigaret Kretek Mesin (SKM) (0,08%), daging ayam ras (0,08%), labu siam dan Sigaret Kretek Tangan (0,06%), minyak goreng (0,04%). Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang andil tertinggi kedua dengan inflasi sebesar 9,16% (yoy) dan andil 0,75% (yoy), menurun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 16,16% (yoy) dengan andil 1,29% (yoy). Selanjutnya, Kelompok Transportasi memberikan andil tertinggi ketiga terhadap inflasi Kota Lubuklinggau, dengan inflasi sebesar 4,82% (yoy) dan andil 0,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,51% (yoy) dengan andil 0,06% (yoy).

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi bulanan di Kota Lubuklinggau pada triwulan laporan adalah bensin (0,12%), angkutan udara (0,09%), angkutan antar kota (0,05%), pelumas/oli mesin (0,04%), dan tomat (0,03%). Sementara itu, lima komoditas utama penyumbang deflasi bulanan adalah emas perhiasan (0,05%), telur ayam ras (0,04%), cabai merah (0,02%), dan daging sapi (0,01%).

Tabel 2.16. Inflasi Kota Lubuklinggau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2026 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	I 2026	Apr	Mei	Jun	I 2026	Apr	Mei	Jun
UMUM	2,95	1,79	2,85	3,18	2,95	1,79	2,85	3,18
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,26	-0,28	2,31	2,65	0,08	-0,09	0,72	0,82
Pakaian dan Alas Kaki	1,96	1,96	1,86	1,99	0,11	0,11	0,10	0,11
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	7,50	0,37	0,99	1,05	1,03	0,05	0,14	0,15
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,01	2,97	2,68	1,05	0,08	0,22	0,20	0,24
Kesehatan	1,45	1,41	1,03	0,69	0,04	0,04	0,03	0,02
Transportasi	0,51	1,80	2,56	4,82	0,06	0,21	0,30	0,57
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,20	1,72	2,77	3,09	-0,01	0,07	0,12	0,13
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,34	5,06	7,13	6,26	0,05	0,11	0,15	0,14
Pendidikan	1,51	1,51	1,56	1,59	0,08	0,08	0,08	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,87	1,61	2,27	2,29	0,14	0,12	0,17	0,17
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	16,16	10,66	10,27	9,16	1,29	0,87	0,84	0,75

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 2.17. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi
Triwulan II 2026 Kota Lubuklinggau**

Komoditas Inflasi	Andil (%, yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (%, yoy)
Bensin	0.12	Emas Perhiasan	0.05
Angkutan Udara	0.09	Telur Ayam Ras	0.04
Angkutan Antar Kota	0.05	Cabai Merah	0.02
Pelumas/Oli Mesin	0.04	Daging Sapi	0.01
Tomat	0.03		

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau (SBH 2022=100), diolah

2.4.3. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Inflasi Kab. OKI pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,68% (yoy), menurun dibandingkan Triwulan III yang sebesar 2,74% (yoy). Tekanan inflasi pada periode ini didominasi oleh Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat sebesar 2,93% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 1,23% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I yang sebesar 0,81% (yoy) dengan andil 0,35% (yoy). Selanjutnya, kelompok Perawatan Pribadi dan jasa lainnya memberikan andil tertinggi kedua terhadap inflasi, dengan inflasi sebesar 9,98% (yoy) dan andil tahunan sebesar 0,78% (yoy), menurun dibandingkan Triwulan I

yang sebesar 21,97% (yoy) dengan andil 1,63% (yoy).

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi bulanan (% mtm) di Kab. OKI pada triwulan II 2026 adalah bensin sebesar 0,17% (mtm), angkutan antar kota sebesar 0,14% (mtm), bawang merah sebesar 0,07% (mtm), beras sebesar 0,06% (mtm), dan bawang putih sebesar 0,04% (mtm). Sementara itu, lima komoditas utama penyumbang deflasi bulanan adalah emas perhiasan sebesar 0,07% (mtm).

Tabel 2.18. Inflasi Kab. OKI Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2026 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	I 2026	Apr	Mei	Jun	I 2026	Apr	Mei	Jun
UMUM	2,74	1,32	2,3	2,68	2,74	1,32	2,3	2,68
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,81	0,52	2,19	2,93	0,35	0,22	0,92	1,23
Pakaian dan Alas Kaki	-4,95	-3,83	1,2	1,02	-0,29	-0,22	0,07	0,06
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	10,97	0,26	0,36	0,67	0,89	0,02	0,03	0,06
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,2	0,11	0,41	0,60	0,01	0,01	0,03	0,04
Kesehatan	-0,09	-0,17	-0,19	-0,33	0,00	0,00	0,00	-0,01
Transportasi	-0,23	0,12	0,55	4,24	-0,02	0,01	0,05	0,41
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,16	0,22	-0,04	-0,04	-0,01	0,01	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	3,22	3,27	3,27	-1	0,05	0,05	0,05	-0,02
Pendidikan	1,42	1,42	1,42	1,42	0,03	0,03	0,03	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,04	1,04	1,04	1	0,1	0,1	0,1	0,1
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	21,97	14,18	13,27	9,98	1,63	1,09	1,02	0,78

Sumber: BPS Kab. OKI (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 2.19. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi
Triwulan II 2026 Kab. OKI**

Komoditas Inflasi	Andil (%, yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (%, yoy)
Bensin	0,17	Emas perhiasan	0,07
Angkutan antar kota	0,14	Daging ayam ras	
Bawang merah	0,07	Pepaya	
Beras	0,06	Kangkung	
Bawang putih	0,04	Cabai rawit	

Sumber: BPS Kab. OKI (SBH 2022=100), diolah

2.4.4. Kabupaten Muara Enim

Tabel 2.20. Inflasi Kab. Muara Enim Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2026 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	I 2026	Apr	Mei	Jun	I 2026	Apr	Mei	Jun
UMUM	3,49	1,48	3,27	3,82	3,49	1,48	3,27	3,82
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,50	-0,64	3,12	3,81	0,21	-0,27	1,27	1,56
Pakaian dan Alas Kaki	0,52	1,04	2,70	2,70	0,03	0,05	0,14	0,14
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	12,35	1,94	1,35	1,30	1,04	0,18	0,13	0,12
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,04	-0,01	1,06	1,52	0,00	0,00	0,05	0,07
Kesehatan	1,11	0,93	1,10	1,15	0,02	0,02	0,02	0,02
Transportasi	-0,02	-0,80	1,90	4,90	0,00	-0,08	0,19	0,50
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,20	0,03	-0,44	-0,17	0,01	0,00	-0,03	-0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-1,98	-1,98	-2,17	-1,65	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03
Pendidikan	0,42	0,42	0,42	0,42	0,01	0,01	0,01	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,31	0,31	1,14	1,90	0,03	0,03	0,10	0,16
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	25,89	18,08	16,37	14,59	2,18	1,58	1,43	1,28

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

Tabel 2.21. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2026 Kab. Muara Enim

Komoditas Inflasi	Andil (% , yoy)
Tomat	0.29
Bensin	0.23
Bawang Putih	0.09
Pelumas/Oli Mesin	0.03
Beras	0.03

Komoditas Deflasi	Andil (% , yoy)
Emas Perhiasan	0.12
Telur Ayam Ras	0.12
Daging Ayam Ras	0.08
Cabai Merah	0.08
Minyak Goreng	0.04

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

Inflasi Kab. Muara Enim pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,82% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,49% (yoy). Tekanan inflasi pada periode ini didominasi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan tembakau yang tercatat sebesar 3,81% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,50% (yoy) dengan andil 0,21% (yoy). Kelompok dengan andil inflasi tertinggi kedua di Kab. Muara Enim adalah kelompok Perawatan Pribadi dan jasa lainnya, yang mencatat inflasi 14,59% (yoy) dengan andil tahunan 1,28% (yoy), turun signifikan dari triwulan I yang sebesar 25,89% (yoy) dengan andil 2,18% (yoy). Selanjutnya, kelompok Transportasi memberikan andil tertinggi ketiga terhadap inflasi, dengan inflasi 4,90% (yoy) dan andil tahunan 0,50% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,02 % (yoy) dengan andil 0,0% (yoy).

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi bulanan (% mtm) di Kab. Muara Enim pada triwulan II 2026 adalah tomat (0,29%), bensin (0,23%), bawang putih (0,09%),

pelumas dan beras masing-masing sebesar (0,03%). Sementara itu, lima komoditas utama penyumbang deflasi bulanan adalah emas perhiasan (0,12%), telur ayam ras (0,12%), daging ayam ras (0,08%), cabai merah (0,08%), dan minyak goreng (0,04%).

2.5. Upaya Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Selatan terus melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah dengan tetap berpedoman pada strategi Pengendalian Inflasi 4K¹. Upaya yang telah dilakukan sepanjang periode laporan, diantaranya sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif

Tabel 2.22. Upaya Pengendalian Inflasi

Pilar Pengendalian Inflasi	Upaya Yang Dilakukan
Keterjangkauan Harga	1. Pelaksanaan 358 OPM/GPM/Pasar Murah/SPHP se-Sumatera Selatan sejak awal tahun 2026 hingga bulan Juli 2026. Salah satunya adalah pelaksanaan Pasar Murah Provinsi Sumatera Selatan yang turut bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menjelang HBKN Idul Fitri 2026. 2. Penjualan komoditas dengan harga yang lebih terjangkau melalui 1.075 Rumah Pangan Kita (RPK) yang bekerja sama dengan Bulog. 3. Pemasangan spanduk MinyaKita dan HET di berbagai titik dan distributor.
Ketersediaan Pasokan	1. Monitoring rutin dan sidak pasar sebanyak 63 kali hingga Juni 2026 terhadap produsen dan distributor untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. 2. Pembelian 400 kg bibit bawang merah pada Triwulan II untuk demplot di Pagar Alam dari Kab. Demak. 3. Panen bibit bawang merah di Kabupaten Banyuasin sebanyak 1 Ton di Triwulan II untuk ditanam pada lahan seluas 2 Ha sebagai program ketahanan pangan. 4. <i>Business Matching</i> KUR Alsintan kepada Poktan di Sumatera Selatan oleh Perbankan dengan total nominal sebanyak 1,29 Miliar Rupiah. 5. Pengadaan sumur bor di 4 titik di Kabupaten Banyuasin sebagai upaya perbaikan sistem irigasi sehingga kegiatan budidaya dapat berjalan dengan optimal ditengah kondisi El Nino.
Kelancaran Distribusi	1. Pemberian subsidi ongkos angkutan (termasuk melalui Fasilitas Distribusi Pangan/FDP) dan subsidi operasional lainnya untuk mendukung pelaksanaan OPM di seluruh wilayah Sumatera Selatan sebanyak 77 kali dengan total berat komoditas sebanyak 47,92 ton. 2. Realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui pengiriman 22,67 ton komoditas bawang merah dari Sumatera Barat dan komoditas cabai dari Kab. Magelang sebanyak 3,68 ton. 3. Penambahan MoU KAD baru sebanyak 8 KSB G2G, 21 PKS G2G, dan 4 PKS B2B dengan daerah sentra di Provinsi Jawa Tengah terkait pengendalian inflasi.
Komunikasi Efektif	1. Rilis infografis dan siaran pers inflasi secara berkala. 2. Publikasi informasi jadwal OPM/GPM serta jaringan penyalur SPHP melalui media sosial dan kanal informasi lainnya. 3. <i>Launching</i> Program GPIPS 2026. 4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) rutin TPID setiap awal minggu. 5. <i>High Level Meeting</i> (HLM) TPID se-Sumatera Selatan dalam rangka HBKN Idul Fitri 2026 yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan. 6. <i>Capacity building</i> dan rapat koordinasi mengenai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Fitri 2026. 7. Rakor Pengamanan SPHP Menjelang HBKN Idul Fitri. 8. Rakor TPID-TPID Wilayah Sumatera 2026. 9. <i>Capacity Building</i> TPID Provinsi Sumatera Selatan dengan TPID Jawa Tengah. 10. <i>Capacity Building</i> TPID Provinsi Sumatera Selatan dengan TPID Maluku. 11. <i>Capacity Building</i> TPID Provinsi Sumatera Selatan dengan TPID Sulawesi Selatan. 12. <i>Capacity Building</i> TPID Provinsi Sumatera Selatan dengan TPID Kota Magelang terkait neraca pangan. 13. Kunjungan Studi Tiru TPID Provinsi Sumatera Selatan ke Sentra Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Demak. 14. Kunjungan Studi Tiru TPID Provinsi Sumatera Selatan ke BUMD JTAB Provinsi Jawa Tengah. 15. Kunjungan Studi Tiru TPID Provinsi Sumatera Selatan ke Kios Pangan TPID Kota Semarang. 16. Kunjungan Studi Tiru TPID Provinsi Sumatera Selatan ke Pasar Lelang Cabai di Kabupaten Magelang. 17. Kunjungan Studi Tiru TPID Provinsi Sumatera Selatan ke Champion Nasional Komoditas Cabai di Kabupaten Magelang. 18. <i>Launching</i> Inovasi Ekosistem Rantai Pasok GSMP-MBG. 19. HLM TPID Provinsi Tengah Tahun. 20. HLM & Rakor TPID Kab OKI. 21. Rakor Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan se Prov. Sumsel. 22. HLM & Rakor TPID Kab Ogan Ilir.

Sumber: Rekap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Selatan

Evaluasi program pengendalian inflasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, tantangan, serta langkah penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II 2026 dapat dirangkum sebagai berikut:

A. Keterjangkauan harga

Hingga Triwulan II 2026, pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM)/Pasar Murah tercatat sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) kali, meningkat apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai 122 kali. Peningkatan ini dikarenakan gencarnya upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi

utamanya pada triwulan I yang terdapat tren peningkatan konsumsi dampak HBKN Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri.

Selain melalui OPM/GPM/Pasar Murah/SPHP, TPID Sumatera Selatan selalu memastikan keterjangkauan harga komoditas melalui 1.075 Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Palembang, Lubuk Linggau, Lahat, dan OKU. RPK yang merupakan mitra Bulog sehingga memperoleh pasokan komoditas langsung dari Bulog dengan harga lebih terjangkau. Jumlah RPK ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 1003 RPK.

Selain itu, distribusi pangan dengan harga terjangkau juga didukung melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok) milik Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumatera Selatan,

Tabel 2.23. Perubahan Harga Rata-Rata Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi di Sumatera Selatan

Komoditas	Harga Rata-Rata Tw I 2026	Harga Rata-Rata Tw II 2026	Growth Tw II 2026 dibanding Tw I 2026
Beras	Rp15,617	Rp15,917	1,92%
Minyak Goreng	Rp20,900	Rp21,133	1,12%

Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah

Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya, serta OKI-Mart dan OKI-Jek milik Pemerintah Daerah Kab. OKI dan BUMD Bande Seguguk. Sejalan dengan perkembangan pasokan dan permintaan pada triwulan II 2026, harga sejumlah komoditas strategis mengalami penyesuaian dibandingkan triwulan sebelumnya. Harga rata-rata beras meningkat sebesar 1,92%, dari Rp15.617/kg menjadi Rp15.917/kg, sementara harga minyak goreng meningkat secara terbatas sebesar 1,12%, dari Rp20.900/liter menjadi Rp21.133/liter. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyesuaian harga pada beberapa komoditas, stabilitas harga minyak goreng tetap terjaga dengan kenaikan yang relatif terbatas, didukung oleh ketersediaan pasokan dan berbagai upaya pengendalian harga yang terus dilakukan, seperti yang terlihat pada Tabel 2-23.

B. Ketersediaan Pasokan

Upaya pengendalian inflasi dalam menjaga ketersediaan pasokan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Selatan seperti pembelian bibit bawang merah untuk demplot di pagar alam sebanyak 400 kg serta panen bibit bawang merah sebanyak 1 ton di kabupaten banyuasin yang akan digunakan untuk penguatan pasokan pada periode akhir tahun yang cenderung mengalami tren peningkatan konsumsi masyarakat. Selain itu, telah dilakukan pula *Business Matching* untuk Kredit Usaha Rakyat Alat dan Mesin Pertanian yang harapannya dapat mendukung ketersediaan pasokan melalui peningkatan produksi pangan serta penyaluran bantuan sumur bor di 4 titik lokasi sentra pangan di banyuasin untuk menghadapi kekeringan yang disebabkan oleh El Nino.

C. Kelancaran Distribusi

Berdasarkan data perkembangan margin distribusi harga pada triwulan II 2026, terlihat adanya perbedaan (disparitas) harga yang cukup bervariasi antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pasar untuk 9 komoditas utama penyumbang inflasi sebagaimana tercantum pada Tabel 2-25.

Pada Triwulan II 2026, margin disparitas harga di Sumatera Selatan menunjukkan pola yang relatif terkendali dan menunjukkan tren yang relatif mengecil namun masih terdapat kenaikan disparitas pada komoditas daging ayam, telur ayam dan percobaian bila dibandingkan Tw I 2026. Meskipun begitu untuk rata-rata gap kenaikan komoditas adalah sebesar Rp5.583,00 lebih kecil dari rata-rata gap penurunannya yang sebesar Rp1.920,00. Kondisi ini umumnya sejalan dengan pengaruh efek dari el nino utamanya pada komoditas hortikultura yang menyebabkan penurunan produktivitas hasil panen per hektar, di sisi lain peningkatan permintaan daging ayam dan telur ayam turut terjadi sejalan dengan masih beroperasinya program MBG hingga akhir Tw II 2026 pasca hiatus di momen libur sekolah dan HBKN Idul Fitri yang terjadi di Tw I 2026.

Dalam upaya pengendalian inflasi melalui strategi kelancaran distribusi, TPID Sumatera Selatan turut berperan melalui pemberian subsidi harga, subsidi angkutan, maupun subsidi operasional lainnya. Dukungan ini ditujukan untuk menekan biaya transportasi dan distribusi pangan, memperlancar alur distribusi dari produsen ke konsumen, serta menjaga keterjangkauan harga di pasar.

Selain itu, telah dilakukan penambahan penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) untuk kerja sama antar daerah (KAD) terkait pengendalian inflasi sebanyak 8 KSB GtG, 21 PKS GtG, dan 4 PKS BtB dengan daerah sentra di Provinsi Jawa Tengah. Adapun realisasi atas Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah ada tercatat setidaknya telah dilakukan pengiriman komoditas bawang merah sebanyak 22,67 ton dan komoditas cabai dari Kab. Magelang sebanyak 3,68 ton. Melalui langkah-langkah kolaboratif tersebut, diharapkan disparitas harga dapat semakin diminimalkan, sehingga stabilitas harga pangan strategis di Sumatera Selatan dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.

Tabel 2.24. Perkembangan Margin Distribusi Harga di Provinsi Sumatera Selatan

Komoditas / Margin Distribusi Harga		2026					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jul
Beras	Produsen	Rp12.100	Rp12.500	Rp12.250	Rp12.550	Rp12.450	Rp12.850
	Pasar	Rp15.500	Rp15.500	Rp15.650	Rp15.800	Rp15.800	Rp15.950
	Selisih Harga	Rp3.400	Rp3.000	Rp3.400	Rp3.250	Rp3.350	Rp3.100
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp3.267			Rp3.233
Daging Ayam	Produsen	Rp36.000	Rp36.000	Rp38.000	Rp39.000	Rp30.000	Rp33.000
	Pasar	Rp38.500	Rp38.000	Rp38.000	Rp37.750	Rp32.500	Rp37.750
	Selisih Harga	Rp2.500	Rp2.000	Rp2.000	-Rp1.250	Rp2.500	Rp4.750
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp1.500			Rp2.000
Daging Sapi	Produsen	Rp120.000	Rp127.500	Rp140.000	Rp140.000	Rp132.500	Rp127.500
	Pasar	Rp145.000	Rp140.000	Rp142.500	Rp141.900	Rp141.900	Rp146.250
	Selisih Harga	Rp25.000	Rp12.500	Rp2.500	Rp1.900	Rp9.400	Rp18.750
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp13.333			Rp10.017
Telur Ayam	Produsen	Rp26.750	Rp24.750	Rp26.500	Rp26.500	Rp24.650	Rp23.400
	Pasar	Rp30.400	Rp29.400	Rp29.500	Rp29.750	Rp29.250	Rp29.000
	Selisih Harga	Rp3.650	Rp4.650	Rp3.000	Rp3.250	Rp4.600	Rp5.600
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp3.767			Rp4.483
Bawang Merah	Produsen	Rp40.000	Rp40.000	Rp40.000	Rp40.000	Rp45.000	Rp45.000
	Pasar	Rp45.750	Rp43.900	Rp41.500	Rp40.400	Rp41.900	Rp44.500
	Selisih Harga	Rp5.750	Rp3.900	Rp1.500	Rp400	-Rp3.100	-Rp500
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp3.717			-Rp1.067
Cabai Merah	Produsen	Rp66.700	Rp22.500	Rp27.500	Rp25.000	Rp27.500	Rp40.000
	Pasar	Rp55.200	Rp47.900	Rp46.000	Rp40.850	Rp48.250	Rp67.400
	Selisih Harga	-Rp11.500	Rp25.400	Rp18.500	Rp15.850	Rp20.750	Rp27.400
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp10.800			Rp21.333
Cabai Rawit	Produsen	Rp65.000	Rp46.700	Rp47.500	Rp39.200	Rp35.000	Rp45.000
	Pasar	Rp77.150	Rp63.100	Rp60.700	Rp49.450	Rp59.650	Rp83.600
	Selisih Harga	Rp12.150	Rp16.400	Rp13.200	Rp10.250	Rp24.650	Rp38.600
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp13.917			Rp24.500
Minyak Goreng	Produsen	Rp17.200	Rp17.300	Rp17.700	Rp18.400	Rp19.250	Rp18.950
	Pasar	Rp20.800	Rp20.900	Rp20.900	Rp21.000	Rp21.100	Rp21.100
	Selisih Harga	Rp3.600	Rp3.600	Rp3.200	Rp2.600	Rp1.850	Rp2.150
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp3.467			Rp2.200
Gula Pasir	Produsen	Rp15.000	Rp15.000	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.500	Rp15.800
	Pasar	Rp18.250	Rp18.400	Rp18.250	Rp18.750	Rp18.900	Rp18.950
	Selisih Harga	Rp3.250	Rp3.400	Rp1.750	Rp2.250	Rp2.400	Rp3.150
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp2.800			Rp2.600

*Harga pada tanggal 1 setiap bulan

Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah

D. Komunikasi Efektif

Upaya pengendalian inflasi melalui komunikasi efektif dilakukan melalui koordinasi kelembagaan, baik dalam bentuk rapat koordinasi, *high level meeting* (HLM), maupun *capacity building* TPID, serta pengendalian ekspektasi masyarakat. Pada Triwulan II 2026, TPID Sumatera Selatan

secara konsisten melaksanakan rapat koordinasi mingguan untuk membahas perkembangan inflasi terkini serta langkah-langkah pengendaliannya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Sepanjang periode laporan, TPID se-Sumatera Selatan telah melaksanakan HLM, *capacity building*, dan rapat koordinasi TPID antara lain melalui:

- *High Level Meeting* (HLM) TPID se-Sumatera Selatan dalam rangka HBKN Idul Fitri 2026 yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- *High Level Meeting* (HLM) TPID se-Sumatera Selatan tengah tahun dalam rangka evaluasi kegiatan setengah tahun kebelakang dan perumusan upaya pengendalian inflasi hingga akhir tahun yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
- *Capacity Building* dan rapat koordinasi mengenai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Fitri 2026.
- Rakor Pengamanan SPHP Menjelang HBKN Idul Fitri.
- *Launching* Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 yang merupakan penguatan dari Program GNPIP.
- Rakor TPID-Wilayah Sumatera 2026.
- Rakor Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan se Prov. Sumsel

- Kunjungan Studi Tiru dan *Capacity Building* TPID dengan beberapa provinsi diantaranya Maluku, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.
- *Launching* Inovasi Pengembangan Rantai Pasok Pangan GSMP-MBG.
- HLM & Rakor TPID tingkat kabupaten diantaranya Kab. Ogan Ilir dan Kab OKI Tahun 2026.

Lebih lanjut, TPID Sumatera Selatan secara aktif melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi terkait inflasi maupun upaya pengendalian inflasi, termasuk di dalamnya mengenai bijak belanja, melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain siaran pers di media cetak dan *online*, konten media sosial, pelaksanaan *podcast*, hingga sosialisasi langsung kepada masyarakat. Selain itu, TPID Sumatera Selatan juga secara rutin menginformasikan rencana pelaksanaan operasi pasar murah dan jaringan penyalur SPHP setiap bulan melalui media cetak maupun media sosial sebagai bentuk transparansi dan upaya menjaga ekspektasi masyarakat.

BOKS 2 :

Menghubungkan Daerah, Menjaga Pasokan: Penguatan KAD Sumatera Selatan

Pengendalian inflasi di Sumatera Selatan terus diperkuat melalui implementasi strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Salah satu upaya yang semakin diperkuat adalah aspek kelancaran distribusi melalui pengembangan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), yang memungkinkan daerah dengan surplus produksi menjadi sumber pasokan bagi wilayah yang mengalami defisit. Melalui KAD, ketersediaan pangan dapat lebih terjaga, sumber pasokan menjadi lebih beragam, dan risiko gejala harga akibat keterbatasan produksi lokal dapat dimitigasi.

Dalam konteks tersebut, **TPID Provinsi Sumatera Selatan bersama TPID Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Capacity Building TPID yang dirangkaikan dengan penguatan KAD bersama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Magelang pada 22 Juni 2026 di Semarang**. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antardaerah sekaligus memperoleh *lesson learned* dari praktik pengendalian inflasi Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk mendorong kerja sama perdagangan pangan yang lebih konkret melalui skema *government-to-government* (G2G) dan *business-to-business* (B2B).

Dalam kegiatan *capacity building*, Jawa Tengah membagikan sejumlah praktik pengendalian inflasi, antara lain **penguatan kelembagaan pangan melalui Koperasi Panca Arga Tani Gemilang (PATG), optimalisasi peran BUMD pangan PT Jateng Agro Berdikari, digitalisasi informasi harga dan pasokan melalui DataGO dan IndiGO, serta penerapan *early warning system* untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan preventif**. Praktik tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan, ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta kemampuan mengidentifikasi risiko pasokan sejak dini dalam mendukung efektivitas strategi 4K.

Penguatan KAD Sumatera Selatan selanjutnya diarahkan tidak hanya pada kesepakatan antarpemerintah, tetapi juga pada implementasi konkret di sepanjang rantai pasok.

Salah satu bentuk implementasinya adalah **pengiriman bibit bawang merah dari Kabupaten Demak untuk mendukung pengembangan *demonstration plot* (demplot) bawang merah di Kota Pagar Alam**. Inisiatif tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas produksi bawang merah Sumatera Selatan dalam jangka menengah dan panjang.

Pengembangan demplot di Pagar Alam menjadi *entry point* untuk menguji kesesuaian varietas dan teknologi budidaya dari daerah sentra produksi dengan kondisi agroklimat Sumatera Selatan. Apabila menunjukkan hasil yang baik, model tersebut dapat direplikasi dan diperluas ke wilayah lain yang memiliki potensi pengembangan bawang merah. Dengan demikian, KAD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan pasokan ketika terjadi defisit, tetapi juga dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi pangan daerah.

Selain kerja sama antarpemerintah, telah terbentuk sejumlah kerja sama B2B komoditas pangan strategis, antara lain kemitraan komoditas bawang merah antara pelaku usaha Palembang dan Lubuk Linggau dengan pelaku usaha di Demak serta kerja sama komoditas cabai antara pelaku usaha Lubuk Linggau dengan Magelang. Kerja sama tersebut mencakup kemitraan antara petani dan penangkar benih untuk pengembangan pembibitan bawang merah serta kemitraan antarpedagang dalam penyediaan dan distribusi komoditas pangan. Penguatan hubungan B2B tersebut berpotensi meningkatkan kepastian pasokan,



Gambar Boks C.1. Penandatanganan MoU KAD antara Sumatera Selatan dengan Jawa Tengah, Kab. Demak, dan Kab. Magelang

efisiensi distribusi, dan kontinuitas perdagangan antardaerah.

Bagi Sumatera Selatan, penguatan KAD memberikan manfaat strategis melalui diversifikasi sumber pasokan dan peningkatan konektivitas rantai pasok pangan. Dalam jangka pendek, kerja sama perdagangan dapat membantu memenuhi kebutuhan komoditas ketika produksi lokal mengalami keterbatasan. Sementara itu, kerja sama pada sisi hulu melalui penyediaan benih, transfer pengetahuan, dan pengembangan demplot berpotensi meningkatkan kapasitas produksi lokal sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap. Dalam jangka menengah, penguatan hubungan hulu-hilir juga dapat membangun ekosistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Ke depan, efektivitas KAD perlu diperkuat **sebagai transaksi perdagangan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan komoditas**. *Business matching* perlu dilakukan secara lebih terstruktur dengan mempertimbangkan kebutuhan, kapasitas pasokan, harga, musim produksi, serta jalur distribusi antardaerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi KAD perlu dilakukan melalui pemantauan volume dan nilai transaksi, kontinuitas perdagangan, perkembangan produksi demplot, serta keberlanjutan kemitraan antarpelaku usaha.

Dengan penguatan tersebut, **KAD diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi berkembang menjadi konektivitas rantai pasok pangan**

yang nyata dari hulu hingga hilir. Dalam jangka menengah, penguatan ekosistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan Sumatera Selatan, memperluas sumber pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat ketahanan pangan dan efektivitas pengendalian inflasi daerah.



Gambar Boks C.3. *Capacity Building* TPID Sumatera Selatan dengan TPID Jawa Tengah



Gambar Boks C.2. Pengiriman Bibit Bawang Merah dalam rangka KAD Jawa Tengah – Sumatera Selatan



Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Secara umum, kinerja stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tetap positif meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan I 2026. Terjaganya pertumbuhan penyaluran kredit serta aset perbankan mengindikasikan fungsi intermediasi yang tetap lancar, dengan turut disertai kualitas penyaluran yang relatif terjaga.

- Kinerja pertumbuhan aset perbankan Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,20% (yoy). Kinerja aset perbankan utamanya disumbang oleh pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang meningkat sebesar 3,32% (yoy). Adapun kinerja penyaluran kredit perbankan disumbang oleh kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 12,54 (yoy) diikuti oleh kredit investasi sebesar 21,09% (yoy) dan ditahan oleh kredit modal kerja yang kontraksi sebesar -3,64% (yoy).
- Di lain sisi, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 4,93% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar 7,15% (yoy). Pada periode laporan, kinerja DPK disumbang oleh pertumbuhan pada instrumen Giro (15,49% (yoy)) dan Tabungan (6,24%(yoy)) serta ditahan oleh instrumen deposito yang mengalami kontraksi (-4,22% (yoy)).
- Kredit UMKM triwulan II 2026 mencatatkan kinerja positif dicatatkan melalui penyaluran kredit yang tumbuh 0,91% (yoy), namun lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM skala kecil pada periode ini merupakan penyumbang pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan sebesar 3,22% (yoy). Di lain sisi, kredit UMKM mikro sebagai pangsa penyaluran terbesar berkontraksi sebesar -1,45% (yoy) menunjukkan tekanan daya beli masyarakat berdampak pada UMKM perintis. Namun demikian, secara umum kinerja kredit UMKM yang positif mencerminkan kondisi keuangan dan optimisme UMKM tetap terjaga.

3.1. Kondisi Umum Sumatera Selatan

Pada triwulan II 2026, kinerja perbankan Provinsi Sumatera Selatan secara umum tetap positif meskipun melambat. Kondisi ini tercermin melalui beberapa indikator kinerja utama perbankan yaitu nilai aset serta penyaluran kredit.

Aset perbankan pada periode laporan tercatat senilai Rp167,35 triliun atau tumbuh sebesar 5,12% (yoy) dibandingkan periode triwulan sebelumnya yang tercatat senilai Rp166,22 triliun atau tumbuh sebesar 6,12% (yoy). Kinerja aset perbankan ini utamanya disumbang oleh kinerja penyaluran kredit perbankan Sumatera Selatan yang turut mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 7,45% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,20% (yoy) (Grafik 3-1).

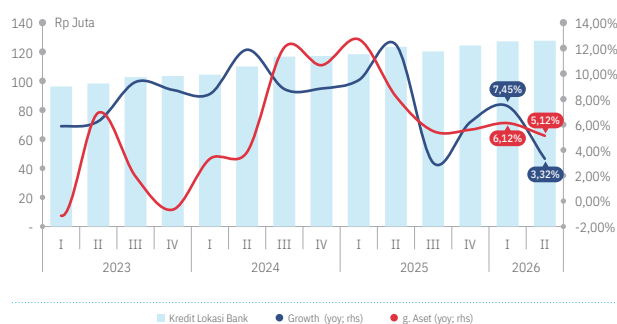
Lebih lanjut, kinerja kredit perbankan didorong oleh pertumbuhan pada kredit investasi sebesar 21,09% (yoy) diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 11,34% (yoy), namun ditahan oleh penurunan kredit modal kerja sebesar -4,08% (yoy). Adapun secara komposisi, kredit perbankan didominasi oleh kredit konsumsi dengan pangsa sebesar 43,47%, diikuti oleh kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 32,38% dan kredit investasi dengan pangsa sebesar 24,15% (Grafik 3-2).

Di lain sisi, perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh melambat menjadi sebesar 4,93% (yoy), lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang sebesar 5,98% (yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,15% (yoy) (Grafik 3-3). Kinerja pertumbuhan DPK didorong oleh peningkatan pada instrumen tabungan yang tumbuh sebesar 6,24% (yoy) diikuti oleh instrumen giro yang tumbuh sebesar 15,49% (yoy), namun ditahan oleh instrumen deposito yang kontraksi sebesar -4,22% (yoy).

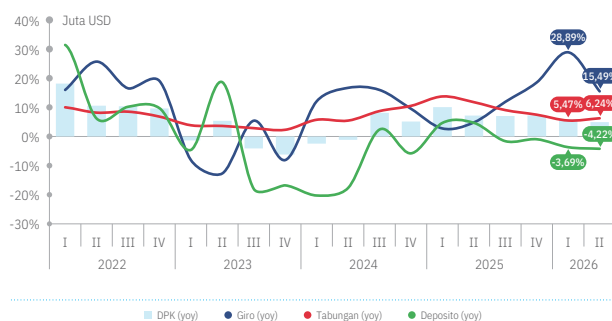
Pada instrumen tabungan, peningkatan dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat seiring gaji ke-13 pada tengah tahun diikuti oleh tendensi *precautionary saving* yang lebih tinggi. Selanjutnya, instrumen giro menunjukkan pertumbuhan sebesar 15,49% (yoy) pada Triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,82% (yoy) namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 28,89% (yoy). Peningkatan giro terutama didorong oleh meningkatnya operasional keuangan Pemerintah sejalan dengan stimulus fiskal diikuti oleh penerimaan usaha/korporasi yang cenderung membaik. Sementara instrumen deposito terkontraksi sebagai dampak pergeseran referensi investasi masyarakat ke instrumen yang lebih likuid seperti SBN, emas, dan reksadana. Adapun nominal pada DPK perbankan di triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp119,80 triliun, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp119,46 triliun.

Grafik 3.1. Perkembangan Pertumbuhan DPK dan Aset Perbankan di Sumatera Selatan



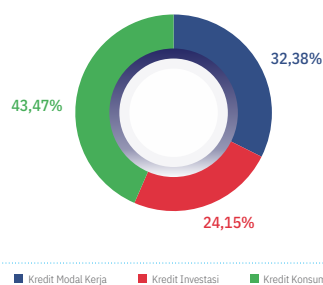
Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



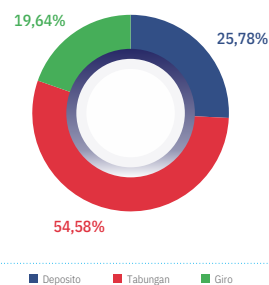
Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2. Pangsa Kredit Perbankan di Sumatera Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.4. Pangsa DPK Perbankan Sumatera Selatan



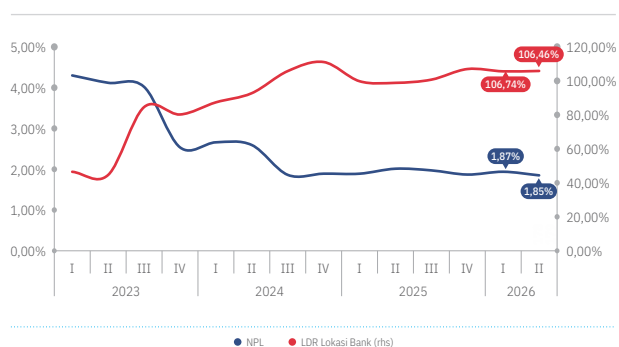
Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Lebih lanjut, kinerja pembiayaan perbankan pada periode laporan tercermin pada tingkat *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) perbankan Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat sebesar 106,46%, sedikit menurun dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 106,40%. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan di Sumatera Selatan masih relatif tinggi, tercermin dari posisi LDR yang berada di atas *threshold* ideal sebesar 80%–92%¹. Meskipun mengalami sedikit perbaikan, kondisi tersebut menunjukkan likuiditas perbankan yang masih perlu dijaga secara hati-hati di tengah pertumbuhan kredit yang tetap kuat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) pada periode laporan tercatat sebesar 1,85%, sedikit meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebesar 1,94%. Menurunnya rasio NPL dan tingkat NPL yang berada di bawah *threshold* 5% mencerminkan risiko kredit perbankan yang tetap terjaga. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kualitas intermediasi perbankan di Sumatera Selatan berada pada level yang cukup baik di tengah upaya perbankan mendorong pertumbuhan pembiayaan sejalan dengan kebijakan pelonggaran makroprudensial.

Di sisi lain, perbankan tetap berkomitmen menjaga kesinambungan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan giro yang sehat, perbankan terus memperkuat ekosistem pembayaran digital, menjaga stabilitas dan keamanan sistem pembayaran, serta menyalurkan kredit secara prudent dengan tetap memperhatikan indikator risiko seperti NPL, CAR, dan LDR. Selain itu, perbankan juga terus mendorong optimalisasi penyaluran dana ke sektor-sektor prioritas dan unggulan di Sumatera Selatan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dengan demikian, peningkatan giro tidak hanya memperkuat basis likuiditas perbankan, tetapi juga mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik 3.5. Perkembangan Risiko perbankan Sumatera Selatan Berdasarkan Lokasi Bank



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

3.2. Pembiayaan Daerah

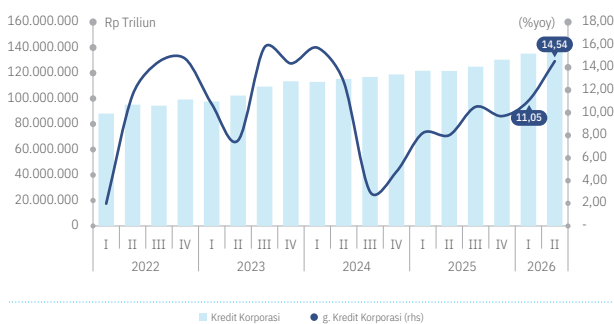
Kondisi pembiayaan di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan pada Triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif. Secara umum, pertumbuhan penyaluran kredit tercatat sebesar 12,59% (yoy) dengan nominal mencapai Rp201,95 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode triwulan I 2026 yang sebesar 10,63% (yoy) dengan nominal Rp197,22 triliun. Lebih lanjut, pertumbuhan penyaluran kredit tersebut didukung oleh kinerja pertumbuhan kredit investasi sebesar 22,53% (yoy) diikuti oleh pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 8,68% (yoy), yang mengindikasikan bahwa optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian ke depan tetap positif. Kondisi tersebut antara lain didorong oleh membaiknya permintaan domestik, stabilitas harga komoditas utama, keyakinan terhadap kondisi makroekonomi yang kondusif, serta dukungan belanja prioritas pemerintah. Secara umum, perkembangan tersebut sejalan dengan hasil liaison KPw BI Sumatera Selatan yang mengindikasikan bahwa aktivitas pembiayaan usaha di Sumatera Selatan masih terjaga, baik untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi usaha jangka panjang. Selain itu, stabilitas sistem keuangan, implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), transmisi suku bunga yang semakin membaik, serta percepatan belanja pemerintah turut mendukung pertumbuhan kredit pada periode laporan. Kondisi tersebut menjadi indikasi positif bahwa dunia usaha mulai meningkatkan aktivitas usaha dan investasi secara bertahap di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.

3.2.1. Perkembangan Pembiayaan Korporasi

Pertumbuhan pembiayaan korporasi di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 14,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 11,05% (yoy) (Grafik 3-6). Kinerja pembiayaan korporasi disumbang oleh peningkatan penyaluran kredit modal kerja yang tercatat sebesar 8,68% (yoy) dengan *outstanding* mencapai Rp74,53 triliun diikuti oleh penyaluran kredit investasi sebesar 22,13% (yoy) dengan *outstanding* mencapai Rp64,75 triliun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha masih terjaga serta mencerminkan optimisme pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

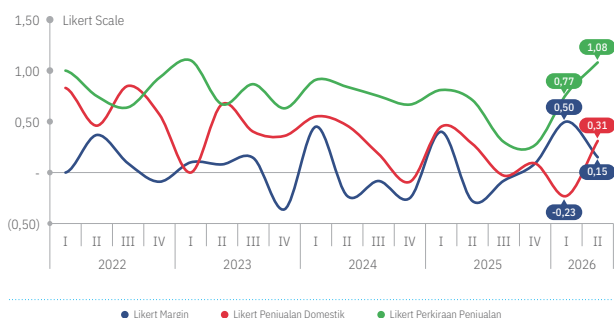
Peningkatan pembiayaan korporasi pada triwulan laporan didorong oleh kebutuhan pembiayaan yang tetap tinggi, baik untuk mendukung kegiatan operasional maupun ekspansi usaha. Hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai meningkatkan pemanfaatan pembiayaan perbankan seiring membaiknya prospek usaha dan permintaan domestik.

Grafik 3.6. Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.8. Likert Scale Penjualan Domestik, Margin, dan Perkiraan Penjualan



Sumber: Liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan diolah

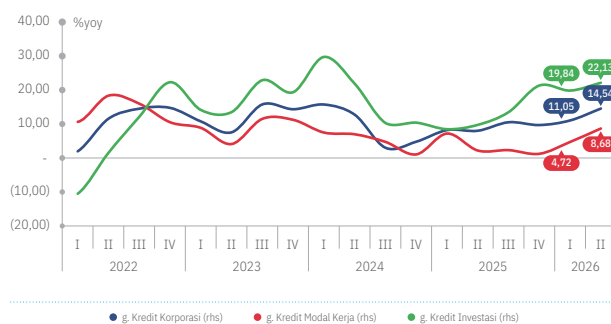
Meskipun perkembangan usaha relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya, sebagian pelaku usaha mulai menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan investasi secara bertahap sebagai bagian dari strategi ekspansi usaha ke depan.

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan kredit korporasi di Sumatera Selatan pada Triwulan II 2026 terutama ditopang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 43,31% (yoy), serta Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 19,64% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor utama perekonomian Sumatera Selatan masih menjadi motor penggerak pertumbuhan pembiayaan korporasi.

Kinerja kualitas kredit korporasi di Sumatera Selatan pada Triwulan II 2026 mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi yang meningkat menjadi 1,85%, dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 1,94% (Grafik 3-10) serta jauh di bawah *threshold* 5% yang mengindikasikan risiko kredit korporasi secara umum masih terjaga.

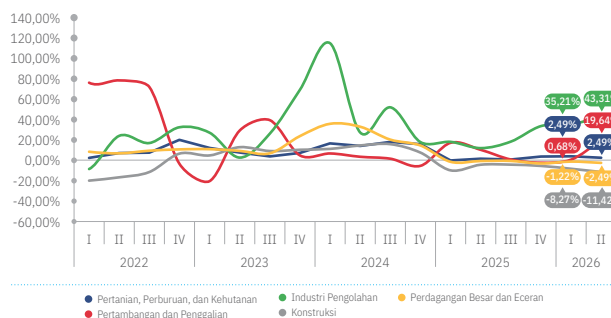
Ditinjau berdasarkan jenis penggunaan kredit, perbaikan NPL terutama bersumber dari kredit investasi yang meningkat menjadi 1,09% dari sebelumnya 1,17%, serta kredit modal kerja yang meningkat menjadi 2,13% dari sebelumnya 2,34%. Kondisi

Grafik 3.7. Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.9. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi

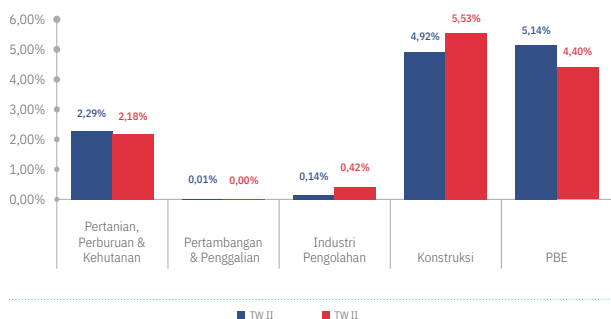


Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

tersebut mengindikasikan bahwa risiko kredit secara terbatas pada kedua jenis kredit tersebut cukup terkendali.

Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, perbaikan kualitas kredit terjadi pada beberapa Lapangan Usaha (LU), antara lain LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) sebesar 4,40% dari 5,28% pada triwulan sebelumnya, LU pertambangan dan penggalian sebesar 0,00% dari 0,02% pada triwulan sebelumnya serta LU pertanian yang stabil mempunyai NPL sebesar 2,18%. Di lain sisi, peningkatan NPL terjadi pada LU Industri Pengolahan (0,42% dari 0,09% pada triwulan sebelumnya) dan LU Konstruksi (5,53% dari 5,13% pada triwulan sebelumnya). Kondisi tersebut perlu terus dicermati sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit di tengah pertumbuhan pembiayaan korporasi yang masih positif.

Grafik 3.10. NPL Kredit Korporasi Sumatera Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

3.2.2. Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga

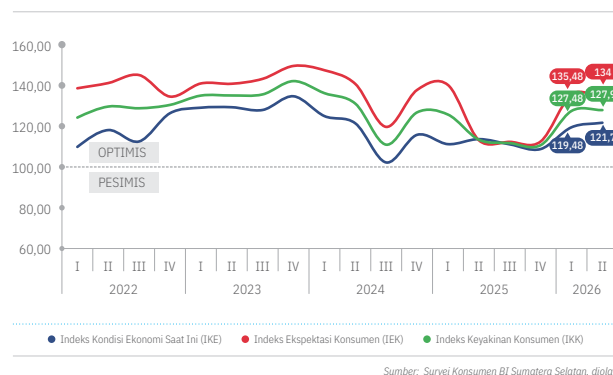
Komponen konsumsi rumah tangga (RT) memegang peranan strategis sebagai motor penggerak utama permintaan dalam perekonomian, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Konsumsi oleh rumah tangga tidak hanya menjadi pendorong langsung bagi aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa, tetapi juga menciptakan siklus ekonomi yang saling terhubung.

Kinerja rumah tangga Provinsi Sumatera Selatan tetap tumbuh sejalan dengan meningkatnya keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian pada Triwulan II 2026. Pada periode laporan, konsumsi rumah tangga pada PDRB Sumatera Selatan tumbuh sebesar 4,82% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebesar 4,97% (yoy). Kinerja tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen KPwBI Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa tingkat optimisme masyarakat tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang meningkat menjadi 127,90 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 127,48.

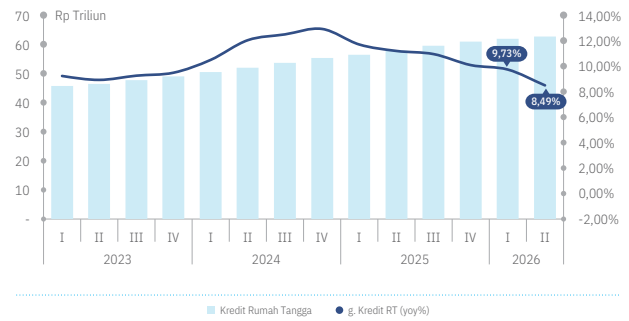
Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga juga tetap tumbuh positif sebesar 8,49% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 9,73% (yoy) dan Triwulan II 2025 sebesar 11,19% (yoy). Pertumbuhan kredit rumah tangga terutama ditopang oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 13,26%, dan Kredit Multiguna sebesar 2,70%.

Berdasarkan jenis kreditnya, KPR mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,26% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pembiayaan rumah tinggal tipe 22–70, rumah tinggal di atas tipe 70, serta apartemen tipe 22–70. Kondisi tersebut mengindikasikan masih terjaganya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.

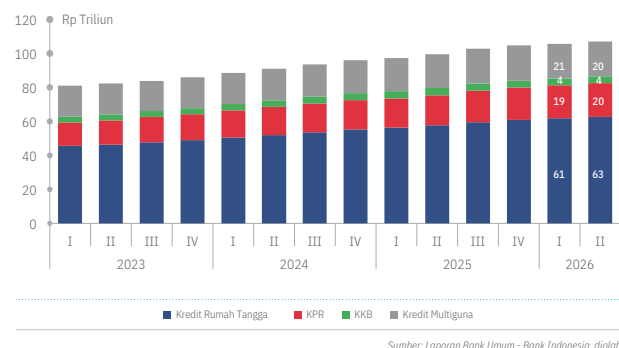
Grafik 3.11. Indeks Keyakinan Konsumen dan Komponennya Sumatera Selatan



Grafik 3.12. Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan



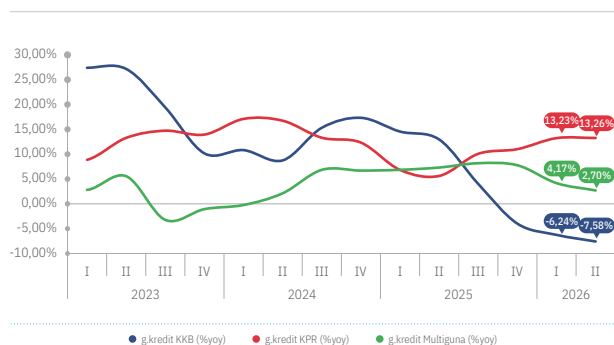
Grafik 3.13. Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan menurut kelompok penggunaan



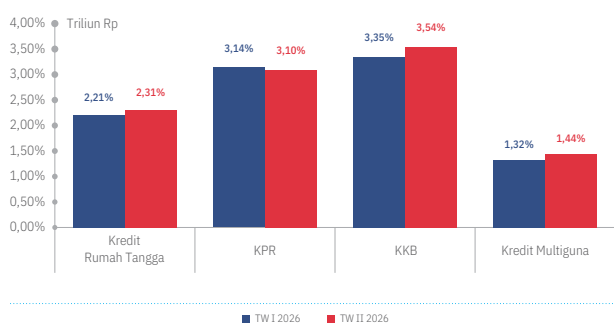
Selanjutnya, kredit multiguna tumbuh sebesar 2,70% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 4,17% (yoy). Perlambatan tersebut mengindikasikan masyarakat cenderung lebih selektif dalam memanfaatkan pembiayaan konsumtif di tengah dinamika perekonomian yang masih berkembang.

Di lain sisi, KKB berkontraksi sebesar -7,58% (yoy), lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya sebesar -6,24% (yoy). Hal ini mengindikasikan terdapat perubahan preferensi masyarakat untuk kredit kendaraan yang secara inheren mempunyai imbal hasil yang terdepresiasi.

Sejalan dengan perkembangan kredit rumah tangga, indikator risiko kredit masih berada pada level yang terkendali. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) kredit rumah tangga tercatat sebesar 2,31%, meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebesar 2,21%. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari NPL KKB yang meningkat menjadi 3,54% dari sebelumnya 3,35% diikuti NPL Kredit Multiguna yang meningkat dari 1,32% menjadi 1,44% (Grafik 3-15). Di lain sisi, NPL Kredit KPR mengalami perbaikan dari 3,14% menjadi 3,10%. Secara umum, rasio NPL kredit rumah tangga yang masih berada di bawah *threshold* 5% mengindikasikan bahwa kualitas penyaluran kredit masih tetap dalam kondisi yang terjaga.

Grafik 3.14. Pertumbuhan Komposisi Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan

Sumber: LBU BI Sumatera Selatan, diolah

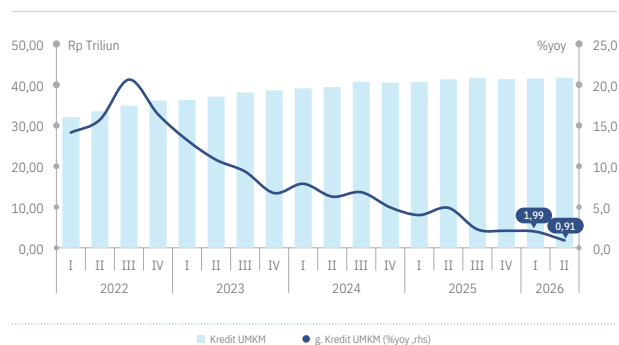
Grafik 3.15. NPL Kredit Rumah Tangga Sumatera Selatan

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

3.3. Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan UMKM

Pada triwulan II 2026, total penyaluran kredit UMKM Provinsi Sumatera Selatan tetap mengalami pertumbuhan meskipun sedikit melambat. Secara umum, kredit yang disalurkan ke sektor UMKM pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan positif yang tercatat sebesar 0,91% (yoy) dengan outstanding sebesar Rp41,70 triliun. Namun demikian, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,90% (yoy).

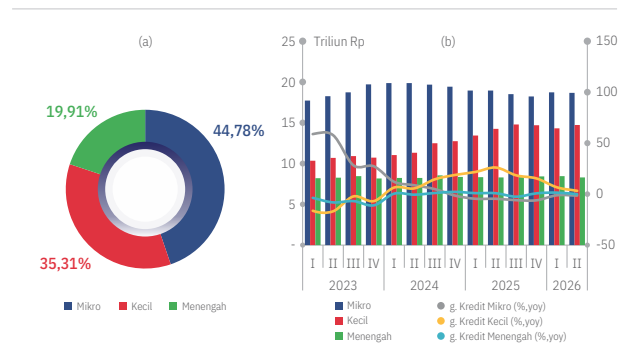
Berdasarkan skala usahanya, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM Sumatera Selatan disumbang oleh penyaluran kredit UMKM skala mikro. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil mencatatkan kinerja yang tetap tumbuh 3,22% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,71%. Di lain sisi, penyaluran kredit UMKM skala mikro mengalami perlambatan sebesar 1,45% (yoy), melanjutkan tren kontraksi di triwulan sebelumnya sebesar 1,12%. Sementara itu, UMKM skala menengah turut berkontraksi sebesar 0,04% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 1,46%. Dari sisi pangsa, penyaluran kredit UMKM pada skala mikro, kecil dan menengah masing-masing sebesar 44,78%, 35,21% dan 19,91%.

Grafik 3.16. Perkembangan Kredit UMKM di Sumatera Selatan (Rp Triliun)

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

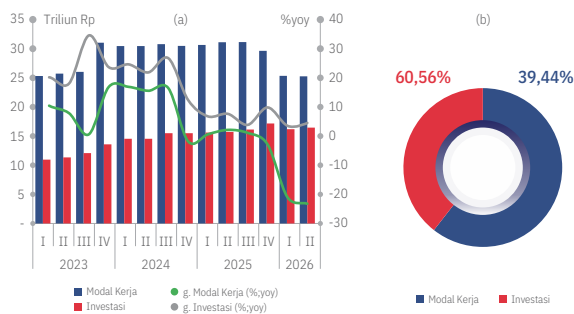
Realisasi penyaluran kredit UMKM Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 juga masih didominasi dengan penyaluran dalam bentuk kredit modal kerja. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM utamanya disalurkan dalam bentuk modal kerja dengan pangsa sebesar 60,56% diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 39,44%. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kebutuhan UMKM di wilayah Sumatera Selatan masih berpusat pada operasional harian daripada akuisisi maupun penambahan aset jangka menengah hingga panjang guna ekspansi usaha. Secara nominal, kredit modal kerja UMKM pada periode laporan mencapai sebesar Rp25,25 triliun atau melambat sebesar 23,22% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,98%. Sementara itu, kredit investasi mencapai sebesar Rp16,45 triliun dengan pertumbuhan sebesar 4,35% (yoy) lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya mencapai sebesar Rp16,17 triliun dengan pertumbuhan 3,54%.

Berdasarkan lapangan usahanya, penyaluran kredit UMKM di Sumatera Selatan masih terfokus pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan. Pangsa penyaluran kredit pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar 40,57%, diikuti oleh LU perdagangan sebesar 33,17%, LU konstruksi sebesar 5,18%, LU industri pengolahan sebesar 3,58%, dan LU

Grafik 3.17. Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Skala Usaha: (a) Pangsa Kredit UMKM; dan (b) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy)

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.18. Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Penggunaan : (a) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy); dan (b) Pangsa Kredit UMKM

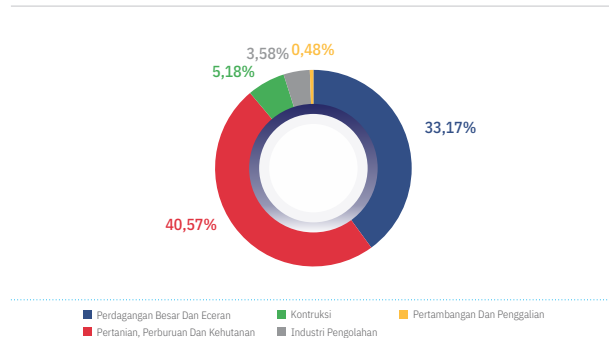


Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

pertambahan sebesar 0,48%. Dominasi LU Pertanian Perburuan, dan Kehutanan serta LU Perdagangan menunjukkan fundamental UMKM sebagai perekonomian daerah cukup *robust* dalam mendukung pertumbuhan daerah secara berkelanjutan melalui penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan konsumsi masyarakat.

Kinerja penyaluran kredit pada LU strategis yang positif turut mendorong pertumbuhan penyaluran kredit UMKM. Pada periode laporan, kinerja penyaluran kredit pada LU pertanian tumbuh positif sebesar 5,57% (yoy) dengan *outstanding* Rp 16,92 triliun sejalan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,81% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp16,65 triliun. Sementara, LU konstruksi dan LU Industri Pengolahan tetap melanjutkan trend positif masih-masing sebesar 18,34% dan 10,23% dengan *outstanding* sebesar Rp2,1 triliun dan Rp1,4 triliun, jika dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 22,04% dan 8,11%. Hal ini antara lain didukung oleh terjaganya aktivitas usaha pada LU utama, tercermin dari membaiknya kinerja subsektor perkebunan dan berlanjutnya aktivitas tanam pada LU pertanian, peningkatan aktivitas investasi dan pembangunan infrastruktur pada LU konstruksi, serta berlanjutnya investasi dan aktivitas hilirisasi komoditas unggulan pada LU industri pengolahan.

Grafik 3.19. Pangsa Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan



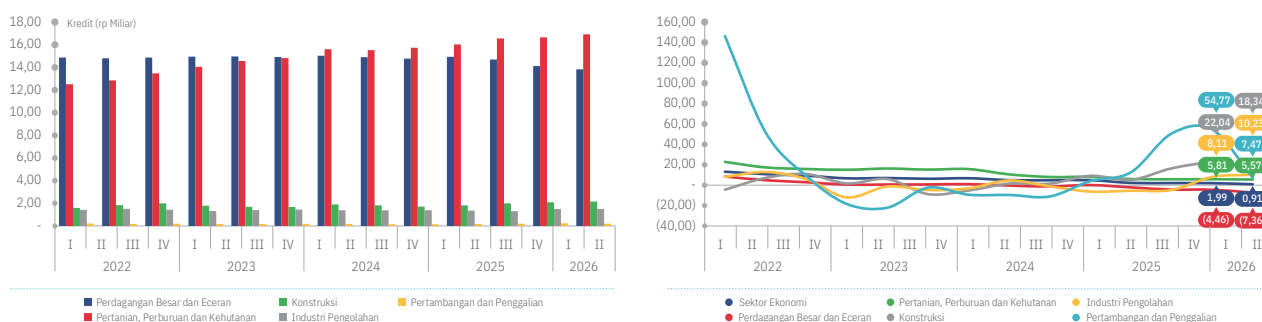
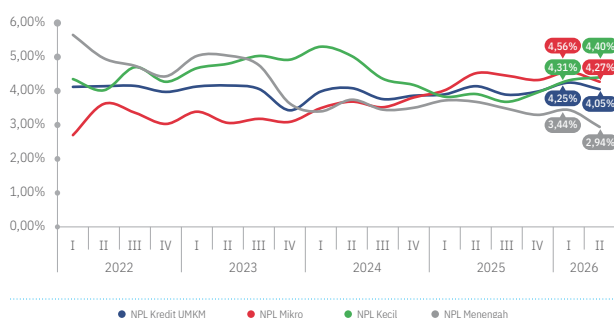
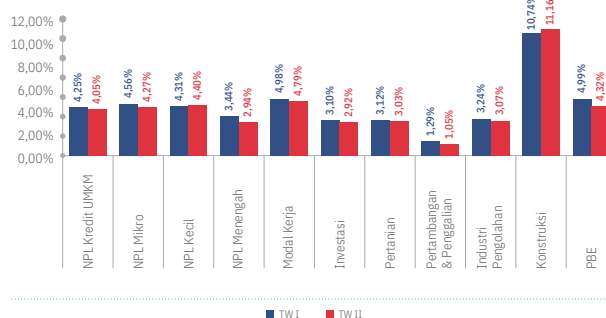
Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

Sejalan dengan LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan tumbuh positif meskipun sedikit melambat, masing-masing sebesar 7,47%, dan 5,57% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 54,77% dan 5,81%. Sementara itu, LU Perdagangan Besar dan Eceran melanjutkan tren terkontraksi masing-masing sebesar 7,36% dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 4,46%.

Secara agregat, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM turut disertai dengan kualitas kredit yang tetap terjaga pada periode laporan. Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan berjalan tercatat sebesar 4,05% atau berada di bawah threshold rasio kredit bermasalah. Kinerja NPL tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 4,35%. Berdasarkan kategori penerima, kualitas kredit UMKM kategori Mikro, dan Menengah mengalami penurunan, secara berurut masing-masing menjadi 4,27% dan 2,94% dari triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 4,56% dan 3,44%. Sementara itu, kualitas kredit UMKM kategori kecil mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,40% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,31%.

Berdasarkan lapangan usaha, NPL penyaluran kredit UMKM masih disumbang utamanya oleh LU Konstruksi dengan rasio 11,16%. Selanjutnya, NPL pada LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) sebesar 4,32%, LU Industri Pengolahan sebesar 3,07%, LU Pertanian sebesar 3,03%, dan LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,05% mempunyai NPL di tingkat yang aman. Tingginya NPL pada Lapangan Usaha Konstruksi dipengaruhi oleh karakteristik proses bisnis yang front-loaded dengan risiko keterlambatan pembayaran dan penyelesaian proyek dan retensi. Kondisi tersebut meningkatkan eksposur terhadap berbagai risiko inheren yang berpotensi meningkatkan rasio NPL. Namun demikian, kualitas kredit UMKM pada LU strategis lainnya relatif terjaga di bawah *threshold* <5%, meskipun kredit pada LU Konstruksi perlu dicermati.

Sebagai bentuk dukungan, Bank Indonesia meluncurkan Program Transformasi Kewirausahaan Terpadu pada 22 Juni 2026. Program tersebut terdiri dari 4 (empat) inisiatif utama, antara lain Cangkir Barista untuk meningkatkan daya saing industri kopi, Citra Nusa untuk memperkuat inovasi desain produk wastra, serta Air Berkah Indonesia, dan Tani Berkah Indonesia untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Program tersebut merupakan pendekatan peningkatan kapasitas agar lebih berdampak melalui pemilihan model bisnis terbaik dari UMKM dan mitra binaan Bank Indonesia. Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan daya saing UMKM, perluasan akses ekonomi dan keuangan, serta penciptaan lapangan kerja.

Grafik 3.20. Pertumbuhan Sektorial Kredit UMKM dan Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Triwulan II 2026**Grafik 3.21. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sumatera Selatan****Grafik 3.22. Perkembangan NPL Kredit Sektorial UMKM Sumatera Selatan**

Guna memperkuat hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas kopi, dilakukan pelatihan barista melalui program Cangkir Barista tingkat wilayah Sumatera Selatan. Pelatihan tersebut diikuti oleh 67 peserta dengan materi pelatihan mencakup terkait tata cara penyajian kopi dan *growth mindset* yang disampaikan oleh salah satu UMKM local *champion*, sebagai upaya memperkuat konsep mentoring kepada pelaku usaha dalam industri sejenis.

Selain itu, dalam upaya memperkuat pengembangan UMKM di Sumatera Selatan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan melakukan peningkatan kapasitas kepada 100 pelaku usaha berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui program Sultan Muda Digital. Pada kegiatan dimaksud, UMKM diberikan pembekalan terkait pengembangan *business model canvas*, manajemen keuangan dan perpajakan untuk usaha, serta pemanfaatan alat pemasaran digital. UMKM peserta terdiri dari sektor makanan dan minuman olahan (54%), wastra dan *ready to wear* (11%), jasa (29%), pangan (3%) dan teknologi (3%).

Selanjutnya, pengembangan ekonomi syariah, khususnya terkait keuangan sosial digital untuk wakaf produktif petani komoditas kelapa sebagai komoditas unggulan di Sumatera Selatan, dilakukan melalui kolaborasi dalam berbagai kegiatan edukasi, antara lain Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera, Digital Kito Galo 7th, dan edukasi di universitas di Kota Palembang.

Upaya tersebut ditujukan untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan sosial syariah melalui pemanfaatan wakaf berbasis digital pada website Satu Wakaf Indonesia, guna mendukung pemberdayaan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah di daerah. Selain itu, penguatan ekosistem halal di Sumatera Selatan diperkuat melalui koordinasi rencana sertifikasi halal produk melalui pembentukan Zona KHAS kuliner dan pemetaan potensi peningkatan juru sembelih halal tersertifikasi dengan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan UIN Halal Center.

BOKS 3 :

FESyar Sumatera 2026 Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional melalui Sinergi dan Transformasi Digital

Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2026 yang diselenggarakan pada 5-7 Juni 2026 di Kota Palembang menjadi momentum penting dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di wilayah Sumatera. Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”, FESyar tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi dan promosi produk-produk ramah muslim, tetapi juga menjadi platform penguatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pembiayaan, pengembangan sektor halal, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Penyelenggaraan FESyar 2026 mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu Sharia Education, Sharia Fair, dan Sharia Economic Forum. Pada aspek edukasi, kegiatan talkshow, workshop, pelatihan, sertifikasi, serta berbagai kompetisi berhasil menjangkau ribuan pengunjung dari seluruh wilayah Sumatera. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan meningkatnya minat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di kalangan generasi muda. Selain itu, pelaksanaan training of trainers bagi content creator, dai, dan daiyah serta sertifikasi nazhir turut memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung pengembangan ekosistem syariah yang berkelanjutan.

Dari sisi pengembangan sektor riil, FESyar Sumatera 2026 melibatkan 172 UMKM unggulan dan ramah muslim dari berbagai wilayah di Sumatera yang bergerak pada sektor

wastra, makanan dan minuman halal, serta produk halal lainnya. Kegiatan pameran dipadukan dengan edukasi digitalisasi sistem pembayaran melalui penggunaan QRIS, termasuk promosi QRIS Tap. Integrasi antara penguatan sektor halal dan digitalisasi pembayaran tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah.

Penguatan akses pembiayaan dilakukan melalui pelaksanaan *Sharia Financing Forum* (SHAFF) dan business matching. Pada rangkaian perhelatan FESyar 2026 berhasil mencatat komitmen pembiayaan syariah sebesar Rp13,7 miliar. Selain itu, transaksi daring melalui marketplace mencapai Rp6,1 miliar dan transaksi luring selama penyelenggaraan kegiatan mencapai Rp1,9 miliar. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa FESyar tidak hanya menghasilkan peningkatan literasi, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha syariah.

Sebagai upaya memperkuat keberlanjutan pengembangan ekonomi syariah, FESyar Sumatera 2026 turut meluncurkan tiga program unggulan. Pertama, Program PESAT (Pesantren Sejahtera Terakselerasi) yang diarahkan untuk mempercepat kemandirian ekonomi pesantren melalui berbagai intervensi ekonomi produktif. Kedua, Program UNGGUL (Upaya Nasionalisasi Gerakan Wakaf untuk Komoditas Unggulan) yang mengintegrasikan instrumen wakaf dengan pengembangan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan produktivitas dan



Gambar 1. Opening Ceremony Fesyar Sumatera 2026 dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Destry Damayanti dan Kepala Satuan Kerja Bank Indonesia



Gambar 2. Dukungan pembiayaan syariah kepada pelaku usaha Songket Pash, Kulaku Indonesia, Awan Kerupuk dan Sultan Muda Card kepada Pelaku Usaha Syariah di Sumatera Selatan

memberikan manfaat ekonomi yang lebih inklusif. Ketiga, Program BERKAH (Bina dan Percepatan Sertifikasi Halal untuk Pariwisata) yang bertujuan mempercepat sertifikasi halal dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah muslim dan penguatan ekosistem industri halal. Ketiga inisiatif tersebut mencerminkan perluasan peran ekonomi syariah sebagai instrumen pembangunan yang mendukung sektor riil dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak penyelenggaraan FESyar Sumatera 2026 turut tercermin dari tingginya antusiasme masyarakat dengan total kunjungan mencapai 71.568 orang serta tingkat pemahaman peserta edukasi yang mencapai 87,16 persen. Selain itu, penyelenggaraan FESyar Sumatera 2026 juga turut dihadiri oleh 620 orang secara luring pada 8 kegiatan talkshow dengan topik terkait ekosistem produk halal, keuangan sosial syariah, gaya hidup ramah muslim dengan turut melibatkan mitra kerja eksyar.



Gambar 3. Perhelatan Tabligh Akbar bersama Habib Syech Abdul Qodir Assegaf dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Cik. Ujang dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Destry Damayanti



Gambar 2. Penjurian lomba Halal Chef Competition sebagai rangkaian kegiatan Fesyar Sumatera



Gambar 2. Pagelaran fashion show karya peserta lomba *Modest Fashion Designer Competition* dan karya UMKM Wastra Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Dekranasda



Gambar 6. Kegiatan Flagship Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Narasumber Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Dadang Muljawan, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., dan SVP SME Business Group PT Bank Syariah Indonesia, Bapak Risqi Widayat

Ke depan, tindak lanjut atas berbagai komitmen pembiayaan, pengembangan pesantren, optimalisasi wakaf produktif, serta percepatan sertifikasi halal menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan dampak FESyar. Sinergi yang semakin kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri keuangan syariah, pelaku usaha, lembaga zakat dan wakaf, serta masyarakat diharapkan dapat mempercepat penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah regional. Melalui berbagai inisiatif tersebut, ekonomi syariah berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru yang mendukung transformasi ekonomi Sumatera Selatan dan kawasan Sumatera secara lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 7. Kunjungan booth UMKM Nirmala Songket oleh Deputi Gubernur Senior, Ibu Destry Damayanti



04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Kinerja sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, baik pada transaksi tunai maupun nontunai, mendukung terjaganya keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026.

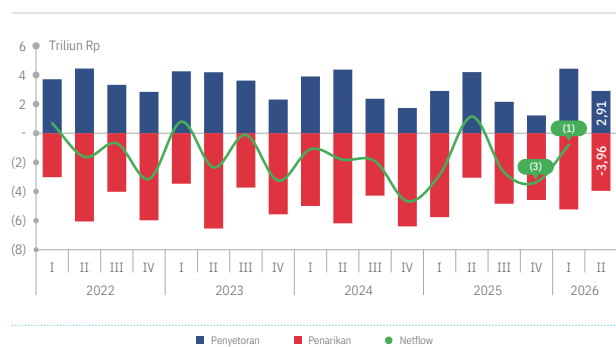
- Sesuai dengan pola historis tahunan, aliran transaksi uang kartal mengalami *net outflow* pada triwulan II 2026.
- Tingginya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan berbasis tunai di sektor-sektor tertentu seperti perdagangan, perkebunan (karet, sawit, kopi), dan UMKM.
- Penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah memicu peningkatan kebutuhan uang tunai, sehingga mendorong terjadinya *net outflow* pada triwulan II 2026.
- Di sisi lain, kinerja sistem pembayaran nontunai pada triwulan II 2026 terus menunjukkan akselerasi, sejalan dengan meningkatnya adopsi instrumen digital di berbagai lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

4.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan II 2026, peredaran uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan *net outflow* yang mengindikasikan peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat dikarenakan karakteristik ekonomi, aktivitas perdagangan, komoditas, UMKM, serta transaksi di wilayah yang penggunaan uang tunainya masih cukup dominan turut mempertahankan kebutuhan uang kartal di masyarakat. Triwulan II laporan mencatatkan peredaran uang kartal di Sumatera Selatan mengalami *net outflow* sebesar Rp. 1,05 triliun. Realisasi *net outflow* tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp. 804 miliar (Grafik 4-1), hal ini dikarenakan pada triwulan II 2026 adanya bantuan sosial PKH di Sumatera Selatan. Transaksi penarikan uang kartal tercatat sebesar Rp3,96 triliun dengan peningkatan sebesar 29,51 % (yoy), sementara transaksi penyeteroran uang kartal pada periode yang sama tercatat sebesar Rp2,9 triliun dengan penurunan sebesar 30,83% (yoy).

Pelaksanaan kegiatan program edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR) secara masif pada triwulan II 2026 turut membangun kesadaran masyarakat dan perbankan terhadap pelaporan uang yang diragukan keasliannya ke Bank Indonesia. Adapun jumlah uang palsu yang dilaporkan pada periode berjalan sejumlah 1.503 lembar, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 1328 lembar. Adapun kegiatan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan secara konsisten yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk di dalamnya instansi perbankan, pendidikan, aparaturnegara, pers, komunitas dan sosial media di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan program ini, diharapkan pemahaman masyarakat dan stakeholders di Sumatera Selatan dalam mengenali dan merawat uang Rupiah dapat terus meningkat, sehingga uang Rupiah yang beredar dimasyarakat dalam kondisi layak edar dan terhindar dari peredaran uang palsu.

Grafik 4.1. Aliran Uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Bank Indonesia, dialih

4.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

4.2.1. Transaksi SKNBI dan BI-RTGS

Perkembangan transaksi pembayaran ritel pada Triwulan II 2026 menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran terus berlanjut, sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menekankan interoperabilitas, efisiensi, dan inklusivitas sistem pembayaran. Di tengah penguatan penggunaan instrumen pembayaran digital, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Triwulan II 2026 masih menunjukkan kinerja yang beragam. Dari sisi nominal, nilai transaksi perputaran kliring tercatat sebesar Rp6,89 triliun atau terkontraksi 0,02% (yoy), membaik signifikan dibandingkan Triwulan I 2026 yang terkontraksi 10,33% (yoy) (Grafik 4-2). Sementara itu, dari sisi volume, jumlah warkat tercatat sebanyak 111,50 ribu warkat, dengan pertumbuhan sebesar -11,74% (yoy) (Grafik 4-3). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas transaksi melalui SKNBI masih relatif terbatas, meskipun kontraksi nominal telah menunjukkan perbaikan. Kondisi ini sejalan dengan berlanjutnya pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha menuju instrumen pembayaran digital non-kliring, khususnya BI-FAST dan QRIS, yang menawarkan transaksi secara *real time*, layanan 24 jam, biaya relatif rendah, serta proses yang cepat dan andal.

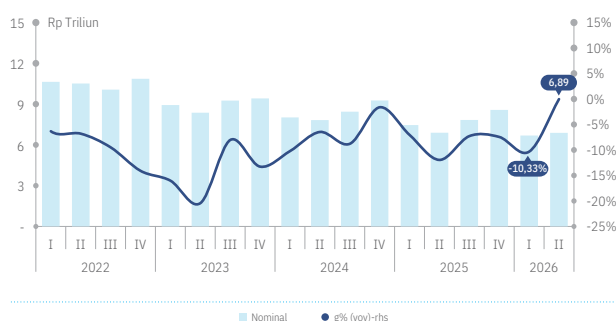
Berbeda dengan SKNBI, aktivitas transaksi melalui BI-RTGS pada Triwulan II 2026 menunjukkan akselerasi baik dari sisi nominal maupun volume transaksi (Tabel 4-1). Dari sisi nominal, nilai transaksi RTGS tercatat sebesar Rp49,12 triliun, meningkat 4,94% (yoy), berbalik arah dibandingkan Triwulan I 2026 yang terkontraksi 19,88% (yoy) (Grafik 4-4). Sementara itu, dari sisi volume, jumlah transaksi tercatat sebanyak 16,24 ribu transaksi, tumbuh 16,14% (yoy), setelah pada Triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 6,38% (yoy) (Grafik 4-5). Akselerasi transaksi RTGS tersebut mengindikasikan kembali meningkatnya aktivitas transaksi bernilai besar di Sumatera Selatan, yang dapat berkaitan dengan peningkatan transaksi korporasi, penyelesaian kewajiban antarbank, serta aktivitas sektor keuangan dan pemerintah. Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi pergeseran transaksi ritel menuju instrumen pembayaran digital yang lebih cepat seperti BI-FAST.

Ke depan, penguatan interoperabilitas dan integrasi antarsistem pembayaran, digitalisasi transaksi korporasi dan pemerintah, serta optimalisasi keterhubungan antara sistem pembayaran wholesale dan retail menjadi faktor penting dalam mendukung sistem pembayaran daerah yang semakin efisien, cepat, aman, dan inklusif. Dengan demikian, perkembangan transaksi SKNBI dan BI-RTGS pada Triwulan II 2026 menunjukkan adanya

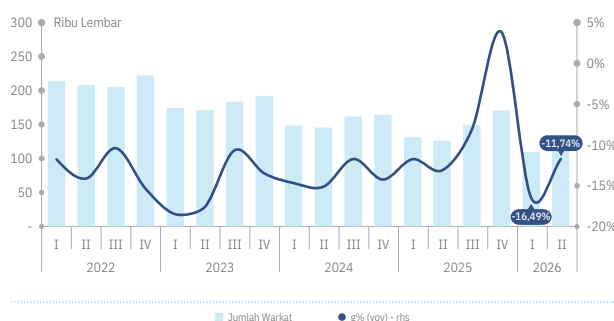
Tabel 4.1. Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
RTGS dari Provinsi Sumsel										
Nilai (Rp Triliun)	34,20	46,85	49,35	64,23	50,86	46,82	65,23	63,42	40,75	49,13
Volume	15.419	15.567	17.133	19.367	16.523	13.982	16.726	19.005	14.358	16.239

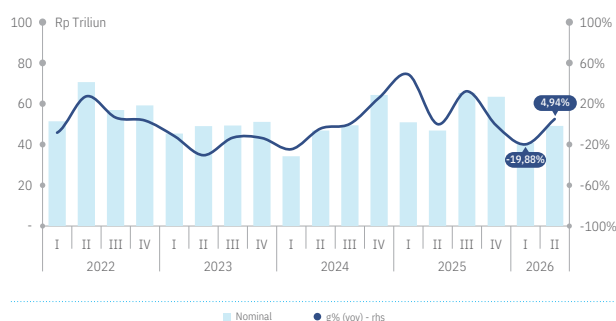
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2. Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Sumatera Selatan

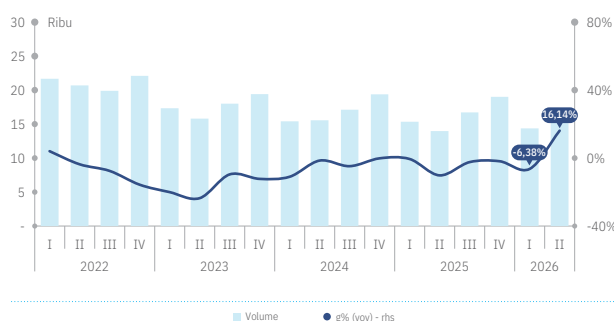
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3. Perkembangan Jumlah Warkat Transaksi Kliring Sumatera Selatan

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Sumatera Selatan

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5. Perkembangan Volume Transaksi RTGS Sumatera Selatan

Sumber: Bank Indonesia, diolah

pergeseran struktur penggunaan instrumen pembayaran, dengan transaksi ritel melalui kliring yang cenderung melemah, sementara aktivitas transaksi bernilai besar melalui RTGS kembali menguat.

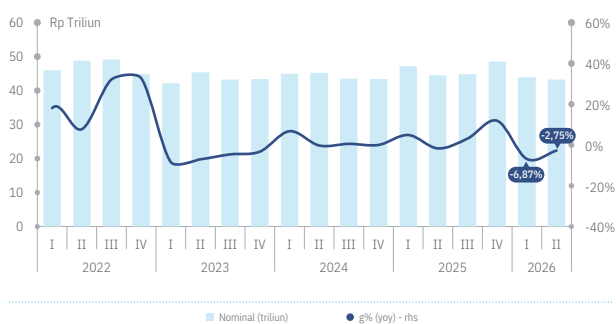
4.2.2. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Transformasi sistem pembayaran nasional sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 menempatkan digitalisasi dan integrasi layanan pembayaran sebagai pendorong utama terciptanya ekosistem transaksi yang semakin seamless, cepat, dan efisien. Perkembangan tersebut turut mendorong perubahan preferensi masyarakat dari transaksi berbasis kartu fisik menuju kanal pembayaran digital, termasuk transfer dan pembayaran berbasis QR. Namun demikian, instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM/Debit, masih memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas transaksi masyarakat di Sumatera Selatan.

Pada Triwulan II 2026, transaksi kartu ATM/Debit menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun masih mengalami kontraksi secara tahunan. Dari sisi nominal, transaksi kartu ATM/Debit tercatat sebesar Rp43,26 triliun, atau terkontraksi 2,75% (yoy), membaik dibandingkan Triwulan I 2026 yang terkontraksi 6,87% (yoy) dengan nominal sebesar Rp43,95 triliun (Grafik 4-6). Sejalan dengan itu, dari sisi volume, transaksi tercatat sebanyak 31,80 juta transaksi, atau terkontraksi 3,33% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 8,16% (yoy) dengan volume sebesar 32,30 juta transaksi (Grafik 4-7). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan penurunan transaksi kartu ATM/Debit mulai mereda pada Triwulan II 2026, seiring dengan tetap berlangsungnya pergeseran sebagian aktivitas pembayaran masyarakat menuju instrumen pembayaran digital berbasis transfer dan QR.

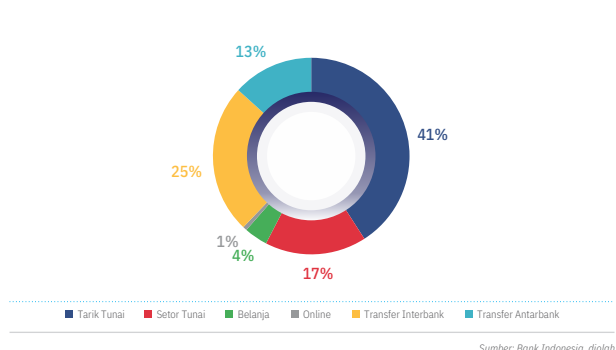
Berdasarkan pangsa transaksi, penggunaan kartu ATM/Debit di Sumatera Selatan masih didominasi oleh transaksi tarik tunai

Grafik 4.6. Nilai Nominal Transaksi Kartu ATM/D



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8. Pangsa Transaksi ATM/D



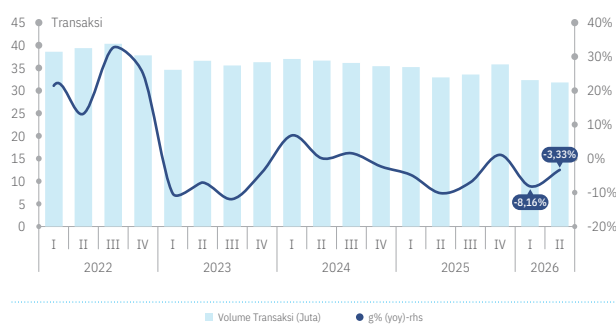
Sumber: Bank Indonesia, diolah

yang mencapai Rp17,69 triliun atau sekitar 40,91% dari total nominal transaksi. Selanjutnya, transaksi transfer intrabank tercatat sebesar Rp10,62 triliun (24,57%), setor tunai sebesar Rp7,22 triliun (16,7%), transfer antarbank sebesar Rp5,75 triliun (13,3%), transaksi belanja sebesar Rp1,67 triliun (3,86%), dan transaksi online sebesar Rp289,22 miliar (0,67%) (Grafik 4-8). Struktur tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama kartu ATM/Debit di Sumatera Selatan masih berorientasi sebagai instrumen akses likuiditas dan perpindahan dana, sementara pemanfaatannya sebagai instrumen pembayaran digital dan e-commerce relatif terbatas.

Ke depan, kondisi tersebut menjadi ruang penguatan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran di daerah, khususnya melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, peningkatan literasi transaksi non-tunai, serta integrasi layanan pembayaran ritel yang lebih interoperabel.

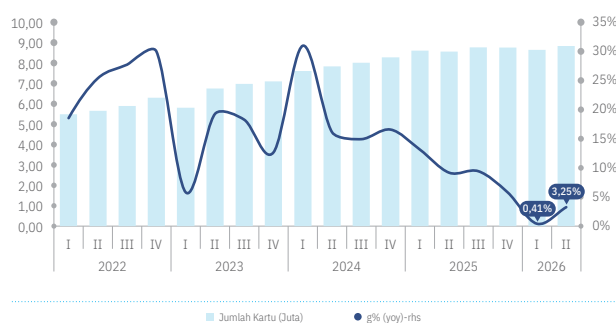
Jumlah kartu ATM/Debit yang beredar di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tercatat tetap meningkat, meskipun dengan laju yang terbatas. Total kartu ATM/Debit yang beredar mencapai 8,83 juta kartu (Grafik 4-9), atau tumbuh sebesar 3,25% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,41% (yoy). Pertumbuhan jumlah kartu yang tetap positif menunjukkan bahwa kartu ATM/Debit masih menjadi bagian penting dari akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan rekening simpanan.

Grafik 4.7. Volume Transaksi Kartu ATM/D



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9. Jumlah Kartu ATM/D

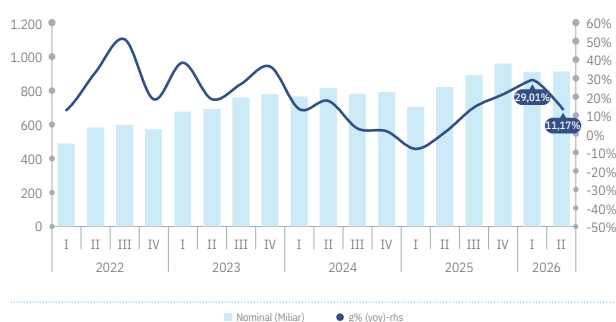


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Transaksi kartu kredit di Sumatera Selatan pada Triwulan II 2026 menunjukkan akselerasi yang cukup kuat, baik dari sisi nominal maupun volume. Dari sisi nominal, transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp912,97 miliar (Grafik 4-10), atau tumbuh 11,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 29,01% (yoy). Sejalan dengan itu, volume transaksi meningkat menjadi 1,07 juta transaksi (Grafik 4-11), atau tumbuh sebesar 23,72% (yoy), melemah dibandingkan pertumbuhan 29,40% (yoy) pada periode sebelumnya. Penguatan tersebut mengindikasikan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran yang menawarkan fleksibilitas transaksi, kemudahan akses, serta integrasi dengan ekosistem digital dan *lifestyle commerce*.

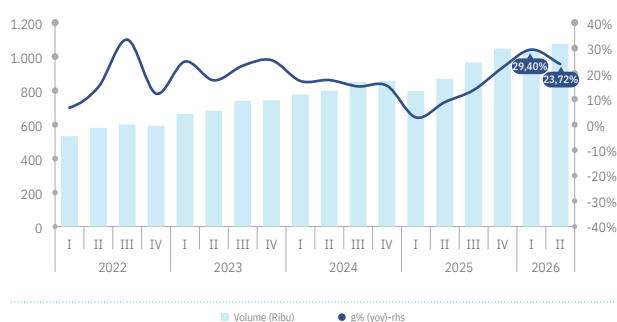
Berdasarkan struktur penggunaannya, transaksi kartu kredit masih didominasi oleh aktivitas belanja yang mencapai Rp891,72 miliar atau sekitar 98,12% dari total transaksi (Grafik 4-12). Sementara itu, transaksi tarik tunai tercatat sebesar Rp12,76 miliar (1,40%) dan pembayaran tagihan (*bill payment*) sebesar Rp4,29 miliar (0,47%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kartu kredit di Sumatera Selatan utamanya dimanfaatkan sebagai instrumen konsumsi ritel dan pembayaran *merchant*, dengan penggunaan untuk kebutuhan likuiditas tunai yang relatif terbatas. Di sisi lain, jumlah kartu kredit yang beredar juga terus meningkat dan mencapai 319 ribu kartu pada triwulan II 2026 (Grafik 4-13), atau tumbuh sebesar

Grafik 4.10. Nominal Transaksi Kartu Kredit



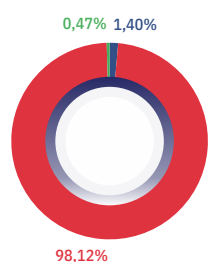
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11. Volume Transaksi Kartu Kredit



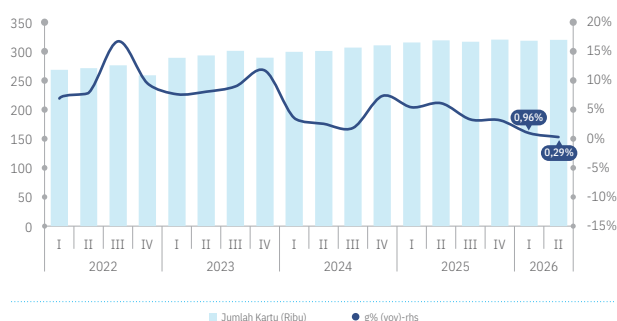
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12. Pangsa Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13. Jumlah Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

0,29% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan bahwa penetrasi instrumen pembayaran berbasis kredit masih terus berkembang, meskipun secara lebih gradual dibandingkan pertumbuhan transaksi.

Meskipun ekosistem pembayaran digital berbasis transfer dan QR terus berkembang, kartu kredit masih mempertahankan perannya pada segmen konsumsi tertentu yang membutuhkan fleksibilitas pembayaran dan berbagai fitur nilai tambah, seperti cicilan, *reward*, dan integrasi dengan platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi sistem pembayaran tidak sepenuhnya menggantikan instrumen berbasis kartu, melainkan mendorong terbentuknya pola pembayaran yang semakin terdiversifikasi sesuai kebutuhan pengguna.

4.3. Perkembangan Transaksi Elektronifikasi dan E-Commerce

Sejalan dengan akselerasi transformasi digital dan perluasan ekosistem pembayaran nontunai, kinerja uang elektronik (UE) di Sumatera Selatan terus menunjukkan penguatan yang solid. Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya adopsi instrumen pembayaran digital oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan transaksi ritel maupun transfer dana, yang sekaligus memperkuat efisiensi sistem pembayaran daerah.

Pada triwulan II 2026, nilai transaksi UE di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp3,98 triliun atau tumbuh 30,34% (yoy). Dari

sisi volume, transaksi UE mencapai 39,34 juta transaksi, meningkat 26,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 37,12 juta transaksi.

Dari sisi *outstanding*, jumlah uang elektronik yang beredar menurun menjadi 8,72 juta instrumen pada triwulan laporan, tumbuh sebesar 23,07% (yoy) (Grafik 4-14). Pertumbuhan tersebut mengindikasikan peningkatan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital yang praktis dan efisien, sekaligus mencerminkan masih kuatnya ekspansi basis pengguna oleh penyelenggara jasa pembayaran melalui berbagai strategi akuisisi, promosi, dan integrasi layanan digital.

Penguatan ekosistem UE turut didukung oleh peningkatan infrastruktur pembayaran digital. Jumlah reader UE di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 10.459 unit atau tumbuh 206,18% (yoy). Pertumbuhan tersebut menunjukkan berlanjutnya perluasan titik akseptasi pembayaran nontunai, khususnya pada sektor perdagangan ritel, SPBU, parkir, serta sektor jasa lainnya. Namun demikian, pertumbuhan reader yang relatif lebih moderat dibandingkan pertumbuhan jumlah instrumen dan transaksi mengindikasikan bahwa optimalisasi utilisasi infrastruktur eksisting masih menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan transaksi UE di daerah.

Tabel 4.2. Perkembangan Transaksi Penggunaan Uang Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan

Transaksi	I 2025		II 2025		III 2025		IV 2025		I 2026		II 2026	
	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal
Belanja	26.162	2.018	27.312	2.036	29.019	2.222	32.323	2.612	32.497	2.617	34.420	2.654
Transfer	3.389	770	3.200	768	3.437	864,7	3.836	1.215	4.240	1.190	4.321	1.177
Tarik Tunai	255	89	274	82	339	104	367	126	383	136	601	155
TOTAL	29.806	3.646	30.786	2.887	30.786	3.191	36.526	3.952	37.120	3.942	39.342	3.986

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan struktur penggunaannya, transaksi belanja masih mendominasi dengan pangsa sebesar 66,58% atau senilai Rp2,65 triliun. Selanjutnya, transaksi transfer tercatat sebesar Rp1,17 triliun dengan pangsa 29,52%, sementara transaksi tarik tunai relatif terbatas sebesar Rp155 miliar atau 3,90% dari total transaksi UE. Komposisi tersebut menegaskan bahwa fungsi utama UE di Sumatera Selatan semakin terkonsentrasi sebagai instrumen pembayaran ritel dan transfer dana yang cepat, mudah, dan efisien, sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap transaksi digital bernilai kecil hingga menengah.

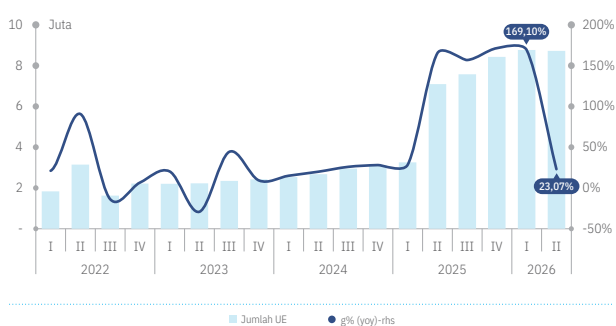
Pada triwulan II 2026, Kota Palembang masih menjadi wilayah dengan dominasi tertinggi dalam penggunaan uang elektronik (UE) di Provinsi Sumatera Selatan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Berdasarkan distribusi transaksi antarwilayah, Palembang mencatat pangsa sebesar 53,38% terhadap total nilai transaksi UE provinsi dan menyumbang sekitar 61,07% dari total volume transaksi UE. Dominasi tersebut menegaskan posisi Palembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa yang menjadi motor utama perkembangan transaksi digital di Sumatera Selatan.

Dari sisi nominal transaksi, kontribusi Palembang tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sementara wilayah lain masih menunjukkan pangsa yang relatif terbatas dan tersebar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi berbasis transaksi digital masih terpusat pada kawasan perkotaan dengan intensitas perdagangan dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Sementara

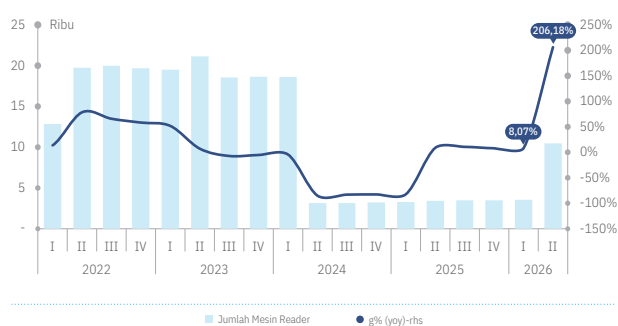
itu, dari sisi volume transaksi, dominasi Palembang yang bahkan melampaui pangsa nominalnya menunjukkan tingginya frekuensi penggunaan UE untuk transaksi sehari-hari bernilai kecil hingga menengah, khususnya pada sektor ritel, transportasi, makanan dan minuman, serta layanan berbasis aplikasi digital.

Kuatnya posisi Kota Palembang didukung oleh infrastruktur sistem pembayaran digital yang lebih berkembang dibandingkan wilayah lainnya, antara lain melalui ketersediaan merchant QRIS dan UE yang lebih luas, jaringan reader yang memadai, serta integrasi layanan pembayaran dengan berbagai platform digital. Selain itu, karakteristik masyarakat perkotaan yang relatif lebih adaptif terhadap inovasi teknologi turut mempercepat penetrasi transaksi non-tunai di kota tersebut. Peran Palembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, pemerintahan, dan jasa juga menjadi faktor utama yang menciptakan ekosistem transaksi digital yang lebih aktif dan terkonsentrasi.

Di sisi lain, ketimpangan pangsa transaksi antara Palembang dan daerah lainnya menunjukkan bahwa tingkat adopsi pembayaran digital di Sumatera Selatan masih belum merata. Wilayah di luar Palembang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur digital, tingkat literasi keuangan masyarakat yang bervariasi, serta skala aktivitas ekonomi yang relatif lebih kecil. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa akselerasi digitalisasi pembayaran masih perlu diperkuat secara lebih inklusif agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata di seluruh kabupaten/kota.

Grafik 4.14. Jumlah UE

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15. Jumlah UE reader

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan penyelenggara jasa pembayaran terus memperkuat berbagai strategi perluasan ekosistem pembayaran digital, antara lain melalui peningkatan akseptasi QRIS dan UE, perluasan edukasi dan literasi transaksi non-tunai, serta penguatan kolaborasi dengan sektor perdagangan, transportasi, UMKM, dan layanan publik. Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong pemerataan digitalisasi sistem pembayaran, memperkuat inklusi keuangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Sumatera Selatan terus mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dan pelaku usaha menuju penggunaan pembayaran nontunai. Dalam perkembangan tersebut, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) menjadi salah satu instrumen yang mendukung perluasan digitalisasi pembayaran dengan menyediakan standar pembayaran berbasis kode QR yang terintegrasi. Pemanfaatan QRIS tidak hanya memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas akses terhadap layanan pembayaran digital serta meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.

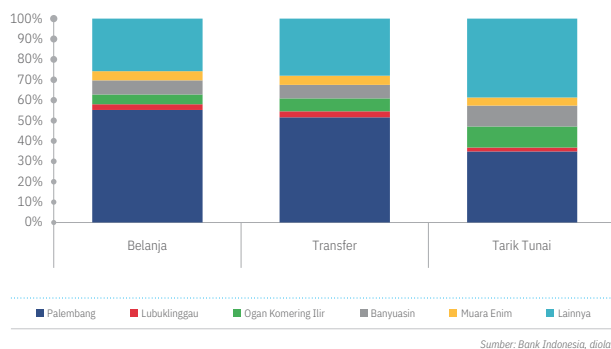
Pada triwulan I 2026, nilai transaksi QRIS di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp8,45 triliun atau tumbuh

53,56% (yoy). Di sisi lain, jumlah *merchant* QRIS mencapai 1.18 juta merchant atau meningkat sebesar 17,76% (yoy) (Grafik 4-18). Berdasarkan distribusinya, sebagian besar merchant QRIS di Sumatera Selatan masih terkonsentrasi di Kota Palembang dengan pangsa mencapai 48,99% dari total merchant, diikuti Kabupaten Banyuasin sebesar 7,84%. Namun demikian, seiring dengan semakin berkembangnya ekosistem pembayaran digital, penggunaan QRIS mulai semakin meluas ke berbagai kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa adopsi QRIS tidak hanya tumbuh di pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga mulai meningkat di daerah lainnya, didukung oleh perluasan akses dan literasi digital serta berbagai upaya untuk mendorong penggunaan pembayaran nontunai. (Grafik 4-19).

Perluasan digitalisasi ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan turut tercermin dari implementasi penyaluran bantuan sosial secara nontunai, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pemanfaatan mekanisme pembayaran digital dalam penyaluran bantuan sosial mendukung terciptanya proses distribusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempermudah akses masyarakat penerima manfaat terhadap bantuan yang diberikan.

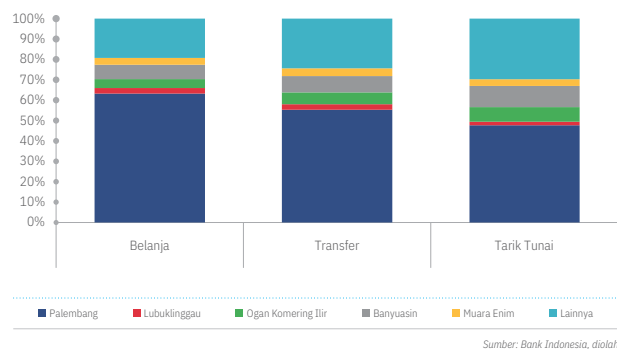
Pada triwulan II 2026, penyaluran PKH di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau sekitar 336 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai bantuan sebesar

Grafik 4.16. Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Nominal



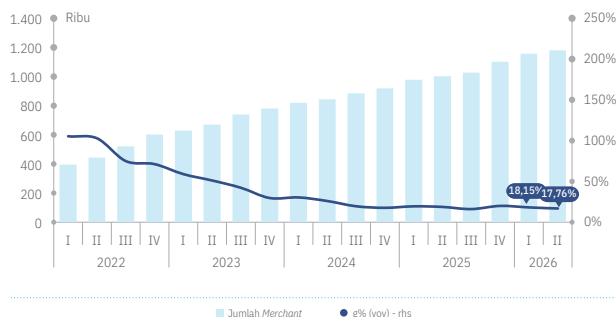
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17. Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Volume



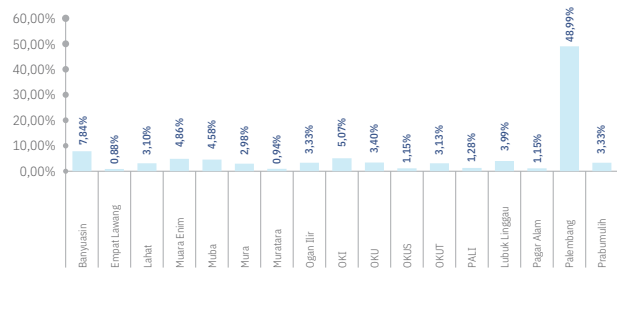
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18. Jumlah Merchant QRIS

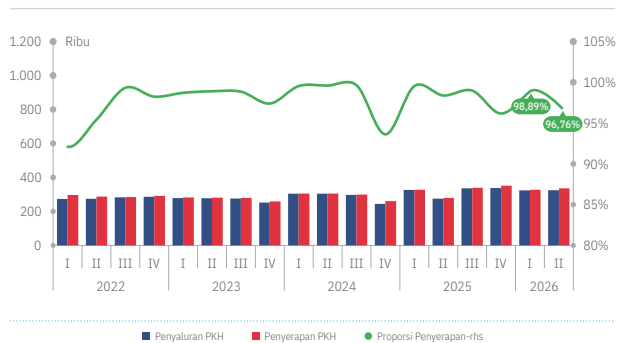


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19. Persebaran Merchant QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20. Proporsi Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Rp252,99 miliar. Tingkat penyerapan tercatat sebesar 96,76%, menurun dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 98,89% (Grafik 4-20). Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan telah berhasil disalurkan kepada KPM. Adapun sebagian dana yang telah masuk ke rekening penerima belum seluruhnya ditarik atau dimanfaatkan, sehingga secara administratif telah tercatat tersalurkan namun belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi penyerapan.

Ke depan, penguatan implementasi PKH perlu didukung oleh koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penyalur, serta pendamping sosial. Penguatan kualitas dan validitas data penerima manfaat, pemutakhiran data secara berkala, serta peningkatan kapasitas pendamping menjadi aspek penting untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria. Di sisi lain, edukasi kepada KPM mengenai pengelolaan dan pemanfaatan bantuan secara tepat juga perlu terus ditingkatkan agar bantuan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi turut mendukung peningkatan kesejahteraan penerima secara berkelanjutan. Melalui penguatan tata kelola dan sinergi antarpemangku kepentingan, pelaksanaan PKH di Sumatera Selatan diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

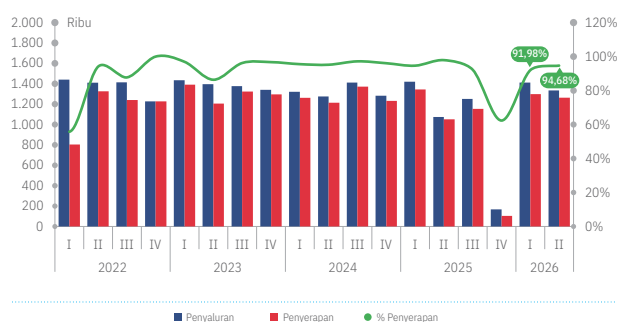
Pelaksanaan Program Sembako sebagai salah satu bentuk bantuan sosial nontunai di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Penerapan mekanisme pembayaran nontunai dalam program tersebut mendukung proses distribusi bantuan yang lebih efisien, transparan, dan memberikan kemudahan akses bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pada triwulan II 2026, bantuan Program Sembako secara nontunai telah diterima oleh sekitar 1,33 juta KPM dengan total nilai mencapai Rp266,85 miliar. Tingkat penyerapan tercatat sebesar 94,68% (Grafik 4-21 dan Grafik 4-22). Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan sosial, baik PKH maupun

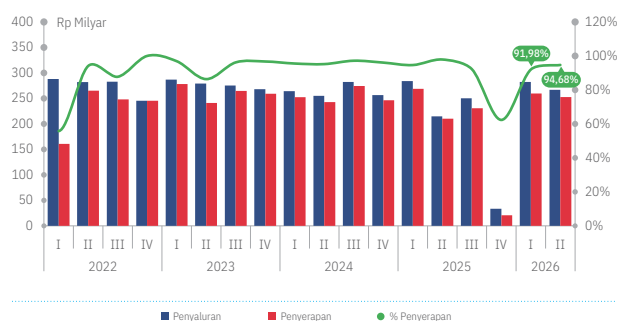
Program Sembako, dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara tunai melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan secara nontunai melalui bank Himbara, yang terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Di Sumatera Selatan, ekosistem penyaluran bantuan sosial nontunai didukung oleh pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan jaringan agen perbankan yang telah tersedia hingga wilayah kecamatan. Dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi KPM untuk melakukan transaksi pencairan maupun pemanfaatan bantuan, dengan proses yang lebih praktis dan efisien. Ke depan, perluasan akses infrastruktur layanan keuangan serta penguatan literasi keuangan dan digital masyarakat menjadi faktor penting untuk mendukung peningkatan efektivitas dan kualitas penyaluran bantuan sosial nontunai di Sumatera Selatan.

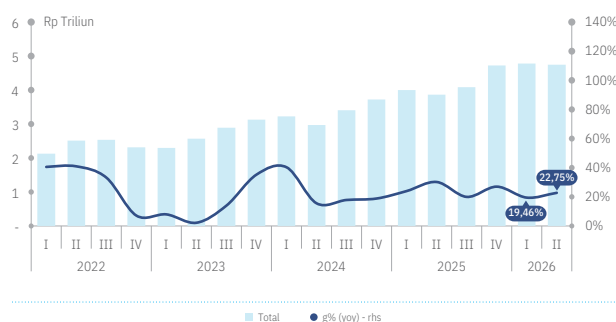
Aktivitas transaksi *e-commerce* di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 terus menunjukkan perkembangan positif, sejalan dengan semakin tingginya pemanfaatan platform *e-commerce* oleh masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan semakin kuatnya preferensi masyarakat dalam melakukan aktivitas belanja secara daring, yang didukung oleh kemudahan akses teknologi, ketersediaan platform digital, serta semakin beragamnya pilihan metode pembayaran.

Grafik 4.21. Proporsi Penyaluran Jumlah KPM Bantuan Sembako

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22. Proporsi Penyaluran Nominal Bantuan Sembako

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23. Nominal transaksi *E-commerce*

Sumber: Beberapa marketplace terbesar di Indonesia, diolah

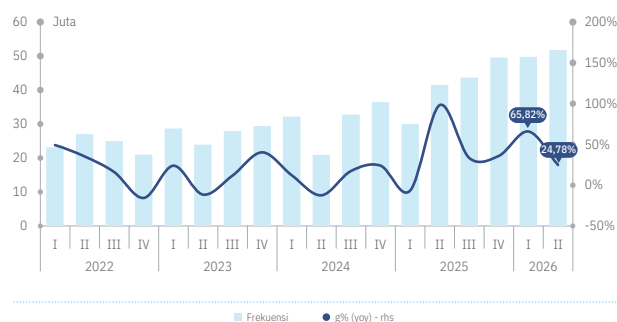
Pada triwulan II 2026, nominal transaksi *e-commerce* di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp4,74 triliun atau tumbuh 22,75% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 19,46% (yoy) (Grafik 4-23). Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan *platform e-commerce*, didukung oleh terjaganya daya beli, bertambahnya pengguna *platform* digital, serta kemudahan dan fleksibilitas dalam melakukan pembayaran.

Dari sisi volume, jumlah transaksi *e-commerce* pada triwulan II 2026 mencapai 51,79 juta transaksi atau tumbuh sebesar 24,78% (yoy). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 49,79 juta transaksi, meskipun laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 65,82% (yoy) (Grafik 4-24). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap aktivitas belanja daring masih terjaga. Kondisi ini turut didukung oleh semakin baiknya layanan logistik dan pengiriman, serta semakin beragamnya strategi promosi pada platform *e-commerce* yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara daring.

4.4. Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Kinerja transaksi Uang Kertas Asing (UKA) pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 tetap menunjukkan tren positif. Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat dan kebutuhan valuta asing untuk mendukung berbagai aktivitas, antara lain perjalanan internasional, keperluan pendidikan, serta kegiatan usaha.

Pada triwulan II 2026, total nominal transaksi KUPVA BB di Sumatera Selatan mencapai Rp30,08 miliar, meningkat 23,03% (yoy). Dari jumlah tersebut, transaksi pembelian tercatat sebesar Rp14,99 miliar atau tumbuh 24,68% (yoy), sedangkan

Grafik 4.24. Frekuensi transaksi *E-commerce*

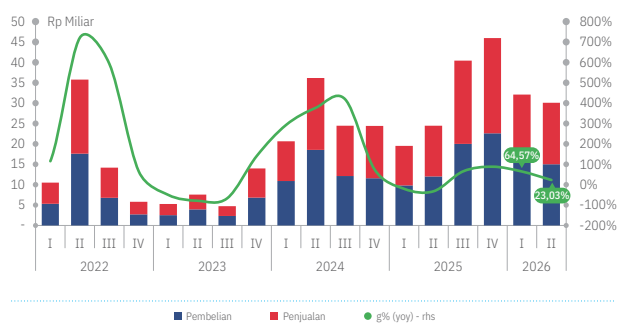
Sumber: Beberapa marketplace terbesar di Indonesia, diolah

transaksi penjualan mencapai Rp15,09 miliar atau tumbuh 21,44% (yoy). Pertumbuhan transaksi tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap valuta asing, yang turut didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan perjalanan ke luar negeri.

Ke depan, perkembangan transaksi KUPVA BB diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh dinamika permintaan valuta asing dari masyarakat maupun pelaku usaha serta perkembangan kanal transaksi yang semakin beragam. Di sisi lain, penguatan pengawasan dan tata kelola oleh Bank Indonesia perlu terus dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha penukaran valuta asing berlangsung secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan penukaran valuta asing di daerah.

Selain aktivitas penukaran valuta asing, perkembangan sistem pembayaran di Sumatera Selatan turut tercermin dari kinerja transfer dana masuk yang menunjukkan dinamika yang beragam. Transfer dana domestik masih tumbuh relatif tinggi, sementara transfer dana masuk dari luar negeri masih mencatatkan kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 4.25. Perkembangan Transaksi KUPVA BB Sumatera Selatan



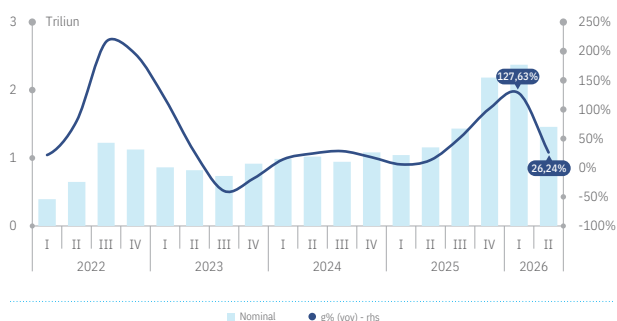
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Ke depan, perkembangan transaksi KUPVA BB diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh dinamika permintaan valuta asing dari masyarakat maupun pelaku usaha serta perkembangan kanal transaksi yang semakin beragam. Di sisi lain, penguatan pengawasan dan tata kelola oleh Bank Indonesia perlu terus dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha penukaran valuta asing berlangsung secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan penukaran valuta asing di daerah.

Selain aktivitas penukaran valuta asing, perkembangan sistem pembayaran di Sumatera Selatan turut tercermin dari kinerja transfer dana masuk yang menunjukkan dinamika yang beragam. Transfer dana domestik masih tumbuh relatif tinggi, sementara transfer dana masuk dari luar negeri masih mencatatkan kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

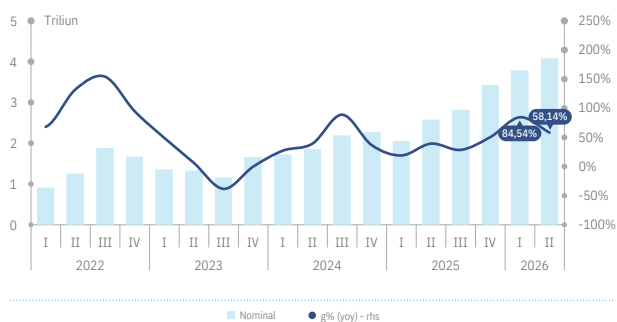
Pada triwulan II 2026, nominal transfer dana masuk (*incoming*) domestik ke Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp1,46 triliun atau tumbuh 26,24% (yoy). Meskipun masih tumbuh kuat, capaian tersebut melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 127,63% (yoy) dengan nominal mencapai Rp2,37 triliun (Grafik 4-26). Pertumbuhan *incoming* domestik tersebut mencerminkan masih tingginya aktivitas transaksi dan

Grafik 4.26. Transfer Dana Domestik-Incoming



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28. Transfer Dana Domestik-Outgoing



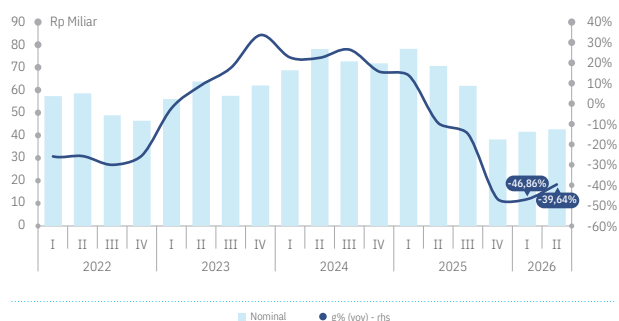
Sumber: Bank Indonesia, diolah

perpindahan dana antarwilayah yang didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan penggunaan kanal transaksi digital.

Di sisi lain, nominal transfer dana masuk yang bersumber dari luar negeri pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp42,65 miliar atau terkontraksi 39,64% (yoy). Kinerja tersebut relatif stagnan dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 46,86% (yoy) (Grafik 4-27). Penurunan *incoming* luar negeri tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih terbatasnya aliran dana internasional ke daerah, termasuk dari aktivitas remitansi maupun transaksi lintas negara lainnya. Ke depan, perkembangan transfer dana masuk diperkirakan tetap dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi domestik dan global, serta semakin luasnya pemanfaatan layanan transaksi keuangan digital.

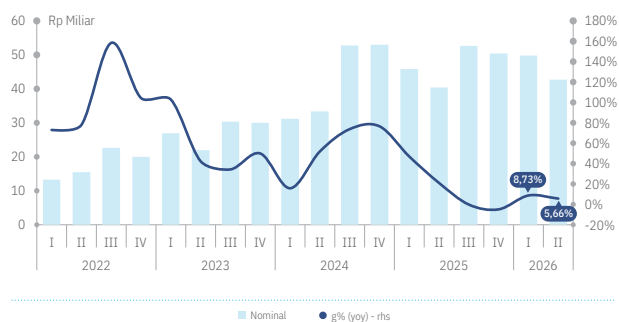
Berbeda dengan perkembangan transfer dana masuk (*incoming*), kinerja transfer dana keluar (*outgoing*) di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan, baik dari transaksi domestik maupun transaksi luar negeri. Pada triwulan II 2026, nominal transfer dana keluar domestik dari Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp4,08 triliun atau tumbuh 58,14% (yoy). Meskipun tetap tumbuh positif, capaian tersebut melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 84,54% (yoy) dengan nominal sebesar Rp3,78 triliun (Grafik 4-28). Peningkatan *outgoing* domestik

Grafik 4.27. Transfer Dana Luar Negeri-incoming



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.29. Transfer Dana Luar Negeri-Outgoing



Sumber: Bank Indonesia, diolah

tersebut mencerminkan masih tingginya aktivitas transaksi antarwilayah, termasuk untuk kebutuhan pembayaran kegiatan usaha serta berbagai aktivitas konsumsi dan perdagangan.

Sementara itu, nominal transfer dana keluar dari Sumatera Selatan ke luar negeri pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp42,66 miliar atau tumbuh 5,66% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,73% (yoy) (Grafik 4-29). Dari sisi frekuensi, transaksi *outgoing* luar negeri tercatat sebanyak 3,01 ribu transaksi atau tumbuh 32,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 12,92% (yoy). Perbedaan arah pertumbuhan antara nominal dan frekuensi transaksi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas transfer ke luar negeri didominasi oleh transaksi dengan nilai nominal yang relatif lebih kecil. Ke depan, perkembangan transfer dana *outgoing* diperkirakan tetap dipengaruhi oleh dinamika aktivitas perdagangan, kebutuhan transaksi lintas negara, serta semakin luasnya penggunaan layanan transfer dana digital oleh masyarakat dan pelaku usaha.

BOKS 4 :

Digital Kito Galo (DKG) 7th x Gemilang Palembang Raya Tahun 2026: Sinergi Digitalisasi untuk Penguatan Ekonomi Sumatera Selatan



Gambar 1. Opening Ceremony Digital Kito Galo 7th x Gemilang Palembang Raya

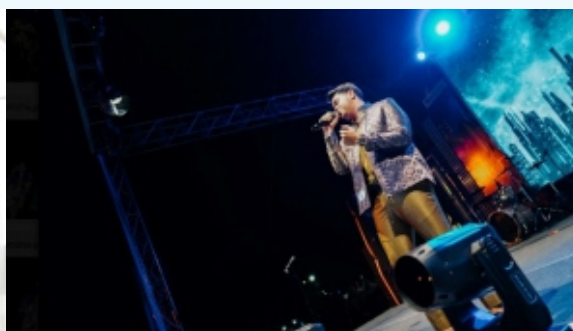
Transformasi digital menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Gemilang Palembang Raya (GPR) x Digital Kito Galo (DKG) 7th Tahun 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kota Palembang pada 25–28 Juni 2026 di Plaza Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang. Mengusung tema “Transaksi Digital Inklusif, Wujudkan Ekonomi Sumsel yang Produktif”, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian *Road to Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2026*.

Untuk pertama kalinya, GPR berkolaborasi dengan DKG menghadirkan rangkaian kegiatan yang mengintegrasikan digitalisasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk promosi pariwisata di wilayah Sumatera Selatan. Digital Expo, festival kuliner dan UMKM, aktivasi QRIS, edukasi transaksi non-tunai, *talkshow* interaktif, *showcase* inovasi

digital, serta berbagai lomba kreatif menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan teknologi digital sekaligus memperkuat sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pendekatan kreatif juga dihadirkan melalui Lomba Fotografi “Digitalisasi dalam Lensa” yang mengangkat potret transformasi digital, aktivitas ekonomi, dan kekayaan budaya selama penyelenggaraan GPR x DKG 7th.

Penguatan ekosistem digital diwujudkan melalui sejumlah agenda strategis, antara lain komitmen integrasi materi kebanksentralan, digitalisasi pembayaran, dan Cinta Bangga Paham Rupiah ke dalam kurikulum SMA/SMK se-Sumatera Selatan, implementasi QRIS di pondok pesantren, dukungan digitalisasi pembayaran pada Festival Kuliner Nusantara Kota Palembang, serta pengembangan talenta digital melalui Bootcamp Sultan Muda Digital. Inovasi Wakafein turut mengintegrasikan transaksi QRIS dengan aktivitas wakaf. Rangkaian inisiatif tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya diarahkan pada transaksi, tetapi juga dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan sosial masyarakat.

Pelaksanaan GPR x DKG 7th juga diperkuat melalui sinergi lintas stakeholder, baik pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, komunitas, maupun penyedia layanan transportasi. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan BPKARSS/LRT Sumatera Selatan berupa promo tarif perjalanan LRT sebesar Rp43 selama periode 25–28 Juni 2026 untuk sejumlah rute strategis, antara lain Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Ampera, DJKA, Bumi Sriwijaya, dan



Gambar 2. Sinergi dengan stakeholder dan Pelaksanaan Lomba-Lomba

Asrama Haji. Sinergi ini memperkuat aksesibilitas masyarakat menuju lokasi kegiatan sekaligus mendukung pemanfaatan transportasi publik sebagai bagian dari ekosistem pariwisata dan aktivitas ekonomi daerah.

Setelah berlangsung selama empat hari, GPR x DKG 7th 2026 resmi ditutup pada 28 Juni 2026. Rangkaian kegiatan menjadi ruang kolaborasi bagi masyarakat, pelaku UMKM, komunitas kreatif, industri jasa keuangan, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi digital dan pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan peluang untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperkenalkan kekayaan budaya Sumatera Selatan kepada masyarakat yang lebih luas.

Melalui kolaborasi GPR x DKG 7th 2026, digitalisasi ditempatkan sebagai enabler dalam menghubungkan

potensi UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, dan konektivitas masyarakat dengan peluang ekonomi yang lebih luas. Sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk memastikan transformasi digital tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.



Gambar 3. Closing Ceremony Digital Kito Galo 7th x Gemilang Palembang Raya



Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah



Pada triwulan II 2026, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga.

- TPAK di Sumatera Selatan masih menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, meski sedikit mengalami penurunan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
- Di sisi lain, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan II 2026 menunjukkan sebagian besar pendapatan masyarakat saat ini lebih baik dibandingkan 6 bulan lalu dan tetap optimis akan meningkat ke depan.
- Optimisme dan aktivitas ekonomi tersebut turut tercermin pada membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP).

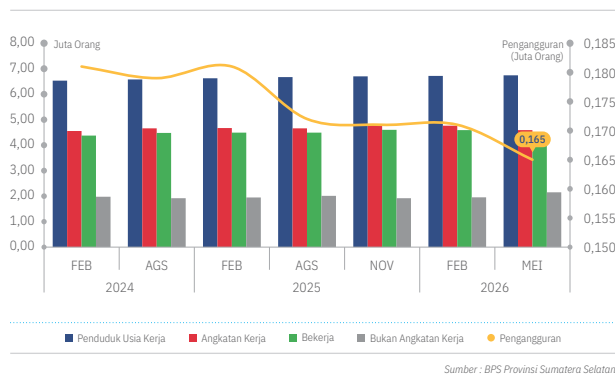
5.1. Kondisi Ketenagakerjaan

Pada triwulan II 2026, kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut tercermin dari beberapa indikator, antara lain penurunan jumlah pengangguran, tingkat keyakinan konsumen yang tetap berada pada level optimis, penurunan jumlah penduduk miskin, serta penurunan rasio gini yang mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat.

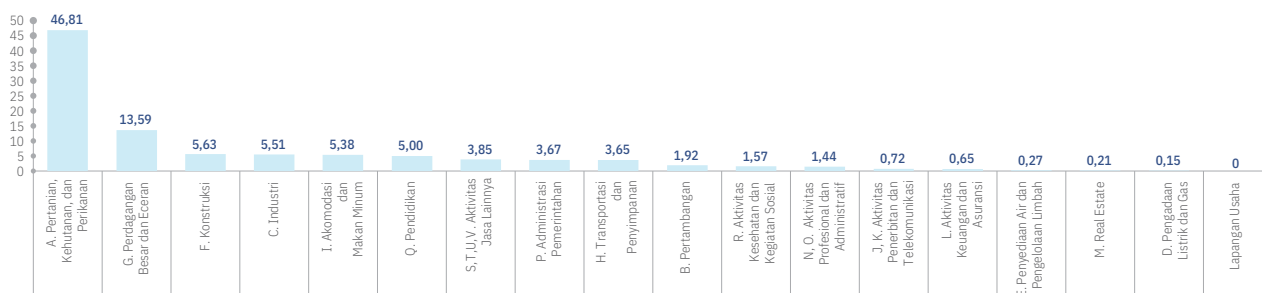
5.1.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Sejalan dengan pertambahan penduduk, jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Sumatera Selatan pada Mei 2026 tercatat sebesar 6,74 juta orang, meningkat 0,33% dibandingkan Februari 2026. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 4,59 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 2,15 juta orang. Dibanding Februari 2026, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing berkurang sebanyak 175 ribu orang atau sebesar 3,61% (qtq) dan 169 ribu orang atau sebesar 3,72% (qtq), sementara jumlah pengangguran menurun sebesar 6 ribu orang atau sebesar 3,51% (qtq).

Grafik 5.1. Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Sumatera Selatan (Juta orang), 2024-2026



Grafik 5.3. Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Sumatera Selatan (%)



5.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

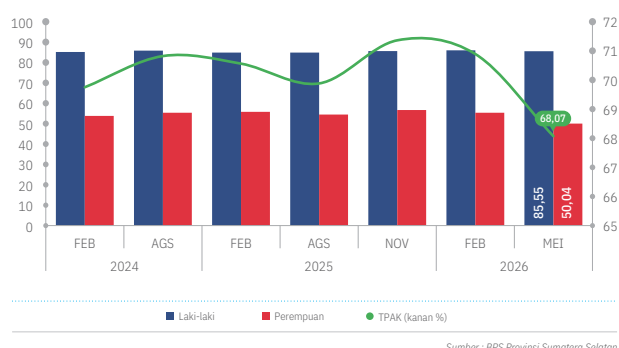
TPAK di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. TPAK Sumatera Selatan pada Mei 2026 sebesar 68,07%, turun 2,82 persen poin dibanding Februari 2026.

TPAK laki-laki tercatat sebesar 85,55%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 50,04%. Dibandingkan Februari 2026, TPAK laki-laki turun sebesar 0,39 persen poin, sedangkan TPAK perempuan turun sebesar 5,31 persen poin.

5.1.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada LU utama penopang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, yaitu LU Pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Konstruksi. Komposisi penduduk bekerja menurut LU dapat menggambarkan struktur tenaga kerja dalam pasar. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, tiga LU yang menyerap tenaga kerja paling banyak di

Grafik 5.2. Perkembangan TPAK di Sumatera Selatan, 2024-2026 (dalam %)

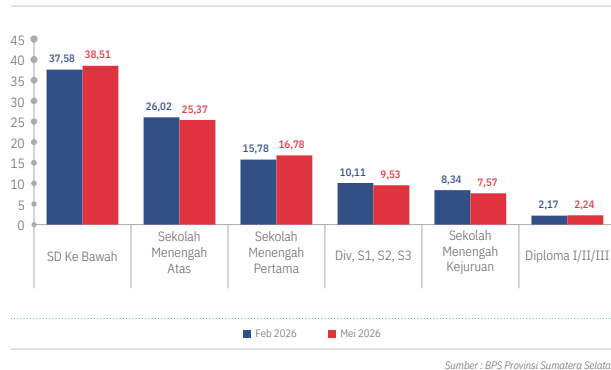


Sumatera Selatan, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 46,81%, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,59%, dan Konstruksi sebesar 5,63%. Faktor pendorong penyerapan tenaga kerja terbesar di LU pertanian adalah tingginya permintaan produk pertanian serta kehutanan di pasar lokal dan ekspor. Sementara, tiga LU yang menyerap tenaga kerja paling rendah, yaitu Penyediaan Air dan Pengelolaan Limbah sebesar 0,27%, Aktivitas Real Estate sebesar 0,21%, dan Penyediaan Listrik dan Gas sebesar 0,15%.

5.1.4. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja di Sumatera Selatan pada Mei 2026 masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah. Sebanyak 38,51% penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tinggi (Diploma IV, S1, S2, dan S3) tercatat sebesar 9,53%.

Grafik 5.4. Penduduk Bekerja di Sumatera Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)

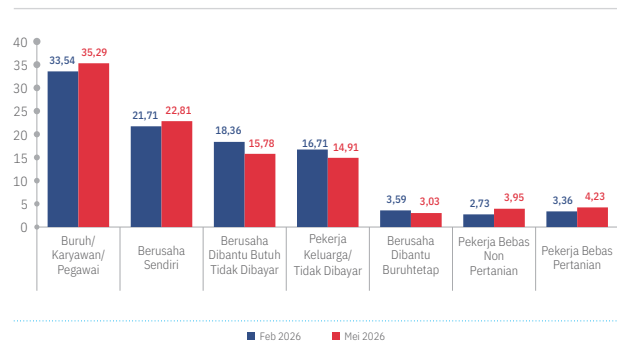


5.1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada Mei 2026, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,29%, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di non pertanian, yaitu sebesar 3,03%. Dibandingkan Februari 2026, status pekerjaan yang meningkat dengan persentase terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 1,75 persen poin. Sementara itu, status pekerjaan yang menurun dengan persentase terbesar adalah berusaha buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 2,58 persen poin.

Pada Mei 2026, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,73 juta orang (61,68%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,69 juta orang (38,32%). Dibandingkan Februari 2026, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen poin.

Grafik 5.5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama

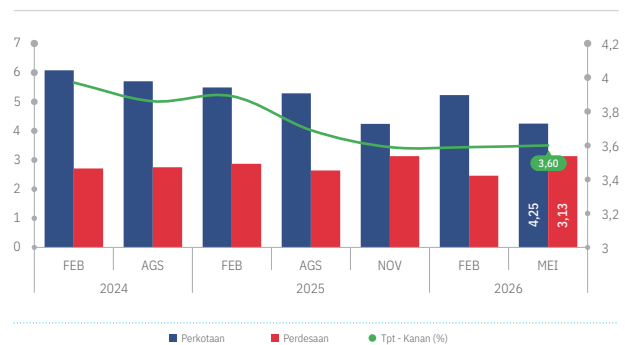


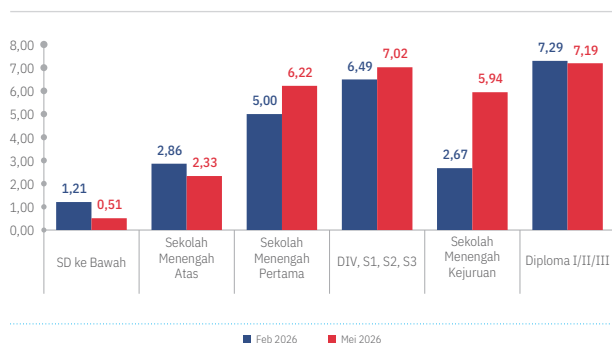
5.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator ketenagakerjaan pada Mei 2026 menunjukkan kondisi yang relatif terjaga, tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tercatat sebesar 3,60%, meningkat tipis sebesar 0,01 persen poin dibandingkan Februari 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan pengangguran yang relatif terbatas di tengah tetap berlangsungnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 3,70%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,42%. TPT laki-laki menunjukkan penurunan sebesar 0,11 persen poin, sedangkan perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan Februari 2026. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan (4,25%) lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (3,13%). Dibandingkan dengan Februari 2026, TPT di perkotaan menunjukkan penurunan sebesar 0,98 persen poin dan TPT di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen poin. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dinamika penyerapan tenaga kerja antar wilayah, dengan tekanan pengangguran yang masih relatif lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan.

Grafik 5.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan, 2024-2026 (dalam %)



Grafik 5.7. Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

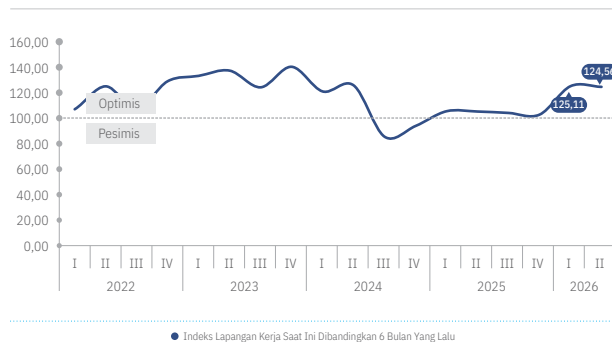
Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh angkatan kerja, pada Mei 2026 menunjukkan TPT tertinggi berada pada tamatan Diploma IV, S1, S2, dan S3 yaitu sebesar 7,19%. Sementara itu, TPT terendah berada pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu 0,51%.

5.1.7. Survei Konsumen

Kondisi pasar tenaga kerja di Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 terpantau tetap solid dan berada dalam zona optimis.

Kondisi ini tercermin dari hasil Survei Konsumen triwulan II 2026, di mana Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja saat ini mencatatkan angka 124,56. Meskipun mengalami penurunan terbatas dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 125,11, indeks tersebut tetap bertahan di atas ambang batas optimisme (>100). Persepsi positif masyarakat ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang tetap ekspansif, bahkan setelah melewati periode puncak Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Indeks yang tetap bertahan di atas level optimis tersebut mengonfirmasi bahwa secara umum rumah tangga mempersepsikan ketersediaan lapangan kerja saat ini berada dalam zona optimis. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan indikator ketenagakerjaan aktual di Sumatera Selatan, tecermin dari terjaganya TPAK dan TPT.

Grafik 5.8. Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu

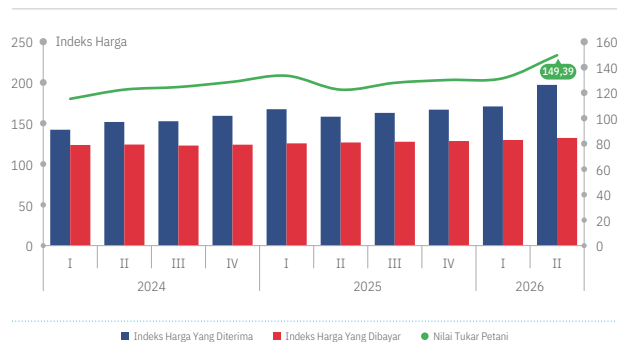
Sumber : Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia

5.2. Kondisi Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan NTP Sumatera Selatan pada triwulan II 2026 meningkat dibandingkan NTP triwulan sebelumnya, yaitu dari 131,36 menjadi 149,39 (Grafik 5-9). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan atau daya beli petani meningkat sejalan dengan nilai tukar produk yang dihasilkan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga petani meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi pertanian.

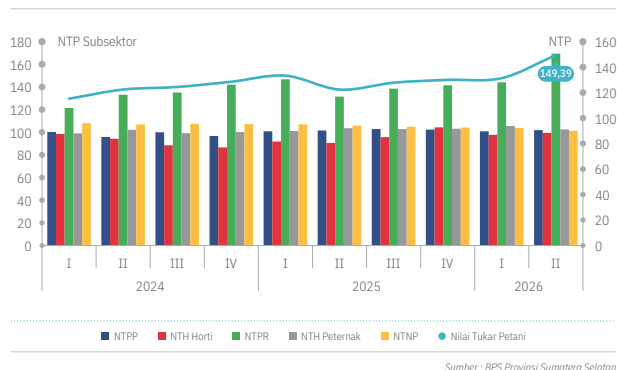
Peningkatan NTP pada triwulan II 2026 terutama bersumber pada peningkatan NTP Perkebunan Rakyat (NTPR), NTP Hortikultura (NTPH), dan NTP Tanaman Pangan (NTPP) (Grafik 5-10). NTPR pada triwulan II 2026 tercatat 169,39 dari triwulan sebelumnya sebesar 144,10. Kenaikan indeks harga yang diterima petani tanaman perkebunan rakyat disebabkan naiknya harga komoditas kelompok tanaman perkebunan rakyat, yaitu karet, kopi, dan lada. Selanjutnya, NTPH menunjukkan nilai sebesar 99,54, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 97,67. Selanjutnya, NTPP menunjukkan peningkatan sebesar 1,54% dari sebelumnya sebesar 100,85 menjadi 101,88.

NTP pada triwulan laporan masih berada di atas angka 100 yang mencerminkan bahwa petani dalam kondisi surplus, yaitu harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dibayarkan oleh petani. Indeks Harga yang diterima Petani (It) tercatat sebesar 197,12 pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan sebesar 15,56% dibanding triwulan sebelumnya, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang meningkat 1,91% dari sebelumnya sebesar 130,31 menjadi 131,31.

Grafik 5.9. Indeks Harga yang Diterima, Indeks Harga yang dibayar dan Nilai Tukar Petani

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Grafik 5.10. Nilai Tukar Petani Per Subsektor



Tabel 5.1. Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu Triwulan II 2026

Bulan	Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan yang Lalu (Jml Responden)			
	Lebih Baik	Sama	Lebih Buruk	Jumlah
April	107	139	54	300
Mei	125	126	49	300
Juni	130	125	45	300
Jumlah	362	390	148	900
Persentase	40,22%	43,33%	16,44%	100,00%

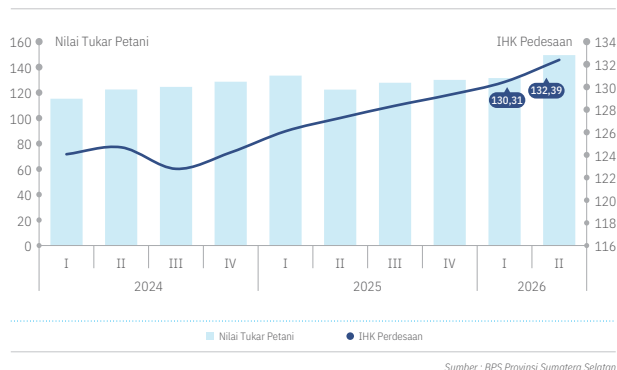
Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan

Pada triwulan II 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 132,39 mengalami peningkatan sebesar 1,02% (qtq) (Grafik 5-11). Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan hampir semua kelompok pengeluaran terutama Makanan, Minuman, dan Tembakau; Pakaian dan Alas Kaki; dan Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga.

Sejalan dengan itu, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau penghasilan saat ini lebih baik dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu (Tabel 5-1). Sebanyak 40,22% responden menyatakan bahwa penghasilan mereka pada triwulan laporan lebih baik dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Sementara itu, 16,44% responden menyatakan penghasilan saat ini menurun/lebih buruk dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil Survei Konsumen, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan masih optimis bahwa penghasilan mereka ke depan akan relatif lebih baik. Tetap solidnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan berlanjutnya program bantuan sosial dan adanya peningkatan UMP turut memberikan andil dalam optimisme penghasilan ke depan. Hal ini terkonfirmasi dari sejumlah 47,44% responden berpendapat bahwa penghasilan yang akan diterima pada 6 bulan mendatang akan lebih baik dibandingkan saat ini dan 45,33% responden menyatakan penghasilan yang akan diterima ke depan akan sama atau stabil

Grafik 5.11. Perkembangan NTP dan Inflasi Pedesaan Sumatera Selatan



Tabel 5.2. Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan 6 Bulan Yang Akan Datang Triwulan II 2026

Bulan	Perkiraan Penghasilan 6 Bulan Mendatang Dibandingkan Saat Ini (Jml Responden)			
	Lebih Baik	Sama	Lebih Buruk	Jumlah
April	146	127	27	300
Mei	138	141	21	300
Juni	143	140	17	300
Jumlah	427	408	65	900
Persentase	47,44%	45,33%	7,22%	100,00%

Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan

dibandingkan dengan kondisi saat ini. Sementara itu, sebagian responden lainnya sebanyak 7,22% memprakirakan penghasilan 6 bulan yang akan datang menurun/lebih buruk dibandingkan saat ini (Tabel 5-2). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat masih terus terjaga.

5.3. Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2026 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2026 sebanyak 869,97 ribu orang atau 9,50% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan penurunan 0,35 persen poin terhadap persentase September 2025 (Grafik 5-12).

Adapun penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada periode laporan diiringi oleh peningkatan garis kemiskinan menjadi Rp628.228,00/kapita/bulan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga kelompok makanan seiring dengan besarnya pangsa kelompok tersebut bila dibandingkan kelompok non makanan.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan pada periode Maret 2026. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan yang sebanyak 297,24 ribu orang, menurun dibandingkan posisi September 2025 sebanyak 310,56 ribu orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2026

menurun sebesar 0,43 persen poin. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan pada Maret 2026 menjadi 572,73 ribu orang dibandingkan posisi September 2025 sebanyak 587,68 ribu orang (Tabel 5-3). Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2026 menurun sebesar 0,30 persen poin.

Penurunan tingkat kemiskinan Sumatera Selatan pada Maret 2026 mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi daerah dan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Perbaikan terutama ditopang oleh kinerja sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan, peningkatan produktivitas pangan melalui program swasembada pangan dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), serta terjaganya daya beli masyarakat melalui

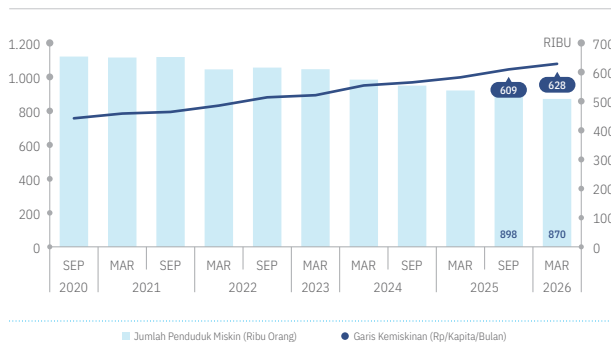
pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antarwilayah turut mendukung pemerataan aktivitas ekonomi hingga tingkat kabupaten/kota.

5.3.1. Perubahan Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan² Provinsi Sumatera Selatan pada periode Maret 2026 tercatat sebesar Rp628.238,00/kapita/bulan, meningkat sebesar 3,15% jika dibandingkan dengan September 2025 (Tabel 5-4). Pada periode Maret 2026, peranan kelompok makanan masih jauh lebih besar dibandingkan kelompok bukan makanan. Besar sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM)³ terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2026 adalah sebesar 75,07% sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar 24,93%.

Komoditas kelompok makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK pada umumnya hampir sama antara perkotaan dan pedesaan. Beras dan rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar, yakni 19,11% dan 12,14%. Di pedesaan, beras memberi sumbangan sebesar 23,08% dan rokok kretek filter 11,31%. Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,31% di perkotaan dan 4,22% di pedesaan), daging ayam ras (4,31% di perkotaan dan 2,46% di pedesaan), dan mie instan (3,41% di perkotaan dan 2,46% di pedesaan). Selanjutnya, komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perkotaan dan pedesaan adalah komoditas perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Grafik 5.12. Perkembangan Penduduk Miskin



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 5.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Bulan	Perkotaan		Perkotaan		Perkotaan & Pedesaan	
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin
2021	Maret	402,25	12,36	711,51	13,12	1.113,76	12,84
	September	393,38	11,99	723,23	13,28	1.116,61	12,79
2022	Maret	371,50	11,23	673,18	12,31	1.044,69	11,90
	September	379,09	11,37	675,9	12,30	1.054,99	11,95
2023	Maret	371,75	11,07	673,93	12,21	1.045,68	11,78
2024	Maret	342,34	10,04	641,9	11,53	984,24	10,97
	September	310,04	9,02	638,81	11,43	948,85	10,51
2025	Maret	314,49	9,1	605,12	10,79	919,60	10,15
	September	310,56	8,91	587,68	10,43	898,24	9,85
2026	Maret	279,24	8,48	572,73	10,13	869,97	9,50

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

2. Garis Kemiskinan merupakan suatu batas dalam mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

3. Komponen Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel 5.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)								
	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan & Pedesaan		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
Mar-21	350.163	135.276	485.439	335.549	105.866	441.415	340.567	116.888	457.455
Sep-21	354.236	137.422	491.658	337.702	108.975	446.678	343.549	119.702	463.251
Mar-22	374.346	141.579	515.925	353.000	114.139	467.139	360.600	124.469	485.069
Sep-22	400.354	148.101	548.455	368.981	124.901	493.882	379.882	133.642	513.524
Mar-23	405.674	150.428	556.102	373.072	127.616	500.688	384.507	136.247	520.754
Mar-24	433.537	156.059	589.596	402.078	131.714	533.792	413.237	140.960	554.197
Sep-24	447.563	155.742	603.305	409.879	131.942	541.821	423.507	140.955	564.462
Mar-25	465.384	159.166	624.550	420.834	136.419	557.253	436.639	145.063	581.702
Sep-25	487.536	166.633	654.169	441.593	140.814	582.407	458.362	150.682	609.044
Mar-26	505.483	168.760	674.243	454.164	149.024	603.188	471.646	156.592	628.238

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

5.3.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2026 tercatat sebesar **1,405**, lebih rendah dibandingkan September 2025 yang sebesar **1,541**. Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Rp628.238,00 per kapita per bulan) semakin membaik, dengan jarak semakin sempit antara pendapatan mereka dengan garis kemiskinan tersebut. Sementara itu, pada Maret 2026, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dibandingkan September 2025, dari 0,384 menjadi 0,304. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin berkurang, sejalan dengan perbaikan kondisi kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Tabel 5-5).

Secara spasial, pada Maret 2026, P1 di wilayah pedesaan masih sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Nilai P1 di pedesaan tercatat sebesar **1,551**, sementara di perkotaan sebesar **1,169**. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di pedesaan masih relatif lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan, meskipun kesenjangannya semakin menyempit dibandingkan periode sebelumnya. Sejalan dengan P1, pada Maret 2026, P2 tercatat lebih tinggi di wilayah pedesaan sebesar 0,342 dibandingkan perkotaan sebesar 0,242. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di pedesaan relatif lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan pada periode laporan.

Tabel 5.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan

Periode	Kota	Desa	Kota & Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2022	1,997	1,938	1,961
September 2022	1,855	1,749	1,789
Maret 2023	1,784	1,688	1,724
Maret 2024	1,688	2,011	1,888
September 2024	1,032	1,705	1,449
Maret 2025	1,484	1,739	1,642
September 2025	1,529	1,549	1,541
Maret 2026	1,169	1,551	1,405
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2022	0,472	0,438	0,451
September 2022	0,423	0,364	0,386
Maret 2023	0,433	0,369	0,393
Maret 2024	0,390	0,499	0,457
September 2024	0,178	0,400	0,316
Maret 2025	0,330	0,397	0,371
September 2025	0,429	0,355	0,384
Maret 2026	0,242	0,342	0,304

Sumber : BPS Sumatera Selatan

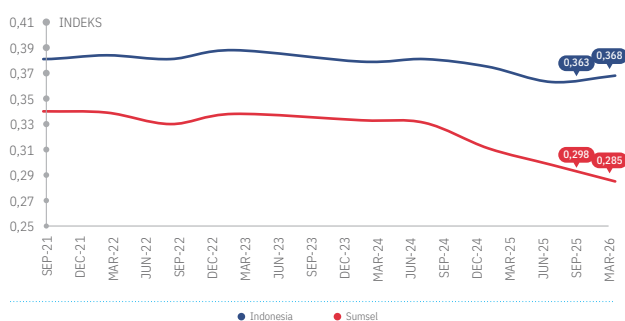
5.3.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Kondisi ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan. Hal ini tercermin dari rasio gini yang tercatat sebesar 0,285 tercatat pada Maret 2026, lebih rendah

dibanding periode September 2025 yang sebesar 0,298. Kondisi ini menggambarkan terjadinya penurunan kesenjangan ekonomi antar penduduk di Sumatera Selatan.

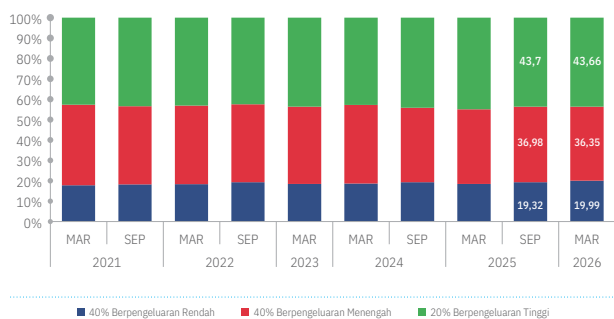
Rasio gini Sumatera Selatan lebih rendah dari rasio gini nasional yang tercatat sebesar 0,368 (Grafik 5-13). Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, posisi Sumatera Selatan menduduki peringkat 9 dengan rasio gini terendah di Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini perkotaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,346, menurun dibanding September 2025 sebesar 0,352. Sementara itu, di daerah perdesaan, rasio gini tercatat sebesar 0,212, menurun dibanding September 2025 yang sebesar 0,215.

Grafik 5.13. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Selatan dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

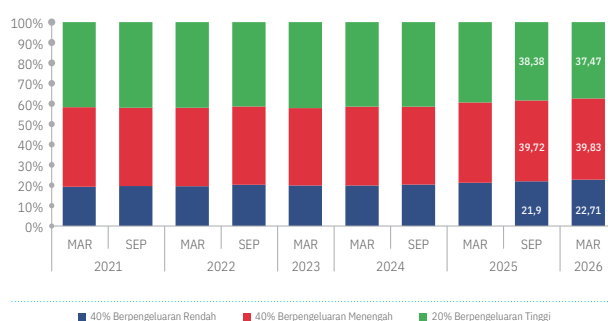
Grafik 5.14. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

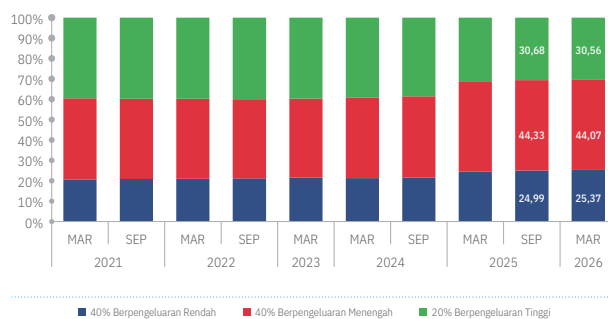
Penurunan rasio gini pada Maret 2026 sejalan dengan perbaikan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat di Sumatera Selatan. Hal ini tercermin dari menurunnya distribusi pendapatan kelompok 20% berpengeluaran tinggi dari 38,38% pada September 2025 menjadi 37,47% pada Maret 2026. Sementara itu, distribusi pendapatan kelompok 40% berpengeluaran menengah meningkat dari 39,72% menjadi 39,83%, serta kelompok 20% berpengeluaran rendah meningkat dari 21,90% menjadi 22,71% pada periode yang sama. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat di Sumatera Selatan.

Grafik 5.15. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perkotaan



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 5.16. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perdesaan



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah





Prospek Perekonomian Daerah



Di tengah dinamika kondisi geopolitik dan perekonomian global, ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat pada tahun 2026, didukung oleh inflasi yang terjaga pada rentang sasaran.

- Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5-5,8% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar.
- Ke depan, inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan kembali berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$, mempertahankan capaian di tahun 2025.
- Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, akselerasi investasi dan hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan, mendorong digitalisasi, serta mendorong sektor ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2026

Perekonomian global pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, namun dengan prospek yang melemah dibandingkan prakiraan sebelumnya dan disertai ketidakpastian yang semakin tinggi. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF Juni 2026, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diproyeksikan sebesar 3,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan prakiraan WEO Update April 2026 sebesar 3,1% (yoy), dan diperkirakan meningkat terbatas menjadi 3,2% (yoy) pada 2027. Laju pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan capaian sekitar 3,5% (yoy) pada 2024–2025, serta masih berada di bawah rerata historis jangka panjang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perekonomian global masih memiliki daya tahan, namun ruang pemulihan menjadi lebih terbatas seiring meningkatnya tekanan dari sisi geopolitik dan energi. Sebelum terjadinya eskalasi konflik di Timur Tengah, prospek ekonomi global telah menunjukkan perbaikan, ditopang oleh masih kuatnya investasi teknologi dan kecerdasan buatan (AI), kondisi keuangan global yang relatif akomodatif, pelemahan dolar AS, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter di sejumlah negara. Namun, konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026, termasuk gangguan terhadap jalur distribusi energi dan fasilitas produksi strategis, menjadi faktor utama yang menahan momentum pertumbuhan global tersebut.

Selain itu, prospek global juga masih dibayangi oleh berlanjutnya ketidakpastian kebijakan perdagangan, fragmentasi ekonomi, dan perubahan pola rantai pasok global. Meredanya efek *front-loading* perdagangan yang sebelumnya dilakukan pelaku usaha untuk mengantisipasi tarif berpotensi menahan volume perdagangan dunia pada 2026. Pada saat yang sama, dinamika tarif, penyesuaian hubungan dagang antarnegara, serta meningkatnya kecenderungan kebijakan yang lebih berorientasi domestik dapat menahan investasi dan perdagangan global. Risiko pasar keuangan global juga tetap perlu dicermati, terutama apabila kenaikan harga energi dan inflasi memicu sentimen *risk-off*, peningkatan premi risiko, penguatan dolar AS sebagai aset *safe haven*, serta arus modal keluar dari negara berkembang. Dalam kondisi tersebut, negara berkembang yang mempunyai neraca perdagangan defisit dan negara dengan *buffer* fiskal maupun eksternal yang terbatas menjadi lebih rentan terhadap tekanan nilai tukar, kenaikan biaya impor, pelebaran defisit eksternal, serta peningkatan beban subsidi atau dukungan fiskal. Dengan demikian, meskipun perekonomian global masih diperkirakan tumbuh, arah ke depan masih sangat bergantung pada durasi konflik, stabilitas harga energi, kredibilitas kebijakan moneter, serta kemampuan negara-negara menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas pasar keuangan.

Inflasi global diperkirakan kembali meningkat pada 2026 seiring munculnya tekanan baru dari sisi pasokan, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan dan jalur distribusi energi global. Menurut analisis IMF, inflasi *headline* global diproyeksikan meningkat dari 4,1% (yoy) pada 2025 menjadi 4,5% (yoy) pada 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses disinflasi global menghadapi tantangan baru, berbeda dari prakiraan sebelumnya yang mengarah pada penurunan inflasi yang lebih konsisten. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi, termasuk pada sektor transportasi, pangan, pupuk, bahan kimia, dan utilitas, sehingga dapat menahan penurunan inflasi serta menekan daya beli masyarakat. Risiko inflasi juga dapat meningkat apabila kenaikan harga energi memengaruhi ekspektasi inflasi dan mendorong penyesuaian harga maupun upah secara lebih luas. Dalam konteks tersebut, arah kebijakan moneter global diperkirakan tetap berhati-hati dan berbeda antarnegara, bergantung pada kekuatan tekanan inflasi domestik, keterjangkaran ekspektasi inflasi, kondisi pasar tenaga kerja, serta ruang kebijakan masing-masing negara.

Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global yang masih tinggi berpotensi mengganggu rantai pasok dunia serta menahan kinerja perdagangan dan investasi global. Konflik di Timur Tengah meningkatkan risiko kenaikan harga komoditas, khususnya energi dan pangan, yang pada gilirannya dapat memperlambat proses disinflasi dan memperbesar tekanan terhadap negara importir energi. Sejalan dengan itu, risiko gejolak di pasar keuangan global tetap perlu dicermati, terutama melalui perubahan sentimen yang berlangsung cepat, peningkatan premi risiko, penguatan permintaan terhadap aset aman, serta potensi pengetatan kondisi keuangan global. Tekanan tersebut dapat berdampak lebih besar pada negara berkembang, terutama yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, *buffer* fiskal dan eksternal yang terbatas, serta kebutuhan pembiayaan eksternal yang besar. Dengan demikian, meskipun inflasi global diperkirakan kembali menurun pada 2027, prospek disinflasi masih rentan terhadap durasi konflik, perkembangan harga energi, kredibilitas kebijakan moneter, dan stabilitas pasar keuangan global.

Di tengah prospek pertumbuhan global yang masih positif namun semakin rentan akibat eskalasi konflik geopolitik, tantangan utama ke depan adalah menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui bauran kebijakan yang kredibel, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan dan jalur distribusi energi global

meningkatkan risiko tekanan inflasi, pelemahan aktivitas ekonomi, serta gejolak pasar keuangan. Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter perlu tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan ekspektasi inflasi. Bank sentral di berbagai negara perlu tetap waspada dan siap merespons secara tegas apabila tekanan harga energi mulai memengaruhi ekspektasi inflasi dan mendorong efek lanjutan terhadap harga maupun upah. Namun, apabila ekspektasi inflasi tetap terjaga dan tekanan harga bersifat sementara, respons kebijakan moneter perlu tetap terukur agar tidak memperdalam perlambatan ekonomi. Komunikasi kebijakan yang transparan serta kredibilitas dan independensi bank sentral menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan pelaku ekonomi.

Di sisi fiskal, ruang kebijakan yang semakin terbatas menuntut pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi dan pangan. Dukungan fiskal perlu dirancang secara hati-hati, terarah, bersifat sementara, serta tetap konsisten dengan rencana fiskal jangka menengah. Kebijakan subsidi atau kompensasi yang terlalu luas perlu dihindari karena berisiko meningkatkan beban fiskal, mengurangi efektivitas sinyal harga, dan memperbesar kerentanan makroekonomi. Sejalan dengan itu, pembangunan kembali *buffer* fiskal tetap perlu menjadi prioritas melalui penguatan penerimaan, peningkatan efisiensi belanja, reprioritisasi anggaran, serta pengelolaan utang yang prudent. Di tengah risiko pengetatan kondisi keuangan global dan meningkatnya premi risiko, penguatan pengawasan sektor keuangan, kecukupan likuiditas, serta kesiapan instrumen stabilisasi pasar juga menjadi bagian penting dari respons kebijakan.

Lebih lanjut, meningkatnya fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional. Kejelasan arah kebijakan perdagangan antarnegara, transparansi implementasi kebijakan, serta penguatan pendekatan berbasis aturan (*rules-based*) diperlukan untuk menurunkan ketidakpastian dan

mendukung pemulihan investasi. Negara-negara juga perlu terus mendorong integrasi perdagangan yang lebih terbuka, terukur, dan dapat diprediksi, termasuk melalui modernisasi arsitektur perdagangan internasional yang lebih adaptif terhadap ekonomi digital, rantai pasok strategis, serta perkembangan teknologi a.l. AI. Dalam konteks ketidakseimbangan eksternal yang masih persisten, diplomasi perdagangan perlu diiringi dengan penyesuaian makroekonomi yang menasar faktor fundamental, bukan semata melalui pembatasan perdagangan. Dengan demikian, koordinasi kebijakan global, stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, dan reformasi struktural menjadi prasyarat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dunia serta menopang pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Prospek perdagangan internasional pada 2026 diperkirakan masih terbatas di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, berlanjutnya penyesuaian kebijakan perdagangan global, serta risiko gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF April 2026, volume perdagangan dunia barang dan jasa diperkirakan melambat dari 5,1% (yoy) pada 2025 menjadi 3,5% (yoy) pada 2026, sebelum kembali meningkat menjadi 4,3% (yoy) pada 2027. Perlambatan tersebut mencerminkan normalisasi aktivitas perdagangan setelah tingginya pertumbuhan pada 2025, yang antara lain didorong oleh *front-loading* impor untuk mengantisipasi tarif, serta masih tertahannya permintaan global di tengah tekanan harga energi dan ketidakpastian kebijakan. Di sisi lain, perdagangan terkait teknologi masih menjadi penopang, khususnya melalui ekspor semikonduktor dan perangkat pendukung investasi digital serta AI, terutama di kawasan Asia. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan dari pelemahan perdagangan pada kelompok barang lainnya dan perubahan pola rantai pasok global.

Ke depan, risiko terhadap perdagangan global masih cenderung ke bawah. Ketidakpastian kebijakan perdagangan, termasuk dinamika tarif dan peninjauan kembali sejumlah kesepakatan dagang, masih dapat memicu peningkatan volatilitas dan menahan keputusan investasi pelaku usaha. Pada saat yang sama, fragmentasi geoekonomi mendorong pergeseran pola perdagangan antarnegara, antara lain melalui diversifikasi mitra dagang, penyesuaian sumber impor, serta reorientasi ekspor dari pasar tradisional ke kawasan lain. Konflik di Timur Tengah juga meningkatkan risiko gangguan jalur logistik dan kenaikan biaya energi, yang dapat memperbesar biaya perdagangan, menekan margin dunia usaha, serta menghambat pemulihan volume perdagangan. Dengan demikian, meskipun volume perdagangan dunia diperkirakan membaik pada 2027, prospeknya masih sangat bergantung pada meredanya ketegangan geopolitik, kejelasan arah kebijakan perdagangan,

Tabel 6.1. Global Economic Outlook

Wilayah	2024	2025	2026*
World	3,5	3,5	3,0
US	2,8	2,1	2,3
Euro Area	1,0	1,4	0,9
Japan	-0,2	1,1	0,6
China	5,0	5,0	4,6
India	7,1	7,7	6,4

Sumber: WEO IMF, *) estimasi

stabilitas harga energi, serta kemampuan negara-negara menjaga keterbukaan dan kepastian aturan dalam sistem perdagangan internasional.

Ke depan, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tetap dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi terutama perang dagang terus berlanjut, termasuk dampaknya terhadap kembali naiknya harga energi dan pangan, serta lebih lamanya pengetatan kebijakan moneter khususnya di negara maju untuk menurunkan tingkat inflasi kembali ke sasarannya di masing-masing negara.

Untuk mengatasi tingginya dan dampak buruk fragmentasi dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Indonesia melakukan penguatan diplomasi ekonomi internasional dengan meningkatkan kolaborasi lembaga antara bank sentral dan kementerian luar negeri dalam pengelolaan persepsi positif Indonesia untuk mendorong investasi dan perdagangan, perumusan kebijakan luar negeri untuk meningkatkan peran dan kepentingan ekonomi Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi, perluasan konektivitas sistem pembayaran, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di level internasional. Selain itu, Indonesia juga terus menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan bauran kebijakan dalam berbagai fora internasional.

Tabel 6.2. Volume Perdagangan Internasional

	2024	2025	2026*
Volume Perdagangan Internasional	3,7	5,0	3,5
Negara Maju	2,3	4,2	3,4
Negara Berkembang	6,1	6,4	3,6

Sumber: WEO IMF, *) estimasi

6.2. Prospek Makroekonomi Keseluruhan Tahun 2026

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, kinerja perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan diperkirakan meningkat pada 2026. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%, didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong aktivitas ekonomi. Dari sisi permintaan, penguatan konsumsi rumah tangga tetap penting untuk menopang permintaan domestik, di samping dorongan investasi yang perlu terus ditingkatkan. Dari sisi eksternal, berbagai upaya peningkatan ekspor dan penguatan daya saing tetap diperlukan untuk meredam dampak perlambatan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan perdagangan. Sejalan dengan itu, sejumlah indikator dan hasil survei terkini menunjukkan prospek yang tetap positif, antara lain keyakinan konsumen dan indeks

penghasilan saat ini. Ketahanan sektor eksternal Indonesia juga tetap terjaga di tengah dinamika global, tercermin pada kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat.

Sebagai bagian dari strategi kebijakan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial serta akselerasi digitalisasi dalam transaksi pembayaran diperkuat untuk bersinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program Asta Cita Pemerintah, yang mencakup pembiayaan ekonomi, digitalisasi, hilirisasi industri, serta ketahanan pangan.

Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam konteks aliran modal global ke negara berkembang yang masih bersifat selektif serta ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ dengan optimalisasi intervensi valas, penguatan struktur suku bunga moneter, dan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Di sisi lain, Bank Indonesia juga turut mendorong pertumbuhan, melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dan berbagai kebijakan sistem pembayaran (QRIS).

Dalam aspek inflasi, Bank Indonesia meyakini inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional akan tetap terkendali dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$. Inflasi inti diperkirakan tetap terjaga seiring ekspektasi inflasi yang tetap terjangkau, kapasitas perekonomian yang memadai untuk merespons permintaan domestik. Perkembangan digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran juga terus mendukung efisiensi distribusi dan transaksi, sehingga turut menopang stabilitas harga. Namun, perlu dicermati risiko *imported inflation* sebagai imbas dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang dapat berdampak pada kenaikan biaya bahan baku dan biaya distribusi. Ke depan, sinergi erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk melalui penguatan TPIP/TPID, akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas inflasi nasional.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tetap resilien dan menguat pada kisaran 5,0–5,8%. Prospek tersebut sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional yang diperkirakan meningkat pada kisaran 4,9–5,7% serta tetap resiliennya perekonomian global, meskipun perdagangan dunia

melambat seiring normalisasi pola *front-loading*. Pertumbuhan ekonomi Sumsel di 2026 diperkirakan ditopang oleh penguatan permintaan domestik dan stimulus fiskal pemerintah pusat, akselerasi program prioritas (Asta Cita) termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi di Sumatera Selatan, peningkatan produksi migas, serta perluasan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan kelembagaan ekonomi (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih/KDKMP). Dukungan terhadap konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tetap terjaga, antara lain seiring penyesuaian UMP dan stimulus pada momen HBKN (diskon tarif transportasi). Namun demikian, laju pertumbuhan Sumsel berpotensi tertahan oleh pelemahan permintaan batu bara di tengah ketidakpastian global, melambatnya perdagangan dunia, normalisasi harga komoditas unggulan, serta terbatasnya penambahan proyek strategis baru, sehingga ruang akselerasi pertumbuhan perlu terus diperkuat melalui sinergi kebijakan dan percepatan investasi.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh pada tahun 2026. Peningkatan UMP Sumatera Selatan yang signifikan sebesar 7,1% mendorong kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2026. Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi adanya kebijakan diskon listrik PLN yang mendorong peningkatan pendapatan riil masyarakat. Di samping itu, TPIN dan TPID juga terus melakukan upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Berlanjutnya penyaluran program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga ikut menopang peningkatan konsumsi RT di tahun 2025. Namun demikian, permintaan masyarakat sedikit tertahan akibat adanya penurunan permintaan global berpotensi menekan harga komoditas ekspor Sumatera Selatan seperti batu bara, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan pekerja industri dan sektor bisnis terkait.

Konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh akseleratif dibanding tahun sebelumnya. Akselerasi tersebut didorong oleh normalisasi realisasi belanja pemerintah pusat pascapenyesuaian/pengetatan pada 2025, serta meningkatnya kebutuhan belanja untuk mendukung program prioritas Pemerintah, khususnya penguatan swasembada/ketahanan pangan, implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Merah Putih. Namun demikian, ruang fiskal daerah pada 2026 tetap menghadapi tantangan seiring informasi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk 18 Pemda di Sumatera Selatan menjadi Rp24,31 triliun (turun Rp9,31 triliun dibanding 2025 sebesar Rp33,63 triliun), sehingga berpotensi meningkatkan tekanan pembiayaan belanja layanan dasar dan infrastruktur, khususnya apabila PAD belum cukup kuat.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada 2026 diperkirakan turut ditopang oleh kinerja investasi (PMTB) yang menguat. Akselerasi investasi terutama didorong oleh berlanjutnya pembangunan infrastruktur strategis, khususnya proyek konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Sumsel, serta progres proyek sumber daya air berupa bendungan dan daerah irigasi yang mendukung ketahanan pangan dan pengendalian banjir. Selain proyek pemerintah, investasi swasta diperkirakan tetap berperan melalui penguatan kapasitas sektor energi dan industri pengolahan. Dari sisi energi, peningkatan kapasitas operasional pembangkit listrik di wilayah Sumsel memperkuat keandalan pasokan listrik regional dan menopang aktivitas ekonomi turunannya. Dari sisi industri pengolahan, keberlanjutan ekspansi/penyelesaian proyek pada industri pulp dan kertas serta investasi baru pada hilirisasi komoditas—termasuk pengolahan kelapa terpadu—diprakirakan turut memperkuat kinerja PMTB Sumatera Selatan pada 2026.

Ekspor Sumatera Selatan pada 2026 diperkirakan tertahan, terutama dipengaruhi oleh faktor sisi penawaran dan logistik komoditas unggulan. Dari sisi produksi, kebijakan pengurangan produksi di 2026 yang termaktub pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara berpotensi menahan fleksibilitas volume produksi dan pengapalan, karena realisasi produksi/penjualan perlu menyesuaikan kuota serta proses persetujuan dan evaluasi RKAB. Kondisi ini menyebabkan ekspor—khususnya komoditas batu bara—tidak sepenuhnya dapat merespons peluang permintaan dan harga secara cepat, sehingga kinerja ekspor cenderung lebih moderat. Dari sisi distribusi, pemberlakuan pelarangan angkutan batu bara melintasi jalan umum di Sumatera Selatan (mulai 1 Januari 2026) dapat menyebabkan peralihan pengangkutan ke jalan khusus/*hauling* dan skema logistik alternatif, yang pada fase awal berpotensi menurunkan kelancaran pengiriman walaupun bersifat sementara. Selain itu, berkurangnya ketersediaan bahan baku karet dapat menyebabkan kinerja ekspor produk turunan karet turut tertahan di tahun ini.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan ditopang oleh kinerja beberapa lapangan usaha (LU) utama yang tetap tumbuh solid, terutama LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi. Kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif dan penguatan dukungan sisi hulu melalui percepatan program ketahanan pangan, antara lain perluasan areal tanam melalui cetak sawah dan pengembangan padi gogo, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta penguatan pendampingan/bantuan sarana produksi untuk mendorong produktivitas. Efisiensi biaya produksi pertanian juga diperkirakan membaik seiring penguatan ketersediaan input dan

perbaikan tata kelola distribusi, sehingga mendukung peningkatan output dan pendapatan petani. Selain tanaman pangan, subsektor perkebunan—khususnya kelapa sawit—diprakirakan tetap berkontribusi positif, didukung oleh kebutuhan domestik yang relatif kuat, termasuk dari implementasi program mandatori pemanfaatan biodiesel. Di sisi lain, LU Perdagangan diprakirakan tetap tumbuh seiring kuatnya konsumsi rumah tangga, dukungan aktivitas musiman (HBKN), dan UMP yang lebih tinggi. Adapun LU Konstruksi diprakirakan tetap terjaga didorong oleh keberlanjutan proyek infrastruktur pemerintah pusat, meskipun tetap perlu mencermati risiko penyesuaian realisasi belanja modal daerah. Sedangkan dari sisi investasi swasta, berlanjutnya pembangunan pabrik tisu di Kab. OKI dan pabrik *crude coconut oil* di Kab. Banyuasin menjadi sentimen pendorong konerja LU Konstruksi di tahun ini.

Sementara itu, kinerja LU pertambangan Sumatera Selatan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB diprakirakan mengalami perlambatan pada tahun 2025. Moderasi kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya ruang peningkatan produksi batu bara seiring penyesuaian RKAB 2026, serta friksi distribusi akibat implementasi pelarangan angkutan batu bara melalui jalan umum yang mendorong penyesuaian rantai logistik (peralihan ke jalan khusus/kereta) dan berpotensi menahan kelancaran pengiriman pada fase awal. Selain itu, faktor cuaca (curah hujan ekstrem pada periode awal tahun) juga berpotensi mengganggu aktivitas produksi dan hauling, sehingga menahan kinerja sektor pertambangan secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, LU Industri Pengolahan pada 2026 diprakirakan turut tumbuh melambat. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan produksi pada subsektor berbasis komoditas khususnya CPO serta *pulp & paper* seiring keterbatasan bahan baku akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif, sehingga menahan utilisasi/volume produksi. Dengan demikian, meskipun permintaan domestik dan perbaikan harga pada sebagian komoditas tetap menjadi bantalan, kinerja LU Industri Pengolahan pada 2026 diprakirakan tidak sekuat tahun sebelumnya.

6.3. Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2026

Mencermati dinamika inflasi global yang diprakirakan melanjutkan tren penurunan serta stabilitas inflasi nasional, inflasi Sumatera Selatan pada 2026 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi yang relatif stabil tersebut terutama mencerminkan laju perekonomian yang tinggi, namun tetap terkendali seiring dukungan ketahanan pasokan pangan daerah, stabilitas nilai tukar, serta ekspektasi inflasi yang relatif terjaga di tengah ketidakpastian global.

Stabilitas inflasi Sumsel pada 2026 ditopang oleh penguatan sisi pasokan melalui program ketahanan pangan terutama peningkatan produktivitas pertanian, antara lain optimalisasi lahan, perluasan cetak sawah, serta penguatan infrastruktur irigasi dan bendungan yang mendukung kontinuitas produksi sepanjang tahun. Upaya tersebut diperkuat oleh dukungan sarana produksi dan alsintan, perbaikan tata kelola budidaya dan pascapanen, serta penguatan kelembagaan dan pendampingan, sehingga pasokan komoditas pangan strategis lebih terjaga dan tekanan harga dapat diredam.

Meski demikian, sejumlah risiko inflasi tetap perlu dicermati. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global dan penyesuaian kebijakan perdagangan berpotensi memicu volatilitas harga komoditas dunia. Kondisi ini dapat mendorong tekanan inflasi impor, termasuk melalui volatilitas harga emas global yang berimplikasi pada harga emas perhiasan, serta potensi kenaikan biaya impor sejumlah komoditas. Dari sisi domestik, kenaikan UMP Sumatera Selatan 2026 sebesar 7,1% berpotensi mendorong penyesuaian harga barang dan jasa serta menguatkan konsumsi rumah tangga, terutama pada fase awal tahun.

Tekanan dari kelompok harga yang diatur pemerintah juga perlu diwaspadai, terutama apabila terjadi kenaikan harga energi global yang mendorong penyesuaian harga energi domestik atau gangguan produksi/distribusi energi yang meningkatkan biaya logistik. Di sisi lain, penetapan/penyesuaian tarif layanan tertentu di wilayah tertentu dapat menambah tekanan harga pada kelompok rumah tangga terdampak. Selain itu, transmisi penyesuaian kebijakan cukai rokok yang telah berjalan sejak 2025 berpotensi masih berlanjut memengaruhi harga rokok di pasar pada 2026.

Dari perspektif keseimbangan risiko, tekanan inflasi dari sisi komoditas pangan pada 2026 cenderung lebih terkendali apabila program peningkatan produktivitas padi dan penguatan langkah pengendalian inflasi pangan berjalan efektif, termasuk penguatan GPIPS, perluasan GSMP (termasuk *goes to pesantren*), serta penguatan *link-matching* kelembagaan/aggregator pangan dengan *offtaker*. Sementara itu, risiko inflasi yang bersumber dari penguatan permintaan dan kenaikan biaya produksi cenderung lebih mengarah ke atas, sejalan dengan sensitivitas terhadap harga energi, dinamika harga komoditas impor tertentu, dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperkuat melalui pelaksanaan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027, yang mencakup empat pilar utama: keterjangkauan harga melalui operasi pasar dan

stabilisasi harga pangan; peningkatan ketersediaan pasokan melalui pengembangan lumbung pangan, perluasan lahan hortikultura, dan optimalisasi irigasi; kelancaran distribusi melalui kerja sama antar daerah dan perbaikan infrastruktur logistik; serta komunikasi efektif melalui penguatan kualitas data dan sosialisasi pengendalian ekspektasi inflasi. Pelaksanaan program GNPIP, kerja sama antardaerah (KAD), subsidi ongkos angkut, dan intervensi pasar terkoordinasi menjadi instrumen kunci menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga.

Secara keseluruhan, dengan koordinasi kebijakan yang kuat dan konsisten, inflasi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam lintasan yang mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah. Penguatan pasokan pangan lokal, efisiensi distribusi, serta pengelolaan risiko harga energi dan komoditas global menjadi kunci keberlanjutan stabilitas inflasi di Sumatera Selatan.

6.4. Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di level global, nasional, dan Sumatera Selatan di 2025 dan proyeksi di 2026, seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan perlu memperkuat sinergi dalam memanfaatkan peluang dan mengantisipasi peluang dan tantangan perekonomian. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan antara lain:

1) Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Pangan

Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat lumbung pangan nasional, yang terlihat dari produksi beras 2,08 juta ton di 2025 (tertinggi kelima se-nasional). Namun demikian, beras menjadi penyumbang andil inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Selatan. Adapun peluang dan tantangan dari sisi produksi antara lain masih kurangnya infrastruktur pengembangan lahan rawa untuk pertanian; tingginya biaya produksi terutama dari harga dan ketersediaan pupuk; dan hambatan pada akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan produksi petani. Dari sisi distribusi, inefisiensi logistik dan maraknya sistem ijon dengan tengkulak ditengarai menyebabkan panjangnya rantai distribusi beras di Sumsel. Hal ini tercermin dari tingginya Marginal Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) beberapa komoditas strategis dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2024, MPP beras mencapai 34,16% dan cabai merah 41,41%, menandakan tingginya disparitas harga dan biaya distribusi antarwilayah.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan maupun pengendalian inflasi. Kolaborasi ini perlu diarahkan

untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan ke depan sesuai Program Asta Cita, yang pada gilirannya mendukung daya beli dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

a) Keterjangkauan Harga

- Perluasan program kios/toko/warung pengendalian inflasi
- Optimalisasi pelaksanaan operasi pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat

b) Ketersediaan Pasokan

- Mendorong produksi pangan lokal
- Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai
- Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan nelayan, a.l. melalui KUR

c) Kelancaran Distribusi

- Penguatan sistem distribusi dan rantai pasokan melalui perbaikan tata niaga
- Optimalisasi realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD)
- Peningkatan kualitas infrastruktur logistik
- Digitalisasi UMKM pangan

d) Komunikasi Efektif

- Diversifikasi komoditas pangan masyarakat
- Mendorong kemitraan antara petani dan industri (*contract farming*)
- Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi

2) Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan signifikan meskipun telah terjadi tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemiskinan per September 2025 tercatat sebesar 8,91%, yang merupakan pencapaian terendah dalam beberapa tahun terakhir, namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di tingkat kabupaten/kota, tujuh daerah sudah mencapai tingkat kemiskinan satu digit, tetapi masih ada beberapa wilayah yang menghadapi kemiskinan ekstrem, terutama di kabupaten seperti Lahat, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, dan Empat Lawang. Masalah utama yang dihadapi adalah ketimpangan dalam akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak, serta ketidakmampuan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kontribusi besar dari komoditas seperti beras dan rokok terhadap garis kemiskinan.

Untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan perlu diterapkan antara lain melalui:

a) Menurunkan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin

- Memperkuat jaring pengaman sosial melalui program bantuan sembako dan bantuan tunai dengan penyaluran yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok miskin ekstrem.
- Mengadakan operasi pasar murah secara rutin di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi guna menekan harga kebutuhan pokok, terutama beras.
- Mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan dengan mendorong daya beli melalui program-program kemandirian ekonomi.

b) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin

- Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal, dan pendampingan usaha bagi UMKM.
- Mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
- Meningkatkan inklusi keuangan untuk memastikan masyarakat miskin memiliki akses terhadap layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi guna mengelola risiko ekonomi dan memanfaatkan peluang usaha.

c) Sinergi Lintas Sektor dan Koordinasi Antarperangkat Daerah

- Memastikan implementasi strategi pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor.
- Mengoptimalkan peran instansi vertikal dan pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem ekonomi inklusif bagi masyarakat miskin.

3) Mengakselerasi Investasi untuk Mendorong Hilirisasi Komoditas Unggulan

Investasi memegang peran yang sangat krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Pada triwulan I 2026, kontribusi investasi terhadap PDRB mencapai 30,09%, menjadikannya salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Porsi yang signifikan ini menunjukkan bahwa percepatan investasi berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat dibandingkan komponen PDRB lainnya. Lebih jauh, investasi tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam transformasi ekonomi jangka panjang.

Namun demikian, potensi investasi di Sumatera Selatan belum dapat dioptimalkan sepenuhnya. Beberapa kendala masih perlu ditangani, antara lain belum optimalnya proses realisasi proyek strategis nasional (PSN) maupun proyek

swasta, serta keterbatasan insentif fiskal yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut dapat mengurangi daya tarik investor, terutama ketika dibandingkan dengan daerah lain yang menawarkan skema insentif dan fasilitas yang lebih kompetitif.

Selain itu, struktur ekonomi Sumatera Selatan hingga kini masih ditopang oleh ekspor komoditas unggulan berbasis sumber daya alam mentah, terutama batu bara, kelapa sawit, dan karet. Ketergantungan ini menjadikan perekonomian daerah sangat rentan terhadap gejolak global, baik berupa fluktuasi harga internasional maupun perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor. Setiap kali terjadi penurunan harga komoditas, tekanan langsung dirasakan pada kinerja ekspor, penerimaan daerah, hingga daya beli masyarakat. Kondisi ini menegaskan urgensi untuk melakukan hilirisasi komoditas agar perekonomian Sumatera Selatan lebih tahan terhadap guncangan global. Dengan mendorong proses pengolahan lebih lanjut di dalam negeri, nilai tambah komoditas dapat ditingkatkan, penciptaan lapangan kerja lebih luas, serta struktur industri daerah menjadi lebih kokoh. Namun, proses hilirisasi masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan tenaga kerja terampil, rendahnya akses terhadap teknologi modern, hingga infrastruktur logistik yang belum memadai.

Untuk mendorong hilirisasi, optimalisasi investasi menjadi prasyarat utama. Investasi yang masuk perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada penggalian dan ekspor bahan mentah, tetapi juga mendukung transformasi struktural melalui pengolahan lanjutan di daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat *soft infrastructures* dan *hard infrastructures* sebagai penopang iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.

a) Penguatan *Soft Infrastructures*

- **Koordinasi tata ruang dan perizinan:** memperkuat sinergi dalam penyusunan RTRW dan RDTR, sekaligus memastikan perizinan investasi berjalan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
- **Regulasi insentif fiskal daerah:** mendorong penyusunan kebijakan turunan berupa pengurangan pajak dan retribusi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna meningkatkan daya tarik investor.
- **Optimalisasi sistem OSS berbasis risiko (RBA):** meningkatkan kualitas layanan dan kapabilitas aplikasi OSS agar proses perizinan investasi lebih cepat, transparan, dan efisien.
- **Sinergi pusat-daerah:** memperkuat koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan mengatasi hambatan birokrasi.

b) Penguatan *Hard Infrastructures*

- **Infrastruktur konektivitas:** membangun dan memperkuat jalan antarkota, *hauling road*, serta jalur kereta logistik guna memperlancar distribusi bahan baku dan produk olahan. Selain itu, realisasi pembangunan *New Palembang Port* sebagai pelabuhan baru mampu menampung kapal berkapasitas besar, sekaligus mendukung pelabuhan eksisting (Boom Baru).
- **Kawasan industri siap pakai:** memastikan ketersediaan lahan *clean and clear* serta mempercepat pengembangan kawasan industri strategis (KEK Tanjung Api-Api, Tanjung Enim, Sriwijaya CBD) agar investor mendapatkan kepastian lokasi usaha.
- **Ketersediaan energi dan air:** menjamin pasokan energi listrik dan air baku yang memadai serta berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan aktivitas industri.

Selain memperbaiki iklim investasi, langkah yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan hilirisasi benar-benar berjalan efektif. Strategi ini tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan insentif, tetapi juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, teknologi pengolahan yang memadai, serta diversifikasi produk hilir yang mampu bersaing di pasar global. Upaya peningkatan kualitas SDM menjadi kunci, antara lain melalui program *link and match* antara institusi pendidikan dengan kebutuhan industri, pendirian sekolah vokasi dan pusat pelatihan berbasis kemitraan dengan swasta, serta insentif bagi perusahaan yang aktif dalam menyediakan program magang bersertifikat. Di sisi lain, kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga riset, dan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat transfer teknologi hilirisasi serta pengembangan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Tujuan hilirisasi sendiri mencakup diversifikasi produk olahan dari komoditas unggulan Sumatera Selatan. Batu bara diarahkan pada pengembangan gasifikasi, Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG, pupuk, dan bahan kimia dasar. Kelapa sawit ditujukan untuk menghasilkan produk oleokimia, biodiesel, serta pangan olahan. Sementara karet memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk ban kendaraan, sarung tangan medis, hingga kebutuhan industri lainnya. Dengan diversifikasi tersebut, struktur ekonomi akan lebih bernilai tambah, menyerap tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekspor daerah.

4) Mengembangkan Ekonomi Digital

Pengembangan ekonomi digital di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa tantangan, yang tercermin dalam penurunan peringkat dalam *East Ventures - Digital Competitiveness Index* (EV-DCI) 2025. EV-DCI bertujuan untuk memetakan perkembangan pilar daya saing digital dan sektor yang turut membangun ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia. Sumatera Selatan turun enam peringkat dari peringkat 22 pada tahun 2024 menjadi peringkat 28 pada tahun 2025, dengan skor 37,1. Penurunan ini menunjukkan adanya urgensi perbaikan dalam beberapa aspek daya saing digital, terutama terkait dengan infrastruktur digital dan literasi digital masyarakat. Meskipun terdapat peningkatan pada jaringan 4G di Sumatera Selatan, masih terdapat wilayah dengan blank spot, yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan internet yang memadai. Selain itu, masih belum optimalnya tingkat literasi digital dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi hambatan utama dalam optimalisasi potensi ekonomi digital di Sumatera Selatan.

Untuk meningkatkan ekonomi digital di Sumatera Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil:

a) Perluasan Infrastruktur Digital

- Memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital, terutama di *blank spot* yang belum terjangkau layanan internet yang memadai.
- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah (melalui TP2DD), pemerintah pusat, dan operator telekomunikasi untuk memastikan pemerataan akses internet, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil.

b) Peningkatan Literasi Digital

- Menggalakkan program pelatihan digital bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada UMKM agar dapat memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha.
- Memperkuat regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda), yang mendorong penggunaan layanan pembayaran nontunai dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

5) Mendorong Sektor Ekonomi dan Keuangan Hijau sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pengembangan ekonomi dan keuangan hijau merupakan salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang berkelanjutan. Sinergi antara Pemerintah Daerah, industri, dan lembaga keuangan

diperlukan untuk mendorong proyek-proyek berbasis hijau, baik melalui penyediaan regulasi yang mendukung, pendanaan, maupun insentif fiskal. Dukungan antarpemangku kepentingan akan memastikan bahwa agenda pembangunan hijau tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Adapun LU Pertanian dan UMKM memiliki posisi strategis sebagai lokomotif ekonomi hijau di Sumatera Selatan. Implementasi praktik berkelanjutan di sektor pertanian—misalnya penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kelapa sawit—dapat meningkatkan daya saing, memperkuat akseptasi produk Sumatera Selatan di pasar internasional, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, integrasi pembiayaan hijau dalam mendukung UMKM dan petani akan membantu mereka mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan atau sistem irigasi hemat energi, sehingga tidak hanya menurunkan biaya produksi, tetapi juga mengurangi emisi karbon.

Untuk mempercepat adopsi praktik ekonomi hijau di tingkat akar rumput, peran *local champion* sangat penting sebagai *role model*. *Local champion* merupakan pelaku UMKM yang memiliki dedikasi tinggi, terbuka pada inovasi, serta mampu mendorong perubahan mindset di komunitasnya. Melalui program *capacity building*, pendampingan, dan *showcasing best practices*, *local champion* dapat menjadi motor penyebaran inovasi hijau ke kelompok-kelompok UMKM lainnya. Dengan sinergi Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia, penguatan kapasitas ini akan memperluas dampak ekonomi hijau secara lebih inklusif.

Selain penguatan di tingkat komunitas, langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah membangun ekosistem pembiayaan hijau yang kokoh. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait dapat memperkuat dukungan insentif bagi UMKM yang mengadopsi praktik berkelanjutan, sekaligus mendorong lembaga keuangan mengembangkan produk pembiayaan ramah lingkungan. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah meluncurkan **Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)** yang memberikan keringanan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk UMKM dan proyek ekonomi hijau. Dengan plafon insentif yang diperluas hingga 5% dan realisasi ratusan triliun rupiah secara nasional, KLM menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan hijau di daerah. Pemanfaatan KLM oleh perbankan di Sumatera Selatan, apabila dipadukan dengan kebijakan insentif fiskal daerah,

akan memperkuat aliran kredit ke sektor pertanian berkelanjutan, hilirisasi komoditas, serta UMKM hijau. Sinergi ini tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Selatan menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.







Lampiran

A. Tabel Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Sumatera Selatan (mtm%)													
2024	1	-0,08	-0,11	-0,80	0,10	0,07	0,21	-0,29	-0,07	-0,24	0,00	0,02	0,33
	2	0,01	0,20	-0,31	-0,05	0,02	0,07	-0,11	-0,11	-0,36	0,01	0,01	-0,08
	3	0,25	0,55	-0,40	0,03	-0,22	-0,03	0,12	-0,14	0,00	0,00	0,55	0,64
	4	0,43	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	0,00	0,02	0,12
	5	0,06	-0,05	-0,28	0,17	-0,70	0,05	0,04	-0,02	0,00	0,00	0,28	1,01
	6	-0,03	-0,48	0,25	0,28	-0,01	0,17	0,24	0,00	0,43	0,00	0,16	0,26
	7	-0,29	-1,68	0,35	-0,10	0,07	0,62	0,29	0,04	0,82	1,73	0,01	0,68
	8	-0,19	-1,06	0,17	0,03	0,16	0,24	0,32	0,01	-0,02	0,04	0,01	0,84
	9	-0,12	-0,51	-0,03	0,08	0,12	0,08	-0,12	-0,04	0,06	0,04	0,09	0,29
	10	0,09	0,07	0,02	0,11	0,00	0,00	-0,45	0,02	0,20	0,00	0,00	1,34
	11	0,58	1,49	-0,03	0,03	-0,14	0,14	0,40	0,01	-0,36	0,05	0,10	0,93
	12	0,50	1,72	0,00	-0,10	-0,03	0,19	-0,06	-0,01	0,08	0,00	0,03	-0,13
2025	1	-0,36	2,27	-0,21	-8,35	0,02	0,06	0,20	-0,07	0,45	0,00	0,21	0,86
	2	-0,41	-0,79	0,06	-3,58	0,23	0,07	0,51	-0,02	0,20	0,00	0,04	2,71
	3	1,53	1,18	1,15	7,71	-0,04	0,18	-0,17	-0,01	0,04	0,00	0,01	1,98
	4	1,39	0,48	-0,03	6,09	0,09	0,00	0,48	-0,39	0,08	0,00	0,18	4,63
	5	-0,35	-0,81	-0,79	-0,01	-0,11	0,00	-0,11	0,08	0,04	0,00	0,47	-0,86
	6	0,08	-0,10	0,11	-0,03	0,08	0,31	0,02	0,01	0,69	0,00	0,07	0,92
	7	0,14	0,30	-0,15	0,03	0,05	0,05	-0,15	0,00	0,02	0,68	0,06	0,27
	8	-0,04	-0,24	0,01	0,11	0,16	0,01	-0,23	-0,05	-0,07	0,07	0,06	0,44
	9	0,27	0,41	-0,19	-0,01	-0,09	0,10	0,03	0,02	-0,03	0,07	0,06	1,67
	10	0,13	-0,30	-0,11	-0,02	-0,18	-0,06	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	2,95
	11	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,07	0,05	-0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,32
	12	0,49	1,06	-0,08	0,06	0,03	-0,01	0,39	0,00	-0,01	0,00	0,13	1,11
2026	1	0,05	-1,14	0,11	0,09	0,04	0,08	-0,38	-0,01	0,00	0,16	0,01	4,81
	2	0,58	1,11	0,11	0,00	0,02	-0,01	-0,21	0,07	-0,06	0,00	0,05	2,76
	3	0,29	0,80	0,82	0,02	0,12	0,06	0,63	0,09	0,00	0,00	0,08	-1,07
	4	-0,04	-0,18	0,52	0,11	0,36	0,07	0,18	0,14	0,58	0,00	0,47	-1,40
	5	0,61	1,39	0,89	0,32	0,41	0,02	0,68	0,27	0,07	0,00	0,33	-0,61
	6	0,36	0,36	0,10	0,11	0,24	0,20	1,92	0,05	0,19	0,04	0,31	-0,85

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Palembang (mtm%)													
2024	1	-0,02	0,17	-0,05	0,01	0,02	0,17	-0,59	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,27
	2	0,21	0,85	0,01	-0,02	0,04	0,11	-0,13	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,03
	3	0,46	1,68	-0,69	0,06	-0,24	-0,19	0,16	0,00	0,00	0,00	0,20	0,34
	4	0,38	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	5	0,10	0,13	-0,02	-0,01	-0,94	0,08	0,25	0,01	0,00	0,00	0,17	1,00
	6	-0,07	-0,56	0,24	0,00	0,03	0,05	0,35	0,00	0,01	0,00	0,19	0,03
	7	-0,31	-2,15	0,25	-0,08	0,08	0,36	0,41	0,05	0,51	1,88	0,00	0,71
	8	-0,27	-1,40	-0,01	0,01	0,21	0,34	0,25	0,00	-0,06	0,06	0,00	0,40
	9	-0,13	-0,68	-0,01	0,05	0,17	0,05	-0,07	-0,03	0,07	0,00	0,13	0,27
	10	0,09	0,14	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,49	0,00	0,28	0,00	0,00	1,55
	11	0,39	0,91	0,18	-0,01	-0,23	0,19	0,52	0,00	-0,45	0,06	0,06	1,02
	12	0,42	1,80	0,03	0,03	0,12	0,26	0,11	0,02	0,40	0,00	0,01	0,32
2025	1	-0,47	2,43	-0,03	-7,70	0,08	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,09	0,96
	2	-0,30	-0,78	0,08	-2,94	0,26	0,10	0,59	-0,03	0,30	0,00	0,03	2,88
	3	1,52	1,22	0,36	7,25	-0,09	0,24	-0,22	0,00	0,06	0,00	0,00	2,08
	4	1,33	0,45	-0,04	4,95	0,13	-0,13	0,68	-0,40	0,13	0,00	0,25	4,34
	5	-0,19	-0,49	-0,03	-0,10	-0,21	-0,03	-0,05	-0,02	0,04	0,00	0,69	-0,99
	6	0,09	0,02	0,01	-0,06	0,14	0,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,81
	7	0,17	0,39	0,01	0,05	0,10	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,67	0,08	0,45
	8	-0,07	-0,40	0,03	0,11	0,24	-0,01	-0,25	-0,08	0,01	0,09	0,09	0,32
	9	0,30	0,61	-0,01	0,00	-0,17	0,17	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	1,69
	10	0,16	-0,17	-0,17	0,00	-0,30	-0,09	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
	11	-0,01	0,03	-0,01	0,00	-0,12	0,06	-0,16	0,00	0,09	0,00	0,00	0,19
	12	0,39	0,91	-0,14	0,02	0,04	-0,01	0,42	0,00	0,22	0,00	0,16	0,73
2026	1	0,05	-1,31	0,10	0,07	0,05	-0,02	-0,44	0,00	0,07	0,19	0,00	4,88
	2	0,58	1,35	-0,01	0,00	0,04	0,00	-0,15	0,10	-0,01	0,00	0,00	2,62
	3	0,28	0,97	1,05	0,00	0,12	0,08	0,60	0,12	0,00	0,00	0,02	-1,35
	4	-0,04	-0,23	0,40	0,08	0,36	0,12	0,24	0,21	0,61	0,00	0,72	-1,53
	5	0,61	1,44	0,90	0,36	0,36	0,01	0,55	0,32	-0,08	0,00	0,26	-0,09
	6	0,30	0,33	0,05	0,08	0,21	0,29	1,51	0,00	0,17	0,05	0,27	-0,80

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Lubuklinggau (mtm%)												
2024	1	-0,13	-0,56	0,00	0,08	0,06	0,00	-0,11	0,00	-0,01	0,00	0,63
	2	0,20	0,77	0,00	0,02	-0,12	0,10	-0,43	0,05	-0,01	0,00	0,79
	3	0,30	0,56	0,23	0,05	0,01	0,00	0,19	-0,03	0,33	0,00	0,72
	4	0,36	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,03	0,10
	5	0,14	0,28	0,02	0,15	0,19	-0,01	-0,22	-0,05	0,00	0,00	0,14
	6	-0,10	-0,45	0,00	0,23	-0,06	0,06	0,17	-0,44	-0,16	0,00	-0,03
	7	-0,31	-1,34	0,09	0,02	-0,08	-0,11	-0,22	0,09	0,00	1,20	0,91
	8	-0,24	-1,28	0,01	0,07	0,10	0,18	0,11	-0,02	0,00	0,00	1,55
	9	-0,06	-0,52	0,05	0,08	-0,04	0,04	-0,11	-0,01	0,06	0,58	0,69
	10	0,02	0,06	0,00	0,04	-0,06	0,15	-0,41	0,00	-0,02	0,00	0,69
	11	0,26	0,59	0,00	0,00	0,02	0,02	0,08	0,00	0,00	0,25	0,93
	12	0,58	1,58	0,00	0,03	0,19	0,03	0,52	0,03	0,00	0,03	0,20
2025	1	-0,64	1,67	0,00	-8,59	0,42	0,73	0,03	-0,08	0,14	0,00	0,64
	2	-0,13	0,53	0,00	-4,08	0,75	-0,01	0,30	0,00	0,02	0,00	1,98
	3	1,41	1,06	0,33	7,67	-0,08	0,08	-0,45	0,01	0,01	0,00	1,58
	4	1,29	-0,02	0,00	7,31	-0,08	0,00	0,05	-0,46	0,00	0,00	3,57
	5	-0,21	-1,07	0,00	0,00	0,56	0,39	-0,05	-0,11	0,08	0,00	0,44
	6	0,11	0,08	0,00	0,00	-0,09	0,34	0,32	0,00	0,61	0,00	0,48
	7	0,21	0,28	0,50	0,10	0,15	0,00	0,03	0,00	1,36	0,65	9,16
	8	0,07	0,26	-0,01	0,00	0,01	0,10	-0,41	0,03	0,21	0,10	0,10
	9	0,27	0,29	0,00	0,00	0,01	0,10	0,23	0,04	0,00	0,75	1,28
	10	0,09	-0,65	0,06	0,00	0,13	0,02	0,03	0,07	0,02	0,00	3,11
	11	0,02	-0,23	0,15	-0,08	0,03	0,12	0,05	-0,06	0,04	0,00	0,88
	12	0,37	0,84	0,03	0,08	0,01	0,01	0,38	0,05	0,02	0,00	0,64
2026	1	0,03	-0,79	0,00	0,05	0,05	0,31	-0,13	0,00	-0,01	0,00	2,82
	2	0,41	0,45	0,03	0,00	0,04	-0,03	-0,13	0,12	0,00	0,00	2,89
	3	0,27	0,83	1,19	0,03	0,18	0,10	0,13	0,11	0,00	0,00	-1,17
	4	0,15	-0,56	0,00	0,19	1,86	-0,04	1,35	1,46	2,66	0,00	-1,34
	5	0,83	1,51	-0,10	0,62	0,28	0,01	0,70	0,92	2,05	0,05	1,14
	6	0,43	0,41	0,12	0,06	0,39	0,00	2,53	0,32	-0,20	0,03	-0,53

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Ogan Komering Ilir (mtm%)													
2024	1	-0,11	0,09	-4,36	0,88	0,37	0,33	-0,16	0,00	-0,55	0,00	0,06	0,31
	2	-0,13	-0,22	-0,11	-0,42	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,04	0,24
	3	0,05	-0,55	0,20	-0,15	-0,33	0,44	-0,01	-1,04	-0,17	0,00	2,19	2,23
	4	0,42	0,02	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,12	0,12
	5	0,11	-0,08	-1,52	1,67	-0,04	-0,03	-0,03	-0,23	0,00	0,00	0,57	0,83
	6	0,19	-0,57	0,48	2,84	0,00	0,03	-0,05	0,24	2,75	0,00	0,00	1,60
	7	-0,40	-1,55	0,75	-0,37	0,07	2,89	0,00	0,00	3,52	1,61	0,06	1,19
	8	-0,18	-0,97	0,71	0,16	0,00	0,00	0,95	0,00	0,09	0,00	0,00	1,07
	9	-0,16	-0,36	-0,15	-0,01	0,00	0,00	-0,21	-0,11	0,07	0,16	0,00	0,26
	10	0,07	-0,26	0,13	1,35	0,00	0,00	-0,32	0,11	0,18	0,00	0,00	1,03
	11	0,92	2,20	-0,81	0,19	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,47	0,00	0,32	0,21
	12	0,70	1,62	0,10	-0,34	0,16	0,00	-0,05	0,00	0,23	0,00	0,06	0,55
2025	1	-0,03	2,16	-1,12	-11,76	-0,07	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,87	0,86
	2	-0,44	-0,40	0,04	-5,57	0,04	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	3	1,68	0,97	5,25	11,47	0,07	0,00	-0,21	-0,05	0,00	0,00	0,02	1,78
	4	1,34	0,19	0,00	10,82	0,01	0,00	-0,13	-0,38	0,00	0,00	0,00	5,56
	5	-0,49	-0,49	-4,36	0,00	-0,01	0,02	~0	0,38	0,00	0,00	0,00	-0,66
	6	0,09	-0,44	0,58	-0,01	-0,03	0,13	-0,20	0,00	4,46	0,00	0,27	12,16
	7	0,05	0,22	-1,07	-0,05	-0,19	0,14	0,20	0,00	0,00	1,07	0,00	0,11
	8	-0,11	-0,48	-0,04	0,21	0,00	-0,13	-0,06	0,00	-0,62	0,00	0,00	1,13
	9	0,03	-0,18	-1,09	-0,11	0,08	-0,25	0,02	0,00	-0,17	0,35	0,32	1,78
	10	0,05	-0,23	0,00	-0,16	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
	11	0,04	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
	12	0,67	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,03	0,00	0,00	0,09	1,60
2026	1	0,08	-0,71	0,30	0,07	0,02	0,01	-0,21	-0,13	0,00	0,00	0,00	4,61
	2	0,60	0,84	0,22	0,01	0,05	0,00	-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,09	3,08
	3	0,36	0,80	0,49	0,12	0,18	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,79
	4	-0,06	-0,11	1,18	0,12	-0,09	-0,09	0,22	0,00	0,04	0,00	0,00	-1,18
	5	0,47	1,16	0,65	0,11	0,29	0,00	0,43	0,12	0,00	0,00	0,00	-1,44
	6	0,47	0,29	0,4	0,29	0,16	-0,01	3,46	0,00	0,15	0,00	0,23	-0,82

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Muara Enim (mtm%)													
2024	1	-0,28	-1,14	0,00	0,17	-0,05	0,50	1,66	-0,49	-0,96	0,00	0,10	0,58
	2	-0,93	-1,57	-2,28	-0,10	-0,05	-0,11	0,00	-0,80	-1,37	0,00	0,00	-1,03
	3	-0,69	-1,81	0,00	0,03	-0,02	0,44	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,64
	4	0,81	0,25	0,00	0,03	0,01	0,01	0,14	0,00	0,06	0,00	0,01	0,30
	5	-0,29	-0,75	0,00	0,02	-0,72	0,00	-1,23	0,03	0,00	0,00	0,58	1,55
	6	-0,02	-0,09	0,05	0,01	-0,21	1,12	-0,19	-0,03	0,33	0,00	0,25	0,10
	7	-0,07	-0,30	0,42	0,01	0,12	0,00	0,00	0,02	0,00	0,59	0,00	-0,09
	8	0,24	0,00	0,41	-0,01	0,07	-0,06	0,20	0,01	0,00	0,00	0,05	2,49
	9	-0,02	-0,14	0,01	0,43	0,03	0,30	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	10	0,12	0,20	0,00	-0,31	0,31	0,00	-0,18	0,07	-0,08	0,00	0,00	0,90
	11	1,28	2,85	0,00	0,26	0,11	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	1,31
	12	0,60	1,70	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,02	0,00	-1,60	0,00	0,00	-0,07
2025	1	-0,02	2,06	0,00	-10,14	-0,40	0,14	0,38	-0,45	2,79	0,00	0,00	0,44
	2	-1,02	-1,73	0,00	-6,75	-0,01	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,16	2,85
	3	1,40	1,34	0,00	7,92	0,08	0,15	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
	4	1,80	1,16	0,00	10,41	0,06	0,18	-0,10	-0,38	0,00	0,00	0,00	5,46
	5	-0,98	-2,19	0,00	0,68	-0,04	-0,11	-0,71	0,43	0,00	0,00	0,00	-0,96
	6	-0,04	-0,13	0,00	0,18	-0,01	-0,05	-0,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,30
	7	0,06	0,15	0,00	0,68	-0,28	0,48	0,20	-0,37	2,22	0,42	0,16	10,23
	8	0,22	0,47	0,00	-0,01	0,03	0,34	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
	9	0,35	0,53	0,00	-0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
	10	0,13	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,73
	11	0,12	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
	12	0,85	1,40	0,00	0,41	0,04	0,00	0,33	0,01	-1,20	0,00	0,00	2,59
2026	1	0,06	-1,18	0,00	0,33	-0,02	0,62	-0,23	0,07	-0,25	0,00	0,00	5,45
	2	0,64	0,86	0,55	0,00	-0,14	-0,03	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,19	3,09
	3	0,24	0,22	-0,04	0,07	-0,04	-0,04	1,40	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,05
	4	-0,18	0,02	0,52	0,18	0,09	0,00	-0,88	-0,54	0,00	0,00	0,00	-1,08
	5	0,77	1,51	1,64	0,10	1,03	0,07	1,99	-0,04	-0,20	0,00	0,00	-2,40
	6	0,49	0,53	0,00	0,14	0,44	0,00	2,75	0,29	0,53	0,00	0,75	-1,23

B. Tabel Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Sumatera Selatan (yoy%)													
2024	1	3,35	7,71	1,04	1,67	0,06	1,10	0,95	-0,13	2,35	2,18	2,17	3,52
	2	3,15	7,81	0,28	1,64	-0,01	1,30	0,91	-0,21	1,51	1,65	1,51	2,75
	3	3,24	8,13	-0,50	1,83	-0,24	1,34	0,75	-0,38	1,45	1,62	1,78	3,03
	4	9,00	7,61	-1,39	1,84	-0,44	1,19	0,80	-0,47	1,90	1,62	1,82	4,15
	5	2,98	6,64	-1,68	2,02	-1,31	1,24	1,64	-0,52	1,63	1,47	2,05	5,12
	6	2,48	4,44	-1,18	2,30	-1,30	1,26	1,91	-0,51	2,07	1,47	1,97	5,94
	7	1,87	2,02	-1,40	2,17	-0,86	1,92	2,04	-0,28	1,61	2,86	1,59	6,45
	8	1,80	1,72	-1,18	2,17	-0,78	1,65	2,02	-0,26	2,00	1,78	1,56	7,29
	9	1,40	0,47	-1,41	2,17	-0,61	1,73	1,81	-0,42	2,67	1,82	1,53	7,35
	10	1,09	0,20	-1,39	0,70	-0,54	1,71	1,13	-0,39	2,05	1,82	1,40	8,51
	11	0,73	-1,21	-1,17	0,68	-0,64	1,78	1,60	-0,37	1,55	1,87	1,40	1,50
	12	1,20	0,49	-0,48	0,61	-0,67	1,81	1,35	-0,37	1,27	1,87	1,52	8,09
2025	1	0,92	2,89	0,11	7,89	0,72	1,66	1,84	0,37	1,97	1,87	1,71	8,66
	2	0,49	1,87	0,48	-11,15	-0,51	1,66	2,47	-0,28	2,54	1,86	1,74	11,69
	3	1,77	2,50	2,05	-4,32	-0,34	1,88	2,17	-0,15	2,58	1,86	1,20	13,18
	4	2,74	2,60	1,41	1,48	-0,24	1,81	1,69	-0,48	1,98	1,86	1,12	16,44
	5	2,33	1,82	0,89	1,30	0,36	1,76	1,54	-0,38	2,02	1,86	1,31	14,28
	6	2,44	2,21	0,75	0,99	0,45	1,90	1,32	-0,37	2,28	1,86	1,21	15,02
	7	2,88	4,27	0,25	1,11	0,43	1,32	0,87	-0,41	1,47	0,80	1,26	14,55
	8	3,04	5,13	0,10	1,19	0,43	1,09	0,32	-0,47	1,41	0,84	1,30	14,10
	9	3,44	6,11	-0,07	1,10	0,22	1,11	0,46	-0,41	1,32	0,87	1,28	15,67
	10	3,49	5,72	-0,19	0,97	0,04	1,05	0,89	-0,43	1,12	0,87	1,28	17,50
	11	2,91	4,18	-0,17	0,95	0,11	0,96	0,36	-0,44	1,54	0,82	1,18	16,78
	12	2,91	3,50	-0,24	1,11	0,17	0,75	0,82	-0,43	1,46	0,82	1,28	18,23
2026	1	3,33	0,05	0,08	10,42	0,19	0,77	0,24	-0,37	1,00	0,98	1,08	22,86
	2	4,36	1,97	0,13	14,53	-0,02	0,70	-0,48	-0,28	0,74	0,98	1,09	22,93
	3	3,09	1,60	-0,2	6,35	0,14	0,57	0,32	-0,18	0,71	0,98	1,17	19,24
	4	1,63	0,92	0,35	0,35	0,41	0,64	0,02	0,35	1,21	0,98	1,47	12,37
	5	2,61	3,16	2,05	0,68	0,93	0,66	0,80	0,54	1,24	0,98	1,33	12,65
	6	2,89	3,63	2,05	0,81	1,09	0,55	2,72	0,59	0,74	1,02	1,58	10,68

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Palembang (yoy%)													
2024	1	2,54	6,21	1,07	1,95	0,12	0,92	0,57	0,27	0,31	2,13	1,10	3,04
	2	2,63	7,16	0,65	2,11	0,10	1,07	0,53	0,27	0,27	1,57	0,70	2,13
	3	2,90	8,54	-0,06	2,16	-0,20	0,98	0,32	0,23	0,23	1,53	0,87	2,02
	4	2,97	8,76	-0,16	2,16	-0,39	0,98	0,31	0,13	0,27	1,53	0,63	2,72
	5	3,03	8,10	-0,19	2,15	-1,34	1,06	1,62	0,14	0,27	1,53	0,71	3,68
	6	2,64	6,09	-0,07	2,16	-1,35	0,91	1,99	0,14	0,28	1,53	0,64	4,47
	7	2,09	3,07	-0,16	2,09	-0,97	1,28	2,28	0,19	0,73	3,21	0,64	5,18
	8	1,85	2,39	-0,14	2,10	-0,82	0,94	2,31	0,19	0,53	1,95	0,61	5,45
	9	1,41	0,73	-0,16	2,04	-0,58	0,93	2,10	0,01	0,60	1,95	0,74	5,56
	10	1,01	0,51	-0,16	0,02	-0,76	0,94	1,37	0,01	0,77	1,95	0,72	6,86
	11	0,95	-0,19	0,01	0,01	-0,94	1,26	1,98	0,01	0,34	2,00	0,78	7,35
	12	1,24	1,30	0,02	0,01	1,05	1,43	1,63	0,06	0,74	2,00	0,79	6,72
2025	1	0,78	3,59	0,00	-7,71	-0,99	1,26	2,42	-0,06	0,89	2,00	0,88	7,46
	2	0,27	1,92	0,07	-10,41	-0,77	1,25	3,16	-0,09	1,24	1,99	0,91	10,53
	3	1,32	1,45	1,13	-3,98	-0,63	1,68	2,77	-0,09	1,30	1,99	0,70	12,44
	4	2,28	1,44	0,97	0,76	-0,46	1,65	2,37	-0,42	1,36	1,99	0,92	15,88
	5	1,98	0,81	0,96	0,67	0,28	1,54	2,07	-0,45	1,40	1,40	1,99	1,45
	6	2,14	1,39	0,73	0,62	0,39	1,90	1,77	-0,45	1,39	1,99	1,29	14,48
	7	2,63	4,02	0,49	0,74	0,41	1,54	1,09	-0,50	0,88	0,79	1,36	14,19
	8	2,83	5,07	0,53	0,84	0,43	1,18	0,59	0,58	0,94	0,82	1,45	14,09
	9	3,28	6,42	0,53	0,79	0,10	1,31	0,69	-0,53	0,88	0,82	1,32	15,71
	10	3,36	6,09	0,35	0,79	-0,17	1,22	1,14	-0,53	0,59	0,82	1,32	17,14
	11	2,95	5,16	0,17	0,80	-0,06	1,09	0,45	-0,53	1,13	0,77	1,27	16,18
	12	2,92	4,25	0,06	0,85	0,10	0,82	0,98	-0,51	0,95	0,77	1,42	17,40
2026	1	3,45	0,43	0,19	9,33	0,07	0,80	0,35	-0,51	0,91	0,96	1,33	21,96
	2	4,37	2,59	0,10	12,65	-0,15	0,70	-0,39	-0,38	0,60	0,96	1,30	21,65
	3	3,1	2,34	0,79	5,04	0,06	0,53	0,43	-0,26	0,54	0,96	1,32	17,57
	4	1,71	1,65	1,22	0,16	0,29	0,68	-0,02	0,35	1,02	0,96	1,8	10,95
	5	2,53	3,62	2,17	0,62	0,86	0,72	0,58	0,69	0,91	0,96	1,37	11,96
	6	2,74	3,94	2,21	0,76	0,93	0,61	2,05	0,69	1,08	1,01	1,61	10,17

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Lubuklinggau (yoy%)													
2024	1	2,01	4,29	0,31	0,45	0,75	0,96	1,06	0,01	1,58	1,77	0,52	3,66
	2	2,15	5,08	0,31	0,37	0,57	1,00	0,70	0,06	0,82	1,77	0,48	3,52
	3	2,36	5,59	0,46	0,47	0,56	1,00	0,59	-0,04	1,05	1,77	1,21	3,39
	4	2,45	5,36	0,85	0,39	0,53	0,96	0,80	-0,06	1,22	1,77	1,52	4,79
	5	2,51	4,98	0,93	0,60	0,78	0,98	1,37	-0,11	1,22	1,77	1,66	5,26
	6	2,16	3,71	0,93	0,78	0,82	1,03	1,61	-0,68	0,49	1,77	1,75	5,15
	7	1,45	1,42	1,01	0,75	0,58	0,87	1,10	-0,57	0,29	2,14	1,73	6,03
	8	1,31	0,80	1,02	0,77	0,68	1,00	0,94	-0,68	0,29	1,20	1,68	7,47
	9	1,11	-0,07	1,07	0,82	0,68	1,04	0,86	-0,81	-0,04	1,78	1,79	7,95
	10	0,89	-0,56	1,07	0,84	0,60	0,78	0,25	-0,71	-0,29	1,78	1,79	8,34
	11	0,68	-1,36	1,06	0,84	0,33	0,74	0,11	-0,37	-0,30	1,78	2,05	8,96
	12	1,02	-0,08	1,06	0,82	0,22	0,45	0,22	-0,38	0,25	1,78	1,82	8,23
2025	1	0,50	2,17	1,06	-7,92	0,58	1,18	0,35	-0,46	0,40	1,78	1,82	8,25
	2	0,16	1,92	1,06	-11,69	1,45	1,07	1,08	-0,51	0,42	1,78	1,78	10,21
	3	1,28	2,43	1,17	-4,96	1,36	1,15	0,44	-0,47	0,20	1,78	1,18	11,67
	4	2,22	2,11	0,50	1,92	1,28	1,15	-0,32	-0,93	0,04	1,78	1,09	14,07
	5	1,85	0,74	0,48	1,77	1,66	1,55	-0,15	-0,99	0,12	1,78	1,45	13,92
	6	2,07	1,29	0,48	1,55	1,63	1,83	-0,01	-0,55	0,89	1,78	1,36	14,50
	7	2,61	2,95	0,89	1,62	1,89	1,94	0,24	-0,64	2,26	1,23	1,36	13,67
	8	2,92	4,55	0,87	1,55	1,77	1,86	-0,28	-0,59	2,48	1,34	1,50	12,04
	9	3,26	5,40	0,82	1,47	1,82	1,92	0,05	-0,54	2,42	1,51	1,41	12,69
	10	3,34	4,65	0,88	1,44	2,01	1,79	0,50	-0,47	2,46	1,51	1,58	14,11
	11	3,09	3,80	1,03	1,36	2,02	1,90	0,63	-0,53	2,49	1,51	1,33	15,34
	12	2,87	3,05	1,06	1,41	1,84	1,88	0,50	-0,51	2,51	1,51	1,41	15,84
2026	1	3,57	0,56	1,06	10,99	1,46	1,45	0,34	-0,43	2,36	1,51	1,57	18,35
	2	4,13	0,49	1,09	15,71	0,75	1,43	-0,08	-0,30	2,34	1,51	1,77	19,40
	3	2,95	0,26	1,96	7,5	1,01	1,45	0,51	-0,20	2,34	1,51	1,87	16,16
	4	1,79	-0,28	1,96	0,37	2,97	1,41	1,8	1,72	5,06	1,51	1,61	10,66
	5	2,85	2,31	1,86	0,99	2,68	1,03	2,56	2,77	7,13	1,56	2,27	10,27
	6	3,18	2,65	1,99	1,05	1,05	0,69	4,82	3,09	6,26	1,59	2,29	9,16

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Ogan Komering Ilir (yoy%)													
2024	1	4,92	9,80	-3,48	1,44	1,16	2,48	0,39	-0,37	6,52	5,77	2,59	5,28
	2	4,60	9,73	-4,18	-0,31	0,89	3,35	0,56	-0,18	2,32	4,57	2,30	5,40
	3	4,56	9,31	-5,89	0,74	0,65	3,75	0,58	-1,22	1,86	4,57	3,89	6,51
	4	3,54	7,49	10,04	0,79	0,15	2,02	0,51	-1,46	1,45	4,57	4,90	6,54
	5	2,81	5,83	11,46	2,47	-0,46	1,99	-0,22	-1,90	-0,51	2,23	5,49	7,50
	6	2,27	3,16	-9,44	5,33	-0,24	2,02	-0,17	-1,57	2,49	2,23	5,06	9,33
	7	1,78	1,67	-9,17	5,60	-0,06	4,97	-0,23	-1,55	5,64	1,61	4,18	10,42
	8	1,95	1,55	-8,43	5,44	-0,03	4,97	0,72	-1,55	5,73	1,61	4,18	11,65
	9	1,72	1,01	-8,22	5,30	-0,03	4,97	0,50	-1,66	5,80	1,77	4,18	11,82
	10	1,44	0,07	-8,11	6,30	-0,03	4,97	0,09	-1,55	6,00	1,77	4,18	12,73
	11	0,31	-2,68	-5,82	5,91	0,08	3,68	0,27	-1,58	5,25	1,77	4,52	11,46
	12	1,48	-0,65	-1,92	5,81	0,25	3,68	0,22	-1,26	5,68	1,77	4,59	11,83
2025	1	1,57	1,40	1,41	-7,45	-0,19	3,34	0,59	-1,26	6,26	1,77	5,44	12,45
	2	1,25	1,21	1,57	12,23	0,19	3,34	0,84	1,26	7,30	1,77	5,40	14,41
	3	2,91	2,77	6,68	-2,01	0,22	2,89	0,63	-0,28	7,48	1,77	3,16	13,91
	4	3,85	2,90	3,78	8,67	0,23	2,89	0,49	-0,43	6,47	1,77	1,91	18,19
	5	3,23	2,49	0,79	6,89	0,26	2,94	0,52	0,18	6,47	1,77	1,34	16,45
	6	3,13	2,63	0,88	3,93	0,23	3,04	0,38	-0,05	8,24	1,77	1,61	17,07
	7	3,60	4,47	-0,94	4,26	-0,02	0,29	0,58	-0,05	4,56	1,23	1,56	15,56
	8	3,67	4,99	-1,67	4,32	-0,02	0,16	-0,44	-0,05	3,82	1,23	1,56	15,63
	9	3,86	5,17	-2,60	4,22	0,06	-0,09	-0,21	0,06	3,57	1,42	1,88	17,39
	10	3,85	5,21	-2,72	2,66	0,16	-0,09	0,17	-0,05	3,38	1,42	1,88	10,46
	11	2,93	3,02	-1,93	2,52	0,16	-0,09	0,07	-0,05	3,88	1,42	1,49	17,5
	12	2,90	2,63	-2,02	2,87	0,00	-0,09	0,31	-0,08	3,64	1,42	1,58	19,38
2026	1	3,02	-0,25	-0,63	16,66	0,09	-0,09	-0,12	-0,21	3,64	1,42	0,7	23,81
	2	4,09	0,99	-0,44	23,56	0,10	-0,09	-0,76	-0,21	3,22	1,42	0,79	25,13
	3	2,74	0,81	-4,95	10,97	0,20	-0,09	-0,23	-0,16	3,22	1,42	1,04	21,97
	4	1,32	0,52	-3,83	0,26	0,11	-0,17	0,12	0,22	3,27	1,42	1,04	14,18
	5	2,3	2,19	1,2	0,36	0,41	-0,19	0,55	-0,04	3,27	1,42	1,04	13,27
	6	2,68	2,93	1,02	0,67	0,60	-0,33	4,24	-0,04	-1	1,42	1	9,98

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Muara Enim (yoy%)													
2024	1	6,31	11,35	7,75	0,36	-2,31	0,72	4,34	-1,85	8,98	0,00	8,14	4,18
	2	4,63	8,53	4,73	0,49	-2,29	0,57	4,15	-2,64	7,49	0,00	5,16	2,90
	3	3,76	6,12	4,73	0,99	-2,24	1,01	4,15	-2,64	7,54	0,00	3,94	4,56
	4	3,70	4,71	4,73	1,21	-2,20	1,71	4,80	-2,57	11,24	0,00	4,05	8,75
	5	3,18	3,33	4,72	1,27	-3,67	1,71	4,21	-2,54	11,24	0,00	4,66	10,19
	6	2,17	0,82	4,77	1,31	-3,87	2,85	4,01	-2,57	11,60	0,00	4,92	10,29
	7	1,04	-0,79	2,98	0,21	-2,18	3,29	3,45	-1,22	2,41	0,59	3,00	8,89
	8	1,52	0,02	3,45	0,18	-2,49	2,92	1,96	-1,13	6,15	0,59	2,82	12,12
	9	1,08	-0,87	1,25	0,76	-2,51	3,60	1,75	-1,21	11,45	0,59	2,02	11,64
	10	1,13	-0,48	1,25	0,47	-0,64	3,60	1,10	-1,13	5,42	0,59	1,09	12,67
	11	0,08	-2,64	-1,42	0,79	-0,46	3,64	1,11	-1,15	4,56	0,59	1,09	12,56
	12	0,74	-0,54	-1,42	0,32	-0,30	2,93	1,17	-1,10	-0,28	0,59	1,09	11,08
2025	1	1,00	2,68	-1,42	-10,01	-0,65	2,56	-0,10	-1,06	3,50	0,59	0,99	10,93
	2	0,91	1,02	0,05	-1,53	-0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09	0,02	0,10	1,12
	3	3,03	5,80	0,88	-9,37	-0,50	2,38	0,63	-0,26	4,88	0,59	1,15	16,82
	4	4,04	6,38	0,88	-0,27	-0,54	1,87	-0,76	-0,71	1,39	0,59	1,05	18,39
	5	3,32	4,84	0,88	0,39	0,13	1,76	-0,24	-0,31	1,39	0,59	0,47	15,47
	6	3,31	4,79	0,83	0,56	0,33	0,58	-0,23	-0,26	1,06	0,59	0,22	15,70
	7	3,45	5,26	0,41	0,52	0,25	0,75	-0,13	-0,27	0,51	0,42	0,22	15,65
	8	3,42	5,76	0,01	0,52	0,21	1,15	-0,50	-0,28	0,51	0,42	0,16	13,28
	9	3,81	6,46	0,00	0,09	0,20	0,86	-0,15	-0,28	0,51	0,42	0,16	14,77
	10	3,81	5,47	0,00	0,41	-0,11	0,86	0,03	-0,32	0,59	0,42	0,16	19,13
	11	2,62	2,55	0,00	0,24	-0,21	0,84	0,05	-0,34	0,59	0,42	0,16	18,91
	12	2,88	2,25	0,00	1,19	-0,16	0,84	0,40	-0,33	1,00	0,42	0,16	22,06
2026	1	2,96	-0,99	0,00	12,98	0,22	1,34	-0,21	0,20	-1,98	0,42	0,16	28,14
	2	4,69	1,62	0,55	21,16	0,08	1,31	-1,01	0,20	-1,98	0,42	0,19	28,44
	3	3,49	0,50	0,52	12,35	-0,04	1,11	-0,02	0,20	-1,98	0,42	0,31	25,89
	4	1,48	-0,64	1,04	1,94	-0,01	0,93	-0,80	0,03	-1,98	0,42	0,31	18,08
	5	3,27	3,12	2,70	1,35	1,06	1,10	1,90	-0,44	-2,17	0,42	1,14	16,37
	6	3,82	3,81	2,70	1,30	1,52	1,15	4,90	-0,17	-1,65	0,42	1,90	14,59

C. Daftar KUPVA Bukan Bank Berizin di Sumatera Selatan

Nama KUPVA BB	Alamat	Status Kantor	No. Telp/ Hp
PT Try Dharma Perdana	Jl. Kol. Atmo No.446 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081377918991 / 0711-351786
PT Sinar Valuta Asing Palembang	Jl. Sayangan No.164 RT 003/001 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081367727628
PT Berkat Sukses Bersama	Jl. R. Sukanto, PTC Mall GF-A2.27-28, 8 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan 30114	Kantor Pusat	0811786128
PT Makmur Alam Jaya	Jl. Beringin Janggut II No.6/351, 17 Ilir, Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081373088288/ 0711-317601
PT Sentral Megah Sentosa	Jl. R. Soekanto No.8A, PTC Mall Blok GF A1 No 18 Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang	Kantor Pusat	0853-6682-3351
PT Sentosa Valasindo Abadi	Jl. Petanang No. 1231, RT 17 RW 15, Palembang	Kantor Pusat	082280575006
PT Sumber Daya Usaha	Internasional Plaza Jl. Jenderal Sudirman No.147 Blok B-3, Palembang	Kantor Pusat	08117892478/ 0711-365691
PT H. La Tunrung A.M.C	Jl. R. Sukanto, No.79 RT 10/005 Kel.8 Ilir, Kec. Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan 30114	Kantor Cabang	082175059245/0711-5630188
PT Bhaktisakti Ganda Intiharmoni	Palembang Trade Center Mall (PTC) Lantai GF Blok A2, No.42-43 Jl. R Sukanto Palembang, Sumatera Selatan	Kantor Cabang	08558341789/ 0711-382418



Daftar Istilah

Mtm	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Qtq	Quarter to quarter perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan Sebelumnya
Yoy	Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya
Share Of Growth	Kontribusi suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan
Migas	Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi
Share effect	Kontribusi pangsa sektor atau sub sektor terhadap total PDRB
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Survei Konsumen	Survei yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau indikator dini (prompt indicator) mengenai tendensi/arah konsumsi rumah tangga dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi stabilitas keuangan rumah tangga dan ekspektasi konsumen terhadap perkiraan inflasi kedepan untuk mendukung penyusunan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Weighted Net Balance	Istilah lain dari Survei Bersih Tertimbang yang merupakan nilai share masing-masing sektor/subsektor terhadap total sektor PDB (atas dasar harga konstan tahun 2000) dengan total bobot sama dengan 1.
Survei Kinerja Dunia Usaha	Survei yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan, yaitu triwulan yang sedang berjalan dan perkiraan pada triwulan yang akan datang guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan, serta sebagai bahan informasi dalam penyusunan kajian ekonomi dan keuangan baik nasional maupun regional

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/keompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut
Ekspor	Adalah keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil
PDRB atas dasar harga berlaku	Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian
PDRB atas dasar harga konstan	Merupakan perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya
Bank Pemerintah	Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito
Loan to Deposits Ratio (LDR)	Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun
Cash inflows	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu
Cash Outflows	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu

Net Cashflows	Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>Netcash Outflows</i> bila terjadi <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan <i>cash inflows</i> , dan <i>Netcash inflows</i> bila terjadi sebaliknya
Aktiva Produktif	Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan
Kualitas Kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
Financing to Deposit Ratio (FDR)	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (<i>persistent</i>)
Kliring	Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kliring Debet	Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional
Non Performing Loans/Financing (NPLs/Ls)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk, misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15 % dari jumlah Kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan)
Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)	Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs, <i>gross</i> . Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs.

Rasio Non Performing Loans (NPLs) – NET	Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit
Sistem Bank Indonesia Real time Gross Settlement (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (real time) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)	Sistem kliring bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
Industri	Suatu kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang lebih tinggi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, pekerjaan perakitan (assembling) dari bagian suatu industri.
Pekerja	Orang yang biasanya bekerja diperusahaan/usaha tersebut.
Pekerja Dibayar	Orang yang biasanya bekerja diperusahaan/usaha dengan mendapatkan upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang.
Pekerja Tidak Dibayar	Pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang ikut aktif dalam pengelolaan perusahaan tetapi tidak mendapatkan upah/gaji, tidak termasuk mereka yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja yang biasa di perusahaan.
Input	Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa bahan baku, bahan bakar, barang lainnya di luar bahan baku/penolong, jasa industri, sewa gedung dan biaya jasa non industri lainnya.
Output	Nilai keluaran yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa nilai barang yang dihasilkan, tenaga listrik yang dijual, jasa industri yang diterima, keuntungan jual beli, pertambahan stok barang setengah jadi dan penerimaan-penerimaan lainnya.
Nilai Tambah/Value Added	Selisih nilai <i>output</i> dengan nilai <i>input</i> atau biasa disebut dengan nilai tambah menurut harga pasar.
Produktivitas	Rasio antara nilai <i>output</i> dengan jumlah tenaga kerja baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar.
Tingkat Efisiensi	Ratio antara nilai tambah atas dasar harga pasar terhadap <i>output</i> produksi.
Intensitas Tenaga Kerja	Suatu rasio antara biaya upah/gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja terhadap nilai tambah.
Gross Margin	% <i>tase value added</i> dikurangi biaya tenaga kerja dibagi <i>output</i> .
Usaha	Kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan atau menunjang kehidupan dan menanggung risiko.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/ dikelola secara komersil yaitu yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada satu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Bambang Pramono

Koordinator Penyusun

Adhie Wicaksono

M. Ardian Dwinanto

Tim Penulis

Utari Indrian

Aldi Pratama Sembiring

Ihsan Bagus Atyantodito

Dwita Adilah

Karina Nisa Aprilia

Theodora Stefany

Anggitha Ariijhayutyas Pinilih

Karina Qurrota Annida

M. Emyr Gunawan Rahmatullah

Nasrullah

Xenaneira Shodrokova

Kontributor

Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi

Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan

Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah

Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

Unit Kehumasan

Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi

Dewi Sinta P. S.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang

Telp. 0711 - 354188 . Fax. 0711 - 312013

<https://www.bi.go.id>

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang
Telp. 0711 - 354188 . Fax. 0711 - 312013
<https://www.bi.go.id>

